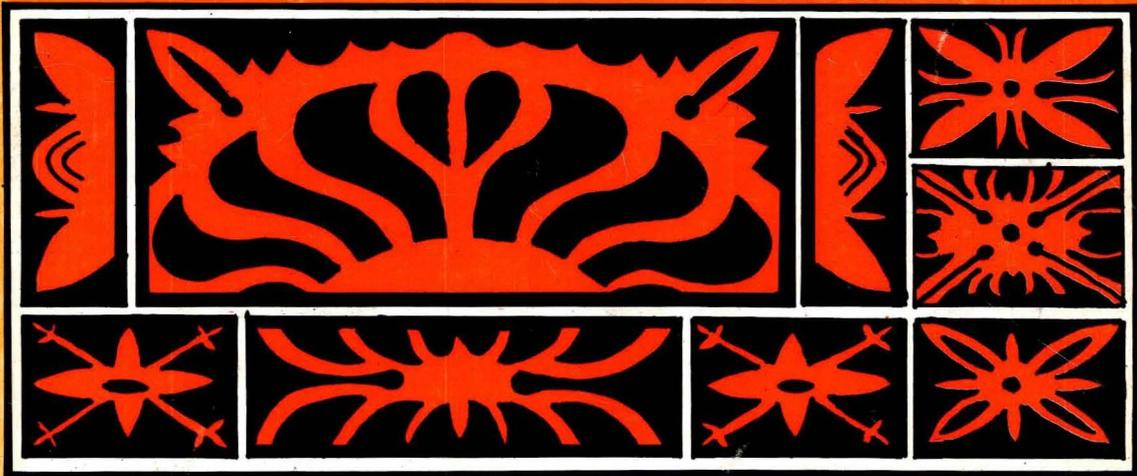




Milik Dep. DIKBUD.
Tidak diperdagangkan

**PEMBINAAN DISIPLIN
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN SENEN
KECAMATAN SENEN JAKARTA PUSAT**



Direktorat
Budayaan

PARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

**PEMBINAAN DISIPLIN
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN SENEN
KECAMATAN SENEN JAKARTA PUSAT**

TIM PENELITI / PENULIS :

- 1. Dra. Sunarti : Ketua Aspek**
- 2. Hendrika BA. : Anggota**

EDITOR

Drs. H. AS. NASUTION

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BAGIAN PROYEK PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
TAHUN 1993 / 1994**

P R A K A T A

Bagian Proyek Penelitian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (P3NB)) DKI Jakarta yang sebelumnya bernama Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) DKI Jakarta yang telah menggali dan mencetak naskah-naskah kebudayaan daerah DKI Jakarta demi nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya.

Pada tahun anggaran 1993/1994 Bagian Proyek Penelitian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya DKI Jakarta mencetak naskah hasil penelitian tahun 1992/1993 berjudul :

“Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kelurahan Senen - Kecamatan Senen, Jakarta Pusat”

Dengan diterbitkannya buku ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan Bapak Direktur Ditjarahnitra, Bapak Gubernur KDKI Jakarta beserta aparatnya, Bapak Pemimpin Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Pusat, Bapak Ka, Kanwil Depdikbud DKI Jakarta dan seluruh Tim Peneliti serta semua pihak yang telah berperan serta sehingga berhasilnya penerbitan buku ini.

Sudah barang tentu buku ini masih terdapat beberapa kekurangan baik isi maupun penyajiannya, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat kami harapkan.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 1993

Pemimpin Bagian Proyek P3NB

DKI Jakarta,



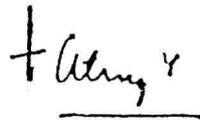
Drs. H. AS. Nasution

NIP. 130232972

**KATA SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

1. Bahwa budaya suatu bangsa merupakan kekayaan dan sekaligus merupakan jati diri bagi bangsa yang bersangkutan. Khasanah budaya bangsa Indonesia sedemikian tinggi, baik keluhurannya, jumlahnya, jenis maupun corak ragamnya. Kesemuanya itu merupakan kekayaan yang harus dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
2. Salah satu pendekatan untuk mewujudkan butir 1 diatas adalah menulis dan atau membukukannya untuk kemudian disebarluaskan.
3. Oleh karena itu saya hargai dan sambut baik kegiatan Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (P3NB) DKI Jakarta yang menerbitkan naskah yang menggambarkan “Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kelurahan Senen - Kecamatan Senen, Jakarta Pusat”.
4. Saya memahami bahwa materi dari naskah buku tersebut masih jauh daripada lengkap dan sempurna. Oleh karena itu setiap upaya dari manapun datangnya dan bermaksud menyempurnakan, jelas akan disampaikan terima kasih dan penghargaan.
5. Akhirnya semoga penerbitan naskah ini mencapai tujuannya.

Jakarta, Medio Juli 1993



Drs. H. TATING KARNADINATA

NIP. 130055833.



DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
Kata Sambutan Ka Kanwil Depdikbud DKI Jakarta	iii
Sambutan Dirjen Kebudayaan Depdikbud	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Masalah	2
1.3. Tujuan	4
1.4. Ruang lingkup	5
1.5. Metode	6
1.6. Sistematika Laporan	6
BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN	9
2.1. Gambaran Umum Kota	9
2.2. Gambaran Umum Daerah Penelitian	13
2.3. Berbagai Permasalahan Kota	20
BAB III. DISIPLIN MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMUKIMAN	
KELURAHAN SENEN	23
3.1. Disiplin Dalam Penanganan Limbah keluarga/Sampah	26
3.2. Disiplin Dalam Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Sosial	33
3.3. Disiplin Terhadap Administrasi Pemerintah	36
3.4. Disiplin Dalam Hubungan Ketetangaan	39
BAB IV. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT-TEMPAT	
UMUM DI KELURAHAN SENEN	43

4.1. Disiplin di Lingkungan Pasar /Pertokoan	46
4.2. Disiplin Di Lingkungan Terminal.....	56
4.3. Disiplin Di Lingkungan Tempat Hiburan	62
4.4. Disiplin Di Lingkungan Jalan Raya.....	65
BAB V. UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT KOTA ...	69
5.1. Pembinaan Oleh Pemerintah	69
BAB VI. ANALISA, KESIMPULAN DAN SARAN	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama atau berkelompok dengan sesamanya (*gregarious instinct*). Melalui kerjasama dalam kelompoknya, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mengembangkan keturunan, melakukan pembinaan hubungan dan menyesuaikan dengan lingkungan secara aktif. Betapapun kecilnya dari pengelompokan sosial tersebut diperlukan sebuah organisasi sebagai wadah pemersatunya. Prof. Dr. S Budhisantoso (1990) berpendapat bahwa di dalam sebuah pengelompokan masyarakat hadir empat kriteria, yaitu pemilihan sosial, sarana penghubung, kaidah-kaidah sosial dan pengendalian sosial.

Satuan wilayah pemukiman dengan identitas kota pada hakekatnya merupakan salah satu tempat di mana manusia mengadakan pengelompokan sosial. Daerah perkotaan sudah lama dipandang sebagai pusat kemajuan dan pembangunan, bertentangan dengan daerah pedesaan yang dianggap terbelakang belum maju. Orang kota “modern” dan kaum tani “tradisional”, yang buta berita dan melek berita, karena pemilikan media sumber insani versus teknologi tinggi, ekonomi subsistensi yang tidak produktif versus produktif padat modal untuk pasar, adalah serangkaian perbedaan yang diakui ada di perkotaan dengan daerah pedesaan.

Di sisi lain, kota biasanya ditandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan heterogenitas masyarakat yang tinggi. Pertambahan penduduk di kota sangat dipengaruhi oleh deras arus urbanisasi dari daerah belakang dan sekitarnya yang terjadi secara kontinu. Kota sebagai pusat pelayanan dengan berbagai fasilitasnya itulah yang antara lain menjadi daya tarik utama penduduk pendatang dari daerah belakang dan sekitarnya.

Pertambahan penduduk yang tinggi dan kurangnya prasarana dan sarana kehidupan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan di daerah perkotaan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi di kota besar di Indonesia antara lain adalah masalah pencemaran lingkungan sebagai akibat pengelolaan limbah yang kurang benar, masalah transportasi, masalah kesempatan kerja, masalah pemukiman yang kurang memenuhi persyaratan hidup, dan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan seperti kriminalitas dan masalah tuna susila. Ketatnya persaingan masyarakat untuk mendapatkan prasarana dan sarana kehidupan, tidak jarang mengakibatkan seseorang kurang memperhatikan orang lain demi pemenuhan kebutuhan pribadinya. Sehubungan dengan hal ini, kurangnya pemahaman sejumlah warga kota terhadap lingkungan di mana mereka tinggal juga mempunyai andil cukup besar terhadap munculnya berbagai permasalahan di perkotaan. Sejumlah warga kota masih bersikap dan berperilaku seperti di daerah asalnya.

Kehadiran permasalahan di daerah perkotaan tersebut antara lain sangat dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan warga kota dalam mentaati segala peraturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Seperti telah tersirat di atas bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki aturan-aturan, kaidah sosial, dan pengendalian sosial tertentu untuk menjaga keberlangsungan kelompoknya. Demikian pula halnya dengan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Sehubungan dengan itu pula untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat perlu adanya pembinaan disiplin terhadap warga masyarakat yang bersangkutan.

GBHN 1983 telah merumuskan : “Tanggungjawab sosial dan disiplin nasional dibina dan dikembangkan secara lebih nyata, dalam usaha memperkokoh kesetiakawanan nasional, lebih menamkan sikap mental tenggang rasa, hemat dan sederhana, bekerja keras, cermat, tertib penuh rasa pengabdian, jujur dan ksatria. Rumusan itu dituangkan mengingat bahwa pembinaan disiplin di kalangan masyarakat amat penting. Dengan berlandaskan inilah penelitian tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota dilakukan.

1.2. Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari berbagai permasalahan muncul di perkotaan. Perpaduan antara kurang memadainya prasarana dan sarana kehidupan, dengan kurangnya pemahaman warga kota terhadap tata aturan

dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di perkotaan diduga menyebabkan terjadinya kekurang disiplin warga masyarakatnya. Bila dikaji Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan mempunyai daya tarik untuk dikunjungi, karena kemajuan-kemajuan yang ada padanya. Di samping itu justru karena kemajuan-kemajuan itu pula, Jakarta menjadi sasaran utama terjadinya urbanisasi. Adapun urbanisasi yang terjadi dewasa ini tidak terbatas pada golongan pekerja kasar berpendidikan rendah, tetapi juga mereka yang berpendidikan tinggi atau cerdas pandai. Keinginan untuk datang ke Jakarta tersebut pada umumnya terdorong oleh keinginan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti antara lain menyangkut masalah ekonomi. Dengan demikian terjadinya urbanisasi ke Jakarta berarti karena keadaan ekonomi di Jakarta yang dianggap lebih baik. Kondisi ekonomi yang lebih baik ini tidak dapat dilepaskan dari keadaan politik, keamanan, kesehatan, kebersihan, tata tertib, norma-norma dan disiplin.

Dalam satu aspek, Jakarta dapat dilihat sebagai suatu kota yang penuh kontras, tidak saja antara gejala kehidupan modern dengan kehidupan kampung, namun juga antara etnik. Konfrontasi sikap hidup ini kadang-kadang lebih bermanifestasi dalam persatuan budaya daripada hanya pengasingan. Pada dasarnya seperti kota-kota besar lainnya, ibu kota Republik ini dapat dilukiskan sebagai suatu kawasan yang terbuka bagi segala kemungkinan konflik sosial budaya dan corak ragam kehidupan. Bagi kelompok-kelompok etnik yang berdatangan dari segala pelosok tanah air, Jakarta merupakan suatu kawasan "tidak bertuan", dimana perjuangan terbuka untuk mendapatkan hak hidup etnik dan kehidupan etnik dianggap sebagai tempatnya. Dalam situasi demikian, tiada alternatif lain kecuali kesetupaduan kelompok dan kesetiaan kepada kelompok menjadi lebih diprioritaskan.

Berkenaan dengan uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 1) sejauhmanakah tingkat disiplin warga masyarakat di lingkungan perkotaan. 2) Aturan dan kaidah-kaidah apa saja yang berlaku pada lingkungan masyarakat perkotaan. 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam rangka pembinaan disiplin pada masyarakat perkotaan. Di samping masalah utama tersebut akan dicoba mencari dan membahas strategi peningkatan disiplin warga masyarakat perkotaan.

Bertolak dari tujuan penulisan dengan permasalahan seperti tersebut di atas, maka dilakukanlah penelitian pada lokasi terpilih yaitu Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat.

1.3 Tujuan

Telah diketahui bahwa penelitian tentang masyarakat kota yang menitikberatkan pada segi kedisiplinan belum pernah dilakukan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini berusaha mengumpulkan data dan informasi tentang kehidupan masyarakat perkotaan, terutama untuk mengungkap dan mendiskripsikan sejauh mana tingkat disiplin warga masyarakat yang bersangkutan. Selaras dengan permasalahan dalam kajian ini akan diungkap pula aturan-aturan sosial yang berlaku di kalangan masyarakat perkotaan serta upaya pembinaan disiplin yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dengan melakukan penelitian tersebut diharapkan mampu mengukur kedalaman dan kematangan tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap berbagai peraturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku.

Berkat pemerataan pembangunan, sebagian besar penduduk Indonesia telah menikmati hasilnya. Suatu segi yang tidak dapat disangkal adalah perubahan wajah pedesaan menjadi wajah perkotaan yang ditandai dengan masuknya listrik, koran-koran di desa. Oleh sebab itu diharapkan hasil penelitian ini akan menunjukkan fenomena dan indikator yang mampu menjawab masalah penelitian. Tentunya dengan tersedianya naskah yang memuat data dan informasi seperti yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau pertimbangan Direktorat Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional yang besar artinya bagi pembinaan disiplin nasional dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional, serta menyebarkan kemasyarakatan.

Demikian pula pada gilirannya data dan informasi tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota sangatlah penting artinya bagi perumusan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan terhadap warga di daerah perkotaan pada umumnya dan khususnya masyarakat kota di Kelurahan Senen, Komada Jakarta Pusat.

Hal tersebut penting artinya mengingat semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah perkotaan sejalan dengan perkembangan kota itu sendiri. Asumsi dalam penelitian ini adalah semakin padat penduduk suatu lingkungan pemukiman semakin rendah disiplin warga masyarakatnya.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota akan dilakukan pada dua lokasi tempat berlangsungnya aktivitas masyarakat, yaitu di lingkungan pemukiman (Rukun Warga 04) dan di tempat-tempat umum (pasar dan pertokoan, terminal, bioskop dan jalan raya). Melalui data dan informasi yang terkumpul di lokasi itu diharapkan dapat mencerminkan permasalahan, kedisiplinan yang terdapat di Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Kedua lokasi lingkungan terpilih tersebut merupakan daerah pusat kota di mana diperkirakan terdapat berbagai permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya disiplin warga masyarakat.

Data dan informasi yang akan diungkap di lingkungan pemukiman antara lain adalah disiplin warga masyarakat terhadap penanganan limbah keluarga, kebersihan lingkungan, partisipasi warga masyarakat terhadap kegiatan sosial, administrasi pemerintah, dan hubungan dalam ketetanggaaan. Sementara itu, pada lingkungan-lingkungan tempat umum (pasar dan pertokoan, terminal, tempat-tempat hiburan dan jalan raya) data dan informasi yang akan diungkap adalah disiplin terhadap kebersihan, aturan-aturan dalam pelayanan, aturan-aturan di tempat umum, dan disiplin terhadap peraturan-peraturan formal.

Berkenaan dengan itu materi utama dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang aturan-aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku pada masyarakat lingkungan pemukiman dan masyarakat lingkungan tempat-tempat umum. Dengan demikian disiplin yang dimaksud di sini tidak lepas dari kesadaran diri untuk mentaati nilai, norma dan aturan yang berlaku di dalam lingkungan. Dengan demikian disiplin masyarakat kota mencerminkan kesadaran diri sebagai anggota masyarakat dalam mentaati ketentuan-ketentuan atau patokan-patokan yang dipakai untuk kepentingan bersama. Di sini lain menunjukkan sikap dan perilaku yang menunjang keberhasilan pembangunan lingkungan maupun pembangunan nasional.

Dalam usaha untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh perlu diketengahkan pula tentang lokasi luas kota, lingkungan fisik, lingkungan alam, kependudukan, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya serta berbagai permasalahan kota.

1.5 Metode

Dalam mengumpulkan data-data, tim peneliti mempergunakan berbagai teknik penelitian seperti penelitian perpustakaan, observasi dan partisipasi, interview bebas dan berstruktur, pengumpulan data sekunder.

Penelitian perpustakaan kami lakukan dengan membaca buku-buku yang membicarakan prinsip-prinsip dan uraian yang berhubungan dengan disiplin, khususnya disiplin masyarakat lingkungan pemukiman dan masyarakat di tempat-tempat umum terhadap aturan-aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku.

Kami secara langsung terjun ke dalam lingkungan masyarakat Kelurahan Senen. Di wilayah ini terdapat lingkungan pemukiman pasar dan pertokoan, terminal, gelanggang remaja, bioskop-bioskop dan jalan raya.

Dalam menjangkau data-data seperti jenis kelamin, agama, pendidikan, mata pencaharian pokok maupun tambahan, tanggapan masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku digunakan wawancara berstruktur, questioner dan skedul. Untuk memberi kesempatan kepada informan agar menjawab sesuai dengan hasrat mereka, kami menyediakan daftar pertanyaan yang sifatnya open ended questions. Pada awal penelitian, skedul dan questioner yang berkenaan dengan masalah penelitian telah dipersiapkan.

Interview bebas dipergunakan untuk menanyakan beberapa hal yang tidak dapat dirumuskan dengan pertanyaan tertulis dalam questioner maupun skedul, seperti berdirinya terminal, pasar inpres, gelanggang remaja, kemudian perkembangannya. Dalam hal ini kami sering berkunjung ke rumah ketua Rukun Warga (RW), Sekretaris Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembina Bidang Sosial Kemasyarakatan, Pengurus Biba Bantuan Sosial (Binsos).

1.6 Sistematika Laporan

Penelitian ini dilakukan pada salah satu kelurahan yang tergabung dalam Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang penduduknya heterogen dan kebanyakan hidup sebagai pedagang. Kelurahan itu adalah Senen yang terletak kurang lebih 100 m dari kantor Kecamatan Senen ke arah utara. Lokasi ini

terletak di pusat kota Jakarta dan berkondisi fisik perkotaan. Namun demikian, masih terdapat sebagian penduduknya yang amat mengharapkan sentuhan proyek air minum dan sanitasi.

Untuk mengawali proses terpilihnya Kelurahan Senen sebagai pusat kegiatan penelitian menggunakan data yang kami peroleh dari Biro Umum Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, dari lima kotamadya yang tergabung di dalamnya (Jakarta Pusat, Barat, Selatan, Timur dan Utara) ternyata Jakarta Pusat terlihat kecenderungan kurang disiplin.

Sesuai dengan kerangka dasar penelitian, laporan penelitian ini terdiri atas enam bab ditambah dengan kepustakaan, indeks dan lampiran. Secara ringkas isi pada setiap bab adalah sebagai berikut :

Bab I atau Bab Pendahuluan berisi uraian pokok-pokok pemikiran yang tertuang dalam : latar belakang, apa yang menjadi masalah dan tujuan penelitian serta yang melingkupi penelitian ini. Dalam bab ini juga dikemukakan tentang proses penelitian yang meliputi : pengambilan sampel, pengumpulan data dan penulisan laporan.

Bab II mengetengahkan tentang gambaran umum kota dan daerah penelitian yang memuat uraian tentang lokasi dan luas kota, lingkungan fisik, lingkungan alam, kependudukan, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya yang melatarbelakangi.

Bab III meliputi “Disiplin Masyarakat Di Lingkungan Pemukiman Kelurahan Senen”, dengan uraian mengenai disiplin dalam penanganan limbah keluarga/sampah. Kemudian partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sosial. Selain itu, dalam bab ini juga dikemukakan uraian tentang administrasi pemerintahan serta hubungan ketetangaan.

Bab IV yang berjudul “Disiplin Masyarakat Di Lingkungan Tempat-tempat Umum Di Kelurahan Senen” membahas tentang konsep-konsep masyarakat setempat mengenai disiplin di lingkungan pasar/pertokoan dan disiplin di lingkungan terminal. Selain itu, dalam bab ini juga diungkapkan tentang disiplin di lingkungan tempat hiburan maupun di jalan raya.

Bab V dengan judul “Upaya Pembinaan Disiplin Pada Masyarakat Kota” berisi uraian mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat pada masyarakat setempat.

Bab VI (Bab terakhir) yang kami beri judul “Kesimpulan dan Saran” berisi mengenai temuan-temuan yang kami peroleh berdasarkan data dan informasi pada bab-bab terdahulu. Bab ini akhirnya ditutup dengan saran-saran yang berkenaan dengan bahan pengambilan kebijaksanaan dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota

Pada abad ke enambelas Jakarta dikenal sebagai kota pelabuhan yang ramai. Banyak orang dari daerah-daerah lain yang melakukan pelayaran dan perdagangan ke Jakarta, di antaranya adalah orang-orang dari Ambon, Maluku, Banjarmasin, Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Disamping itu banyak pula berdatangan bangsa-bangsa asing dari berbagai negeri, misalnya bangsa Belanda, bangsa Inggris dan lain-lainnya. Akibat dari kedatangan bangsa-bangsa tersebut maka terjadilah persaingan di antara mereka untuk berkuasa.

Pada saat Belanda-berkuasa di Jakarta (Batavia) banyak bangunan yang didirikan, terutama pada saat Daendels menjadi gubernur jenderal. Bangunan-bangunan tersebut misalnya adalah istana (Waterlooplein, yang sekarang dikenal dengan lapangan banteng), Societeit de Harmoni (Gedung Wisma Nusantara), pusat pertahanan di Meester Cornelis (Jatinegara) dan lain-lainnya. Bangunan-bangunan tersebut hingga kini masih bisa disaksikan keberadaannya.

Seperti halnya di daerah lain di Indonesia, Jakarta juga mengalami berada di bawah kekuasaan Belanda, Inggris dan Jepang. Segala duka dan suka pada jaman penjajahan dirasakan pula oleh orang-orang Jakarta. Pada waktu itu Jakarta sudah dihuni oleh sukubangsa-sukubangsa yang ada di Indonesia, di samping sukubangsa Betawi sendiri.

Jakarta merupakan pusat kegiatan perjuangan memperebutkan dan memperjuangkan kemerdekaan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Jakarta

menjadi daerah otonom di Republik Indonesia dan disebut sebagai Pemerintah Nasional Kota Jakarta. Sebutan ini berlaku sampai terjadinya Agresi Militer I. Selanjutnya kota Jakarta diadikandistrik federal Negara Indonesia Serikat, yaitu pada waktu pembentukan negara federal. Pasal 68 Konstitusi RIS menetapkan pemerintahan beribukota di Jakarta. Pada tanggal 7-8-1950 negara Republik Indonesia Serikat menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Jakarta tetap menjadi ibukota RIS dulu.

Kembali ke sejarah masa silam Jakarta, pada jaman dahulu bernama Sunda Kelapa dan terletak di muara sungai Ciliwung yang pada abad ke 14 telah berkembang sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan. Pada waktu itu masyarakatnya beragama Hindu. Pada tahun 1527 Sunda Kelapa dapat direbut oleh Fatahillah dan tanggal 22 Juni 1527 dijadikan hari lahirnya kota Jakarta oleh pemerintah.

Pada saat Belanda berhasil menduduki Sunda Kelapa, pada tahun 1621 nama kota Jakarta diganti menjadi Batavia dan nama ini masih tetap bertahan hingga berdirinya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945.

Status pemerintahan di Jakarta pada tahun 1903 berubah dari Stad Batavia atau kota Batavia menjadi Gemeente Batavia. Dalam tata pemerintahan yang demikian ini, Batavia menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan desentralisasi. Pada tahun 1926 Gemeente Batavia berubah lagi menjadi Stadgemeente Batavia yang mempunyai lingkup dan keuangan sendiri dalam melaksanakan rumah tangga kota. Status pemerintahan seperti ini berlangsung sampai saat Belanda dikalahkan oleh Jepang di Indonesia bulan Maret 1942.

Pada saat pendudukan Jepang, Stadgemeente Batavia dirubah menjadi Tokubetusi, artinya Stadgemeente luar biasa. Wilayah Batavia dibagi menjadi 7 bagian yang disebut siku. Siku-siku tersebut adalah Penjaringan siku, Manggabesar siku, Tanjung Priuk siku, Tanah Abang siku, Gambir siku, Pasar Senen siku, dan Jatinegara siku. Jakarta Tokubetusi ini berlangsung hingga tahun 1945 saat Jepang kalah dan negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Pada tahun 1949 negara Republik Indonesia Serikat terbentuk dengan ibukota negara di Jakarta. Pemerintahan kota Jakarta diatur oleh pemerintah pusat RIS. Akhirnya pada tanggal 31 Maret 1950 pemerintah kota Jakarta diubah namanya menjadi kotapraja Jakarta Raya. Berdasarkan Keputusan Presiden RIS no 125 tahun 1950 tanggal 24 Maret 1950 Kotapraja Jakarta

Raya meliputi wilayah Stadgemeente Batavia ditambah daerah-daerah baru yaitu Cengkareng, Kebon Jeruk, Kebayoran Ikir-udik, Pasar Rebo, Pulo Gadung dan Mampang Prapatan.

Berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961, tanggal 28 Agustus 1961 Kotapraja Jakarta Raya ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peningkatan status tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia yang mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. Di samping itu, untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai kota indoktrinasi, teladan dan cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Jakarta tetap sebagai ibukota Republik Indonesia dipertegas dengan Undang-undang No. 10 tahun 1964 tanggal 31 Agustus 1964. Perluasan dan pemekaran kota Jakarta berlangsung terus hingga kini, warga bertambah banyak pembangunan kota semakin meningkat. Di lain pihak permasalahan baru muncul, seperti masalah kependudukan, pendidikan, ekonomi, transportasi, pemukiman, lingkungan hidup dan lain-lain.

Wilayah DKI Jakarta terhampar di dataran antara $94^{\circ} 45'$ - $94^{\circ} 05'$ bujur timur dan $0^{\circ} 68'$ - $11^{\circ} 15'$ lintang selatan. Luas daratannya 577 km^2 [1974] dan luas lautnya $61.997,55 \text{ km}^2$. Namun berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 1974 No. 4, luas wilayah DKI bertambah menjadi $587,62 \text{ km}^2$ yaitu dengan dimasukkannya sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang.

DKI Jakarta beriklim panas dengan suhu rata-rata sepanjang tahun adalah 27 derajat celsius. Curah hujan rata-rata setiap tahun 200 mm dan jumlah maksimum pada bulan Januari. Jakarta dipengaruhi oleh dua arah angin muson yaitu muson barat dan muson timur. Angin muson barat bertiup dari bulan Nopember sampai April sedang muson timur bertiup bulan Mei sampai Oktober.

Berdasarkan Lembaran Daerah No. 4 tahun 1966 pemerintah DKI Jakarta, secara administratif DKI Jakarta terbagi atas 5 wilayah kota yaitu Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Jakarta, sebuah kota besar yang dihuni oleh segala macam sukubangsa dengan pola hidupnya masing-masing. Lapisan masyarakat kota Jakarta terdiri dari lapisan bangsa-bangsa asing dan lapisan orang Indonesia asli dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagai kota besar dengan beranekaragam penduduk,

Jakarta tidak bisa terlepas dari segala macam permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut berkaitan dengan kependudukan, perumahan, ekonomi, transportasi dan lain-lainnya.

Pemerintah telah berusaha menanggulangi segala macam persoalan sosial tersebut sejak beberapa puluh tahun silam. Misalnya saja masalah perumahan, pemerintah telah mendirikan bangunan perumahan darurat yang kemudian disewakan dengan harga murah. Rumah-rumah tersebut didirikan di Tanjung Priuk, Tanah Tinggi, Pisang Batu dan lain sebagainya. Di samping itu, masalah fakir miskin dan gelandangan juga sudah mulai ditanggulangi. Tindakan penanggulangan itu misalnya pada tahun 1950 anak-anak terlantar di pasar-pasar dikumpulkan kemudian dibawa ke pulau Damar, Teluk Jakarta untuk dididik dan diberi perawatan.

Masalah penanggulangan fakir miskin dan anak terlantar banyak pula dilakukan oleh badan-badan sosial swasta yang berkaitan dengan aliran kepercayaan dan agama, demikian pula dengan masalah anak-anak yatim. Badan-badan sosial semacam itu diberi subsidi oleh pemerintah kota, di antaranya adalah R.P Rukun Isteri, R.P Muslimin, R.Y.P Muhamadiyah. Partisipasi mereka dalam menanggulangi masalah sosial ini sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kebijaksanaan pemerintah di sektor ekonomi adalah prinsip demokrasi, yang memberikan kebebasan dan kesempatan yang luas pada market forces dalam masyarakat. Kebijakan yang dicanangkan itu bermaksud mengurangi campur tangan pemerintah secara langsung di sektor ekonomi dengan melakukan debirokrasi dan dekontrol. Dengan demikian pemerintah hanya sebagai pembimbing dan pembina kegiatan sektor perekonomian masyarakat.

Jakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan dan kehidupan pendidikan dan sosial budaya. Keadaan ini sudah terwujud sejak jaman dahulu dan makin jelas setelah Indonesia merdeka lebih-lebih pada dasawarsa terakhir ini.

Jakarta sebagai ibukota negara pada saat ini telah berkembang sebagai kota metropolitan dengan segudang persoalan. Sebagai kota terbesar di Indonesia, Jakarta mengemban beban yang tidak ringan. Jakarta adalah pintu gerbang Indonesia, cerminan Indonesia. Oleh karena itu, aparat pemerintah DKI Jakarta harus bekerja ekstra agar fungsi dan peranan Jakarta sebagai pusat segala kehidupan orang Indonesia bisa tercapai, setidaknya ada usaha ke arah itu.

Secara garis besar, kota itu ditandai dengan berbagai macam persoalan yang senantiasa menghantui dan perlu pemikiran yang mendalam untuk pemecahannya. Untuk lebih jelasnya, pada sub bab “berbagai permasalahan kota” masalah tersebut akan dibahas secara panjang lebar.

2.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Penelitian tentang disiplin di lingkungan masyarakat kota ini dilakukan di Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Walikota Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Kecamatan Senen merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, dengan luas wilayah 422,31 Ha dan secara demografis dan geografis terletak di jantung ibukota. Kecamatan Senen terbagi dalam 6 kelurahan, 47 rukun warga (RW), 552 rukun tetangga (RT) yang terdiri dari 30.806 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 128.962 orang (data akhir Maret 1992).

Secara historis di Kecamatan Senen terdapat beberapa gedung bernilai budaya dan dilestarikan keberadaannya karena jasa-jasanya di masa perjuangan dulu, seperti Gedung Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda dan lain-lainnya. Namun demikian, sesuai dengan tuntutan perkembangan perkotaan dan penambahan penduduk yang sangat pesat maka kecamatan Senen kini sudah semakin semarak dan maju.

Enam kelurahan yang terdapat di kelurahan Senen adalah kelurahan Senen, kelurahan Kwitang, kelurahan Kenari, kelurahan Kramat, kelurahan Paseban dan kelurahan Bungur. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1b.3/1/30/1969 tentang perubahan batas-batas dan nama wilayah administrasi Pemerintah DKI Jakarta (Lembaran Daerah tahun 1969 Nomor 45) wilayah kecamatan Senen meliputi :

- sebelah utara : Jalan Pejambon, A.R Saleh, Kalileo, Kepu Selatan, Gunung Sahari I dan Jalan Kalibaru Timur Raya
- sebelah timur : Jalan Kereta Api dan kali Sentiong
- sebelah barat : Kali Ciliwung
- sebelah selatan : Jalan Pramuka, Matraman, Jalan Letjen. Suprpto (Tanah Tinggi Barat/Poncol).

Kelurahan Senen terbagi dalam 47 Rukun Tetangga, masuk dalam 4 Rukun Warga dengan luas daerah 80, 90 Ha. (diatur dalam SK. gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1251 tahun 1986 tentang Pemecahan, Penyatuan, Penetapan Batas, Perubahan nama kelurahan yang kembar/sama dan penetapan luas wilayah kelurahan di DKI Jakarta). Dari jumlah 4 rukun warga tersebut, yang masih belum diremajakan adalah 1 RW, yang sudah diremajakan 2 RW, sedang yang masih dalam pelaksanaan adalah 1 RW.

Prasarana dan sarana umum yang tersedia di kelurahan Senen untuk mencapai pusat pemerintahan wilayah DKI sangat memadai. Hal itu disebabkan oleh letak kelurahan Senen yang sangat strategis di jantung kota metropolitan Jakarta ini.

Pusat pemerintahan propinsi DKI Jakarta terletak kurang lebih 2 km dari kelurahan Senen, bisa ditempuh dengan berbagai kendaraan baik kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Dari terminal Senen ada satu lintas Metromini yaitu P15, melayani jalur terminal Senen - Setiabudi dan melewati kantor Gubernur Kepala Daerah khusus Ibukota (Balaikota).

Masyarakat di daerah penelitian ini tinggal mengelompok padat dengan rumah-rumah semi permanen. Antara rumah yang satu dengan yang lainnya tak ada batas yang jelas. Rumah-rumah mereka berdempetan satu dengan yang lainnya, sedangkan jalan yang memisahkan hanyalah berupa jalan setapak (gang-gang sempit) bantuan proyek Muhamad Husni Tamrin (MHT).

Sarana air bersih yang tersedja berasal dari sumur-sumur yang dimiliki oleh beberapa orang saja. Keberadaan sumur tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum. Namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, jumlah sumur yang ada tersebut masih kurang memadai. Oleh karena itu, lingkungan di sana juga tidak mencerminkan suatu lingkungan yang bersih. Demikian pula halnya dengan masalah penerangan/lampu-lampu di jalan dalam lingkungan pemukiman.

Dilihat dari luar, tampak beberapa toko milik orang China. Sekilas memang terlihat rapi, tetapi di balik toko-toko tersebut tampak sebuah lingkungan pemukiman yang jorok, kumuh. Para penduduk di sini terdiri dari berbagai macam sukubangsa antara lain Betawi, Jawa, Sunda, Batak dan China.

Fasilitas umum yang tersedia di daerah ini adalah terminal bus, stasiun Kereta Api, pasar, pusat pertokoan dan bioskop. Oleh karena itu warga di daerah penelitian ini tidak terlalu repot apabila akan bepergian, berbelanja atau mencari hiburan dengan menonton film di bioskop baik bioskop dengan harga tanda masuk yang relatif murah maupun yang cukup mahal.

Untuk lebih jelasnya lebih dulu akan kita lihat jumlah penduduk kecamatan Senen berdasarkan golongan usia. Sedangkan komposisi penduduk kelurahan Senen sendiri akan diketengahkan kemudian pada bagian lain di belakang.

TABEL II. 1
PENDUDUK KECAMATAN SENEN MENURUT USIA

No.	Gol. Usia	WNA		WNI		Jumlah
		Laki	Pr.	Laki	Pr.	
1	0 - 4 Th	56	75	8.644	8.143	16.918
2	5 - 14 Th	177	173	14.822	14.339	29.511
3	15 - 24 Th	180	153	12.657	11.149	24.139
4	25 - 34 Th	305	242	11.224	9.208	20.979
5	35 - 44 Th	164	153	6.704	7.513	14.534
6	45 - 54 Th	129	109	5.770	4.699	10.708
7	55 - 64 Th	59	64	3.884	4.370	8.377
8	65 - 74 Th	29	27	1.724	1.651	3.429
9	75 Th - ke atas	5	7	155	199	326
	Jumlah	1.104	1.003	65.584	61.271	128.962

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Tahun 1991/1992

Menurut data yang diperoleh, penduduk kelurahan Senen pada periode bulan April 1991 berjumlah 8.110 jiwa. Sedangkan pada periode bulan Maret 1992 menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk sebesar 0,080% atau 640 jiwa. Jadi pada bulan Maret 1992 jumlah penduduk kelurahan Senen adalah 7.470 jiwa.

Penurunan jumlah penduduk tersebut bisa diakibatkan oleh adanya mobilitas penduduk seperti pindah alamat atau meninggal dunia, bisa pula karena keberhasilan program pemerintah yaitu keluarga berencana. Mobilitas

penduduk di kelurahan Senen adalah sebagai berikut : lahir berjumlah 145 orang, datang 114 orang, meninggal 62 orang dan pindah 840 orang.

Keberhasilan program pemerintah agar masyarakat sejahtera didukung oleh adanya beberapa rumah sakit baik swasta maupun negeri milik pemerintah, pusat-pusat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, Poliklinik/balai pengobatan. Di kelurahan Senen terdapat satu rumah sakit milik pemerintah, satu rumah sakit bersalin/BKIA dan satu poliklinik, lima posyandu, satu pos KB. Dari berbagai jenis cara ber-KB, ternyata IUD paling banyak diminati yaitu berjumlah 329 orang, kemudian suntik berjumlah 185 orang, pil 154 orang dan kondom 48 orang.

Kelurahan Senen terletak di daerah yang cukup strategis, dekat dengan pusat pertokoan dan perbelanjaan serta sarana sosial lainnya. Berkenaan dengan hal itu, di bawah ini akan digambarkan jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian hidup. Dari data yang kami peroleh, ternyata sebagian besar penduduk di sana bermata pencaharian hidup sebagai pedagang. Hal itu tentu dipengaruhi oleh keberadaan wilayah kelurahan Senen yang dekat dengan pasar maupun pusat-pusat perbelanjaan tadi. Jenis mata pencaharian hidup lain yang digeluti adalah pegawai negeri sipil, karyawan atau buruh, anggota ABRI dan wiraswasta. Sedangkan yang lainnya bekerja serabutan dan dalam tulisan ini dikategorikan lain-lain. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL II. 2
JUMLAH PENDUDUK KEL. SENEN MENURUT
MATAPENCAHARIAN HIDUP

Jenis Mata pencaharian hidup	Jumlah
Pedagang	2.864
Pegawai Negeri Sipil	1.175
Karyawan/Buruh	1.023
A B R I	565
Lain-lain	367
Jumlah	6.055

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Wilayah Kecamatan Senen 1991/1992

Apabila dilihat luas wilayahnya, kelurahan Senen merupakan wilayah dengan luas urutan nomor dua jika dibandingkan dengan kelurahan lain. Di bawah ini akan digambarkan mengenai perbandingan antara luas wilayah kelurahan-kelurahan di kecamatan Senen dengan jumlah penduduk dan kepadatannya.

TABEL II.3
LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATANNYA
DI WILAYAH KECAMATAN SENEN

Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah			Jumlah Pddk		Kepadatan (jw/km ²)	
		RW	RT	KK	LK	PR	Juml	
Senen	80,90	4	47	2.423	3.073	4.397	7.470	92,30
Kwitang	44,61	9	88	4.806	8.912	9.036	17.948	402,33
Kenari	91,00	8	62	3.372	7.889	6.722	14.611	160,56
Kramat	70,87	8	98	6.505	15.060	15.653	30.713	433,37
Paseban	71,47	8	122	7.786	13.685	14.439	28.124	393,51
Bungur	63,53	10	134	5.914	18.068	12.028	30.096	473,73
Jumlah	422,31	47	552	30.806	66.687	62.275	128.962	305,37

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Senen 1991/1992

Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan di RT 015 kelurahan Senen tampak bahwa rumah-rumah di sini dibangun dengan bahan dari batu, kayu dan bambu. Dari data yang didapat di kelurahan bangunan rumah yang dibuat dari batu terdiri atas 802 rumah, dari kayu/papan 246 rumah, semi permanen (separoh dari batu dan separoh dari kayu/papan) 240 rumah, sedang dari bambu berjumlah 54 rumah.

Rumah-rumah penduduk dibangun saling berhimpitan satu sama lain tanpa batas yang jelas kecuali dipisahkan oleh gang-gang sempit yang becek bila turun hujan. Gang-gang itu sebetulnya sudah diremajakan dalam rangka proyek MHT, tetapi kondisinya saat ini sudah rusak bahkan semennya pun

sudah tampak menghilang tinggal tanah yang kelihatan. Got (saluran air) penuh dengan sampah, akibatnya air tidak bisa mengalir dan pada musim kemarau akan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Pengaturan ruang-ruang rumah penduduk juga tidak jelas, mana ruang tamu dan mana ruang keluarga. Bahkan tidak jarang ruang tamu juga dipergunakan untuk ruang keluarga, ruang tidur atau dapur. Sedangkan kamar mandi/WC tidak semua penduduk memilikinya. Ada kalanya kamar mandi/WC hanya mengambil ruang dengan menyekat dapur. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada orang yang lewat di salah satu gang di wilayah pemukiman daerah penelitian ini bisa melihat segala aktifitas orang yang berada di dalam sebuah rumah yang terlewat tersebut. Keadaan yang demikian itu diperparah lagi dengan adanya baju-baju yang dijemur di gang-gang sehingga menambah pengapnya udara. Hal itu bisa dimaklumi karena di daerah itu hampir tidak ada lagi tempat atau halaman yang luas yang bisa dipakai untuk menjemur pakaian.

Di atas telah dikatakan bahwa sebagian besar warga masyarakat di daerah penelitian bermata pencaharian sebagai pedagang. Dapat dikatakan bahwa mereka itu digolongkan sebagai pedagang kecil. Dapat dikatakan bahwa mereka itu digolongkan sebagai pedagang dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil pula. Mereka bekerja seharian penuh demi mencari sesuap nasi untuk keluarga. Hari-hari mereka gunakan untuk mencari nafkah. Akibatnya mereka beranggapan bahwa rumah hanya sekedar tempat untuk beristirahat pada malam hari saja. Mereka kurang memikirkan kebersihan rumah, halaman dan gang-gang yang memisahkan rumah yang satu dengan yang lainnya. Mereka pun membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga di setiap gang tampak sampah-sampah berserakan. Seolah mereka tidak peduli akan kebersihan lingkungan.

Pada dasarnya pemerintah telah mencanangkan program kebersihan bagi warga masyarakat. Kegiatan untuk memacu terciptanya kebersihan tersebut terus digalakkan dan pemerintahpun menyediakan sarana dan prasarananya, seperti gerobak sampah, tong-tong sampah, bak-bak penampungan sampah baik di lingkungan pemukiman maupun di lingkungan tempat-tempat umum lainnya. Namun demikian, masyarakat ternyata belum mempunyai mental yang baik atau kemauan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana kebersihan tersebut. Dengan kata lain disiplin ke arah terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat masih perlu ditingkatkan lagi.

ini memanfaatkan hari-hari yang dilaluinya dengan mencari nafkah. Pada siang hari tidak banyak orang-orang dewasa berada di rumah mereka, mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing, yang berada di rumah pada umumnya adalah para ibu dengan anak-anak yang belum sekolah. Mereka pun sibuk dengan segala urusan rumah tangga sendiri mulai dari menyiapkan makanan, mencuci pakaian, mencuci piring sampai mengasuh anak-anak karena pada umumnya mereka tidak mempunyai pembantu rumah tangga. Jadi segala pekerjaan rumah tangga harus ditangani sendiri.

Interaksi antar anggota rumah tangga terjadi secara leluasa pada malam hari, itupun tidak berlangsung terlalu lama karena malam hari adalah waktu untuk istirahat setelah seharian bekerja membanting tulang. Hubungan antar warga pun menjadi tidak begitu akrab, masing-masing keluarga mempunyai kesibukan, tetapi untuk kegiatan sosial seperti kerja bakti, arisan, posyandu yang diadakan pada waktu-waktu tertentu atas persetujuan warga yang bersangkutan, mereka berusaha untuk bisa menghadirinya

Di bagian atas telah disebutkan bahwa penduduk kelurahan Senen terdiri dari warga negara asing dan warga negara Indonesia asli. Penduduk kelurahan Senen yang berjumlah 2.423 KK, terdiri atas 2.786 laki-laki WNI dan 4.287 perempuan WNI serta 237 laki-laki WNA dan 160 perempuan WNA. Jadi penduduk di kelurahan Senen didominasi oleh warga negara Indonesia, walaupun tidak disebutkan WNI asli atau keturunan.

Apabila dilihat berdasarkan agama yang dipeluk, maka agama Islam mempunyai pengikut yang paling banyak yaitu 4.974 orang, kemudian agama Protestan dengan jumlah pemeluk 852 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II.4
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA
DI KELURAHAN SENEN

No.	Agama	Jumlah Pemeluk
1.	Islam	4.974 orang
2.	Protestan	852 orang
3.	Katolik	810 orang
4.	Hindu/Budha	834 orang
Jumlah		7.470 orang

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Tahun 1991/1992

Jumlah prasarana ibadah yang tersedia paling banyak adalah prasarana ibadah agama Islam yaitu 9 buah mesjid/langgar. Untuk agama Hindu/Budha 1 buah.

Selanjutnya akan dilihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Dari jumlah penduduk yang ada di kelurahan Senen, ternyata mayoritas berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, kemudian disusul tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan lulusan Sekolah Dasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL II.5
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	721 orang
2.	Tidak Tamat Sekolah	17 orang
3.	Tamat SD/Sederajat	1.031 orang
4.	Tamat SLTP/Sederajat	1.992 orang
5.	Tamat SLTA/Sederajat	3.655 orang
6.	Tamat PT/Akademi	206 orang
7.	Buta huruf	14 orang
Jumlah		7.636 orang

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Tahun 1991/1992

2.3 Berbagai Permasalahan Kota

Jakarta kini telah berkembang, melaju dengan pesat sebagai kota metropolitan yang tumbuh menyamai kota-kota besar di dunia. Di samping itu, Jakarta adalah pintu gerbang Indonesia, tumbuh dan berkembang sebagai kota pusat pemerintahan, perdagangan kota Jakarta yang demikian ini menjadi salah satu sebab pesatnya pertambahan penduduk. Segala macam fasilitas kehidupan tersedia di Jakarta. Oleh karena banyak pendatang dari daerah yang berurbanisasi ke Jakarta. Mereka mengadu nasib, saling berebut keberuntungan, memimpikan segala fasilitas kehidupan yang serba lengkap yang tidak tersedia di daerah asal mereka.

Para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia itu ada bermacam-macam baik dari segi adat-istiadat dan budaya maupun kemampuannya. Mereka ada yang bermodalkan pendidikan tinggi dengan segala macam ketrampilan dan kemampuan, berpendidikan menengah dengan ketrampilan apa adanya dan para buta huruf yang hanya mengandalkan tenaga saja. Jakarta memang penuh pesona dan cahaya yang bisa dijadikan tumpuan harapan bagi mereka yang belum pernah tahu akan kehidupan metropolitan ini.

Tidak bisa dipungkiri memang, dari sekian banyak para pendatang tersebut yang berhasil menundukkan Jakarta dan taraf hidupnya pun membaik. Tetapi sebaliknya, tidak sedikit pula yang gagal bahkan benar-benar terperosok ke dalam kehidupan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di antara mereka ini ada yang kemudian menjadi gelandangan, tuna wisma dan tuna karya. Bahkan tidak jarang pula yang akhirnya menjadi para penjahat, yang keberadaannya sangat meresahkan warga masyarakat.

Untuk hal yang disebutkan terakhir ini, perlu penanganan yang serius dari para aparat pemerintah, khususnya aparat kepolisian yang berwenang menjaga ketertiban umum. Tentu saja pihak kepolisian juga telah mengambil langkah yang benar dan tepat untuk mengantisipasi timbulnya kerawanan-kerawanan dan kejahatan di ibukota negara ini.

Kelurahan Senen termasuk dalam wilayah hukum Sektor Metropolitan Senen. Sektor Metropolitan Senen meliputi wilayah kelurahan Senen, Kwitang, Kenari, Paseban, Bungur, dan Kramat

Menurut data dari laporan polisi Sektor Metropolitan Senen, daerah-daerah yang dianggap rawan adalah terminal Senen, Pusat pertokoan/pasar Senen, gelanggang remaja/Jl. Kramat Bunder, stasiun Kereta Api, Jl. Pasar Senen, Jl. Senen Raya (depan Kimia Farma). Faktor-faktor korelatif yang menyebabkan timbulnya kriminalitas adalah :

1. Yang berhubungan dengan aspek geografi
 - panjang jalan tidak seimbang
 - arus lalu lintas padat
 - jalur angkutan umum

2. Yang berkenaan dengan sosial, ekonomi dan budaya

- daya beli masyarakat lemah
- urbanisasi
- gelandangan

3. Yang berhubungan dengan demografi

- penduduk padat
- penduduk usia muda lebih dominan

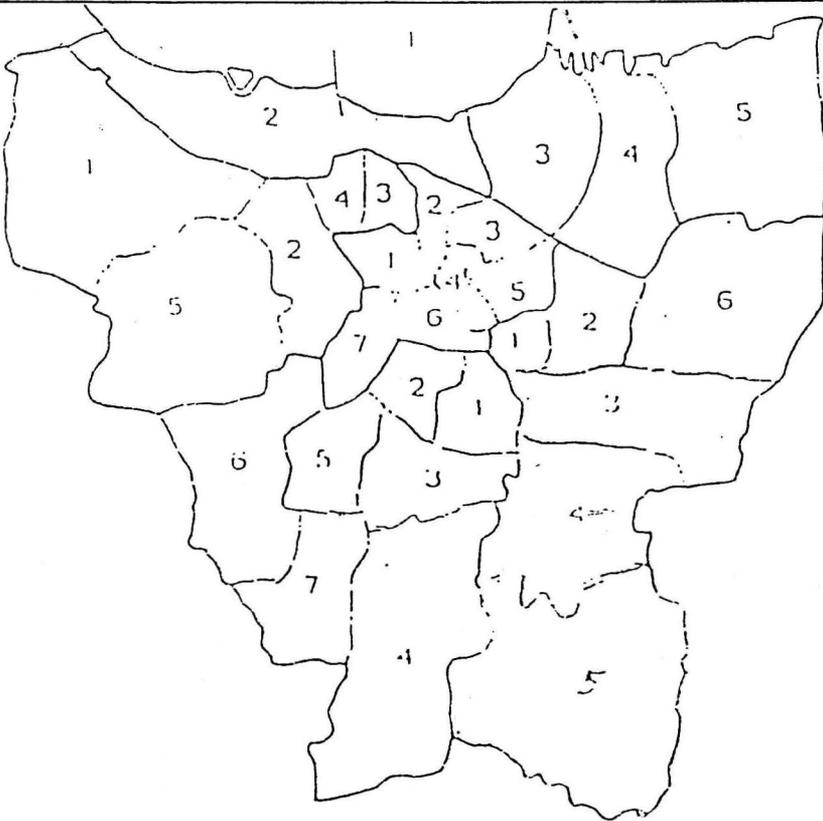
Di samping masalah kriminalitas yang tinggi di Jakarta, ada masalah lain pula yang menjadi ciri utama kota besar. Dari masalah jumlah penduduk misalnya, selain dapat menimbulkan kriminalitas juga menyebabkan terbatasnya lahan pemukiman sehingga di tempat-tempat yang seharusnya tidak untuk ditinggali terpaksa disulap menjadi lingkungan pemukiman. Tempat-tempat seperti itu misalnya adalah daerah pinggiran sungai, taman-taman atau daerah jalur hijau lainnya. Akibatnya timbul lingkungan kumuh yang tidak layak huni. Masalah ini cukup merepotkan untuk ditangani, karena dibenahi di sini akan timbul lagi di daerah lain, begitu seterusnya.

Masalah lain yang timbul adalah berkenaan dengan masalah ekonomi. Bagi mereka yang berkemampuan dan berketrampilan tentu saja masalah ekonomi bukan beban bagi mereka, sebaliknya bagi yang tidak punya latar belakang ketrampilan dan kemampuan masalah ekonomi benar-benar membuat pusing kepala.

Satu hal lain yang tidak kalah penting adalah masalah rendahnya disiplin warga kota. Heterogenitas penduduk kota Jakarta turut pula mempengaruhi tingkat kedisiplinan warga yang bersangkutan. Masalah disiplin bisa menyangkut disiplin bermasyarakat, disiplin berlalu-lintas, disiplin di tempat-tempat umum dan lainlainya.

Pada bab-bab selanjutnya masalah disiplin ini akan dikupas secara panjang lebar, terutama disiplin warga kota Jakarta di bidang lalu lintas, dan disiplin di tempat-tempat umum.

PETA WILAYAH DKI JAKARTA



JAKARTA PUSAT

1. Kecamatan Gambir
2. Kecamatan Sawah Besar
3. Kecamatan Kemayoran
4. Kecamatan Senen
5. Kecamatan Cempaka Putih
6. Kecamatan Menteng
7. Kecamatan Tanah Abang

JAKARTA UTARA

1. Kecamatan Pulau Scribu
2. Kecamatan Penjaringan
3. Kecamatan Tanjung priok
4. Kecamatan Koja
5. Kecamatan Cilincing

Jakarta Barat

1. Kecamatan Cengkareng
2. Kecamatan Grogol Pertamburan
3. Kecamatan Taman Sari
4. Kecamatan Tambora
5. Kecamatan kebon Jeruk

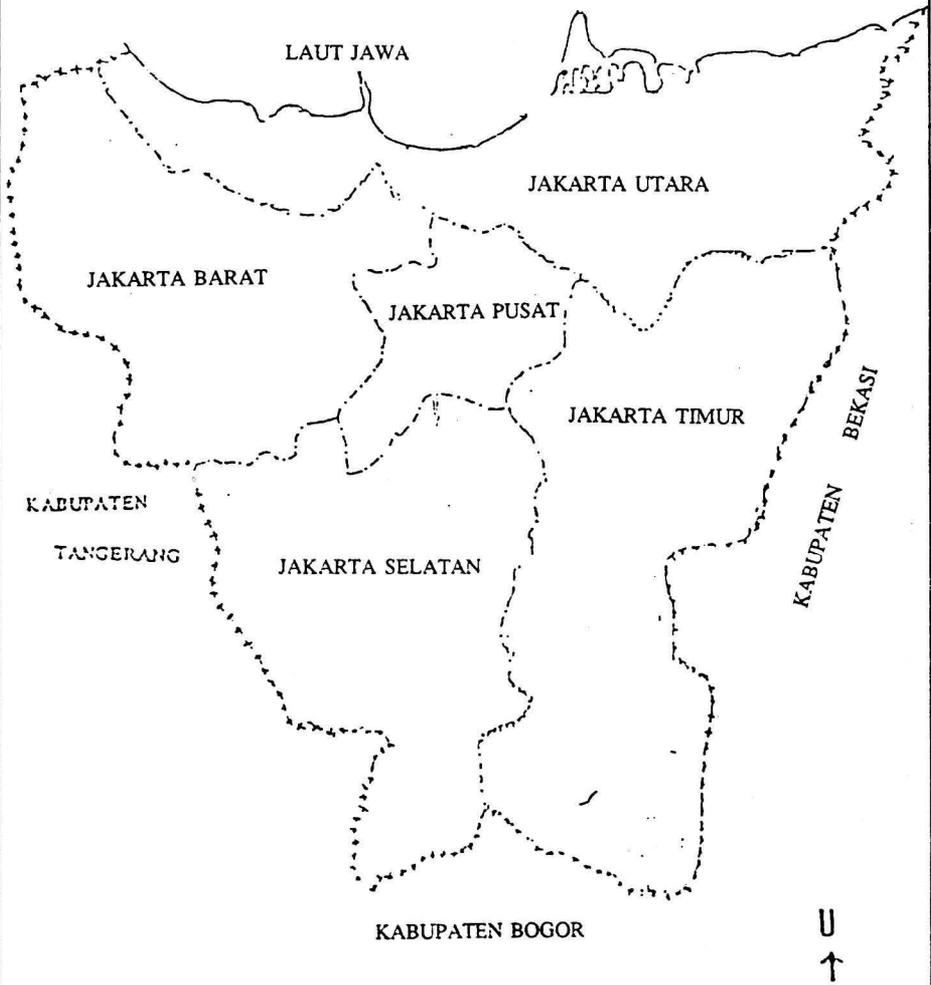
Jakarta Selatan

1. Kecamatan Tebet
2. Kecamatan Setia Budi
3. Kecamatan Mampang Prapatan
4. Kecamatan Pasar Minggu
5. Kecamatan Kebayoran Baru
6. Kecamatan Kebayoran Lama
7. Kecamatan Cilandak

JAKARTA TIMUR

1. Kecamatan Matraman
2. Kecamatan Pulo Gadung
3. Kecamatan Jati Negara
4. Kecamatan Kramat Jati
5. Kecamatan Pasar Rebo
6. Kecamatan Cakung

PETA WILAYAH DKI JAKARTA

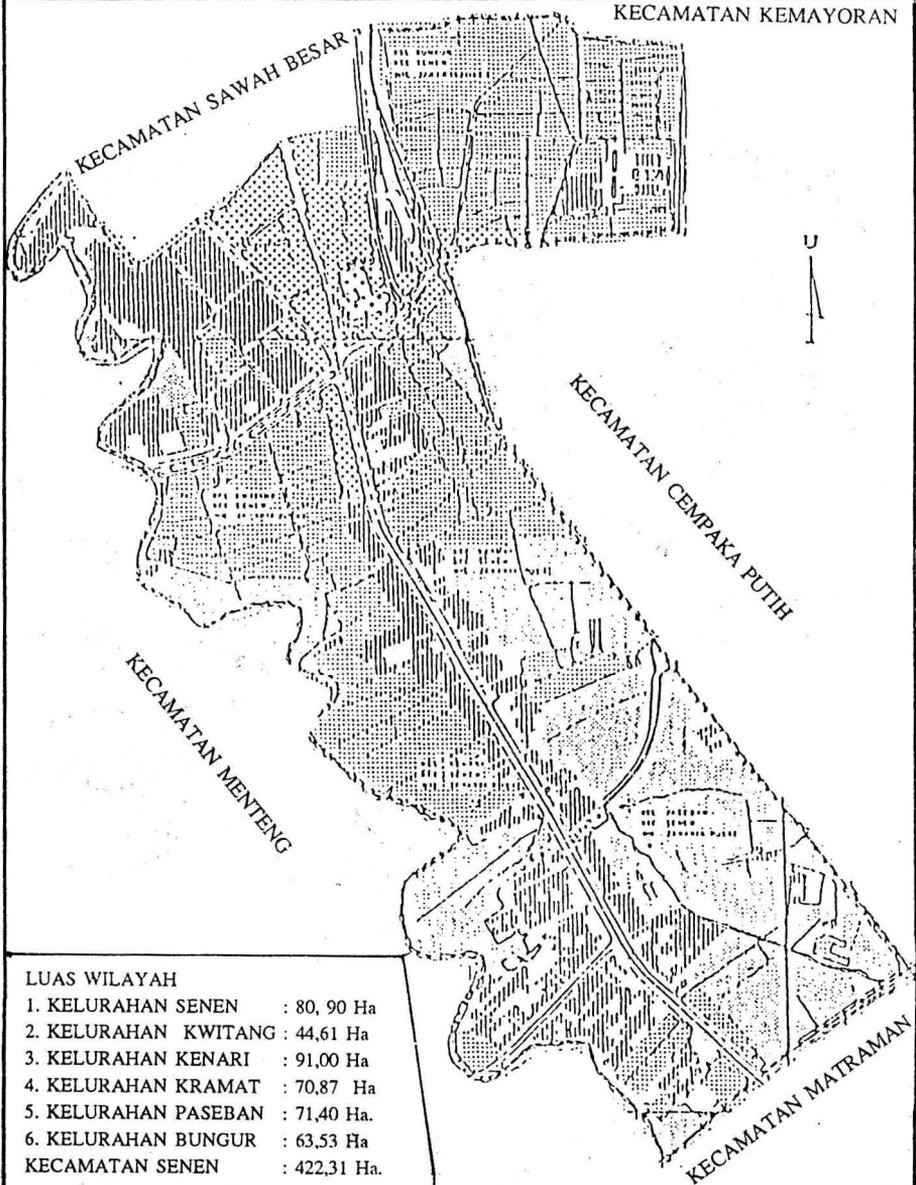


KETERANGAN GAMBAR :

- ++++ Batas Propinsi
- - - Batas Walikota



PETA WILAYAH KECAMATAN SENEN

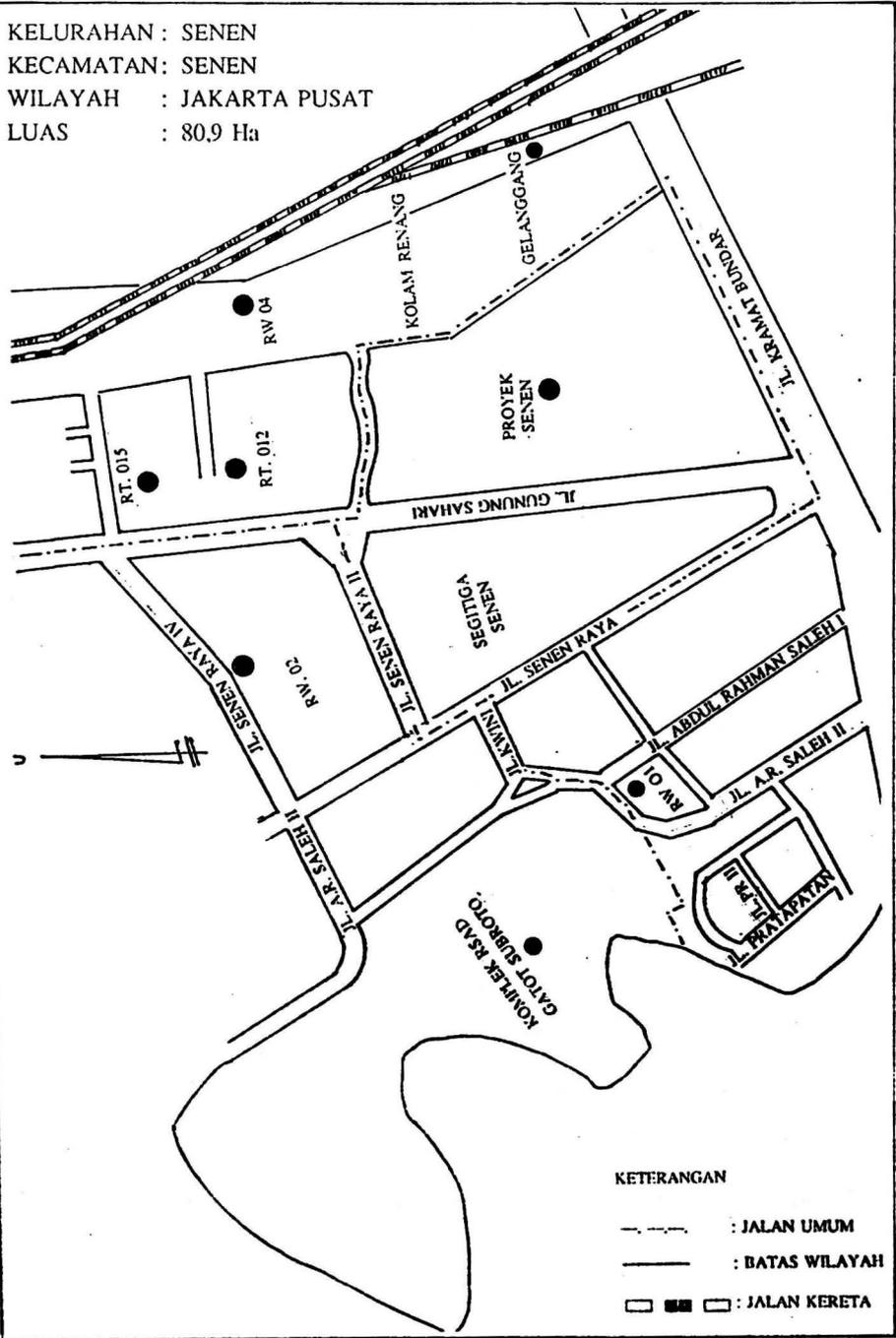


LUAS WILAYAH

1. KELURAHAN SENEN	: 80,90 Ha
2. KELURAHAN KWITANG	: 44,61 Ha
3. KELURAHAN KENARI	: 91,00 Ha
4. KELURAHAN KRAMAT	: 70,87 Ha
5. KELURAHAN PASEBAN	: 71,40 Ha
6. KELURAHAN BUNGUR	: 63,53 Ha
KECAMATAN SENEN	: 422,31 Ha.

IK. GUS. KPPI JAKARTA NO. 1251 TH. 1986.

KELURAHAN : SENEN
KECAMATAN : SENEN
WILAYAH : JAKARTA PUSAT
LUAS : 80,9 Ha



KETERANGAN

- : JALAN UMUM
- : BATAS WILAYAH
- ▬ ▬ : JALAN KERETA

BAB III

**DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMUKIMAN
KELURAHAN SENEN**

Lingkungan pemukiman yang bersih dan terpelihara merupakan harapan seluruh warga masyarakat di DKI Jakarta. Setiap warga menginginkan dapat hidup sehat serta nyaman bagi diri dan keluarganya, sehingga mereka bisa terus beraktivitas dalam hidup kesehariannya. Lingkungan yang bersih dan terpelihara baru dapat terwujud jika ada kesadaran akan disiplin dalam diri setiap warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kebersihan serta kenyamanan lingkungan pemukiman mereka.

Berbicara mengenai disiplin, kita harus melihat dan mengetahui latar belakang budaya masing-masing individu mengenai penerapan disiplin dalam keluarga. Hal ini disebabkan penerapan disiplin yang paling awal berasal dari dalam lingkungan keluarga batin dalam rangka sosialisasi seorang individu. Salah satu unsur dalam sosialisasi adalah pengenalan disiplin dalam segala aktivitas kehidupan, termasuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.

Disiplin merupakan suatu sikap yang menunjukkan kesediaan untuk menepati atau mematuhi dan mendukung ketentuan, tata tertib, peraturan, nilai, serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Disiplin bukanlah sesuatu yang dibawa sejak seorang individu dilahirkan, namun perkembangannya dalam diri seorang individu sangat dipengaruhi oleh faktor "ajar" atau pendidikan. Dengan demikian disiplin selalu berkaitan dengan sikap, yaitu bereaksi atau bertindak terhadap suatu obyek atau keadaan tertentu. Sikap (sering juga disebut sikap mental) inilah yang menjadikan manusia dapat membedakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta melakukan pengendalian sosial terhadap dirinya sendiri.

Manusia memiliki berbagai keinginan untuk mendapat kepuasan, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua keinginan dapat terpenuhi. Oleh karena keinginan manusia itu beraneka ragam, maka perlu adanya peraturan, tata-tertib, nilai atau norma yang harus dipatuhi. Agar dapat memenuhi atau menahan keinginan tersebut, individu yang bersangkutan harus dapat menahan dan menguasai diri untuk tunduk pada peraturan dan patuh pada nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Untuk itulah diperlukan pengembangan disiplin dalam diri setiap individu, karena disiplin berkaitan erat dengan penguasaan diri dan tanggung jawab. Orang yang disiplin cenderung patuh, mendukung serta mempertahankan tegaknya peraturan dan nilai yang berlaku. Sikap ini menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap ketertiban lingkungannya.

Seperti yang telah disebutkan, proses penanaman disiplin harus dimulai sejak masa anak-anak, yang dilakukan orangtua atau kerabat lain dengan cara memberi pengertian, pemahaman, membangkitkan kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk mematuhi serta mendukung aturan-aturan yang berlaku. Dengan demikian, walaupun tidak ada yang mengawasi atau mengancam dengan sanksi, individu yang bersangkutan akan tetap mematuhi peraturan tersebut. Ada kecenderungan bahwa individu seperti itu akan tersinggung harga dirinya jika dinilai orang lain kurang disiplin, sehingga dapat dikatakan bahwa disiplin berkaitan juga dengan harga diri.

Ada sementara keluarga yang menanamkan dan menerapkan disiplin secara ketat, keras dan kaku disertai sanksi yang berat, akan tetapi ada juga keluarga-keluarga yang menjalankannya secara longgar dan lues tanpa sanksi yang memberatkan serta mengikat. Menanamkan disiplin secara paksa, penuh ancaman dan hukuman dapat menimbulkan "disiplin semu", yaitu sikap seolah-olah selalu patuh pada perintah dan peraturan, akan tetapi karena tidak disertai kesediaan dan kesadaran untuk mematuhi perintah dan peraturan tersebut, akan menurun pada saat pengawasan dan sanksi ditiadakan. Jadi dalam hal ini seseorang yang memiliki disiplin semu hanya patuh pada perintah dan peraturan jika ada yang mengawasi.

Inti pokok dalam penanaman disiplin adalah menanamkan pengertian, pemahaman, kesadaran, serta tanggung jawab baik pada diri sendiri maupun pada masyarakat. Dengan demikian seseorang yang memiliki disiplin, dalam perkembangannya diharapkan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Jakarta yang ditetapkan sebagai kota “metropolitan” merupakan daerah “melting-pot”, yaitu tempat bertemunya berbagai suku bangsa dengan berbagai latar belakang kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda. Demikian pula Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi, sehingga tidak mengherankan jika banyak penduduk pendatang dari berbagai daerah lain di Indonesia yang memilih Jakarta sebagai kota tujuan mereka untuk bermukim, baik hanya sementara maupun untuk jangka waktu yang lama. Mereka datang ke Jakarta dengan membawa kebiasaan atau tradisi dari daerah asal, yang sebagian besar masih diterapkan di Jakarta.

Aturan-aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di daerah perkotaan, terutama di kota besar seperti Jakarta, sangat berbeda dengan yang ada di daerah-daerah asal para pendatang. Apalagi bagi mereka yang berasal dari daerah pedesaan atau dusun terpencil, di mana jarang timbul permasalahan sosial, masyarakatnya terkondisi kurang terikat oleh peraturan atau kaidah-kaidah sosial yang berlaku, sehingga bagi mereka cukup sulit untuk dapat mengadaptasikan diri dan menerima peraturan serta kaidah-kaidah sosial yang berlaku di daerah perkotaan. Sebagai contoh, di Jakarta telah dicanangkan “Prokasih” (Program Kali Bersih) oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan mencegah masyarakat membuang sampah atau limbah ke sungai/kali karena bisa menyebabkan banjir di musim hujan. Sebaliknya orang-orang desa terbiasa membuang sampah di sungai yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Sebagian besar di antara mereka cenderung membawa kebiasaan ini ke kota-kota tujuan mereka. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab semakin besarnya permasalahan yang timbul di kota-kota besar, terutama mengenai pencemaran atau pengrusakan lingkungan, yang bermula dari kurangnya atau ketiadaan disiplin para warga masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, bukan berarti bahwa para pendatanglah sebagai penyebab utama pencemaran lingkungan di ibukota. Yang juga perlu mendapat perhatian adalah sikap mental para warga masyarakat yang sudah lama menetap di Jakarta. Kesadaran mereka akan disiplin tampaknya belum bisa dijadikan contoh yang baik bagi para pendatang, dalam arti mereka sendiri belum dapat menjalankan disiplin terhadap peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah sosial yang diberlakukan. Pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan umum belum dapat dilaksanakan semaksimal mungkin dalam rangka menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, terutama lingkungan pemukiman.

Dalam suatu lingkungan pemukiman ada banyak hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, misalnya limbah keluarga (sampah), bangunan fisik rumah-rumah tinggal, sarana dan prasarana yang ada, dan lain-lain. Agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat, diperlukan kesadaran dan disiplin dari setiap warga masyarakat bagaimana mereka dapat secara bersama-sama menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pemukiman yang menjadi kewajiban setiap warga masyarakat.

3.1. Disiplin Dalam Penanganan Limbah Keluarga/Sampah

Dalam lingkungan pemukiman yang dipilih sebagai daerah penelitian, yaitu lingkungan RW 04 terdapat beberapa jalan kecil (gang) yang dikeraskan dengan semen. Jalan itu merupakan salah satu prasarana yang dibuat dalam rangka proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT). Ukuran jalan itu tidak begitu lebar, hanya dapat dilalui pejalan kaki atau kendaraan sepeda motor. Jalan-jalan tersebut merupakan jalan penghubung untuk menuju rumah-rumah yang berada dalam lingkungan satu Rukun Warga (RW).

Di samping jalan penghubung tersebut, dalam suatu lingkungan Rukun Tetangga (RT) terdapat jalan-jalan kecil lainnya yang tidak diaspal atau disemen. Jalan ini juga merupakan penghubung antara rumah-rumah warga setempat. Sepintas lalu sulit untuk mengenali jalan-jalan kecil ini, karena tak ubahnya merupakan sebidang tanah kosong yang memisahkan satu rumah dengan rumah lainnya. Demikian pula jalan-jalan ini terletak di antara atau dihindari oleh rumah-rumah yang mengelompok padat. Oleh sebab itu seringkali jalan-jalan kecil ini dihalangi ataupun terhalang oleh jendela-jendela rumah yang kebetulan dibuka oleh pemilik rumah dan tiang jemuran pakaian yang dibuat secara serampangan. Dengan demikian apabila kita melintasi jalan tersebut harus berhati-hati agar kepala jangan sampai terbentur jendela yang malang-melintang atau terkena tetapan air dari pakaian-pakaian yang dijemur. Melalui jalan ini kita dengan mudah dapat melihat isi kamar-kamar atau ruangan-ruangan lain dari rumah yang sedang kita lewati. Bahkan tidak jarang kita sebenarnya sedang melewati sebuah dapur atau tempat mencuci keluarga pemilik rumah, karena batas-batas ruangan dalam suatu rumah tidak jelas. Ada dapur atau tempat mandi dan cuci yang dibuat persis di tepi jalan kecil tersebut, sehingga sering terlihat orang yang sedang memasak atau mandi jika kita melalui jalan itu.

Keadaan lingkungan yang sedemikian itu menyebabkan wilayah pemukiman tersebut tampak kumuh dan kotor. Rumah-rumah pendudukpun banyak yang kurang memenuhi syarat kesehatan, dengan kondisi rumah yang cukup memperhatikan. Penduduk yang hampir seluruhnya berpendidikan relatif rendah dan memiliki matapecaharian sebagai pedagang kecil atau buruh, kurang memiliki pengetahuan mengenai rumah dan lingkungan yang sehat. Hal ini juga ditunjang dengan taraf ekonomi mereka yang rendah, sehingga mereka tidak memiliki cukup biaya untuk memperbaiki kondisi rumah mereka.

Lingkungan di sekitar rumah penduduk tampak di sana-sini terdapat sampah yang berserakan; seperti plastik, kulit pisang, kulit jeruk, daun serta kertas bekas pembungkus, puntung rokok, dan sebagainya. Tempat-tempat sampah yang tersedia, baik yang merupakan bantuan pemerintah maupun yang dibuat sendiri oleh para warga, tampaknya kurang dimanfaatkan oleh warga setempat. Dengan kondisi rumah-rumah tempat tinggal penduduk yang dibangun saling berhimpitan tidak memungkinkan dibuat tempat-tempat sampah pada setiap rumah. Kalaupun ada tempat pembuangan sampah, itupun kurang memadai untuk menampung sampah dari 45 kepala keluarga yang bermukim di wilayah ini.

Keadaan seperti itu yang menyebabkan warga setempat merasa malas membuang sampah atau limbah rumah tangga pada tempat-tempat yang telah ditentukan, apalagi kalau tempat pembuangan sampah itu jauh dari rumah. Hanya warga yang bertempat tinggal dekat dengan tempat pembuangan sampah yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Sedangkan warga yang rumahnya jauh dari tempat pembuangan sampah terbiasa mengumpulkan sampah yang berasal dari rumah masing-masing dengan cara memasukannya ke dalam kantung plastik, keranjang rotan atau bekas karung beras, kemudian diletakkan di depan rumah yang mudah terlihat oleh petugas-petugas pengangkut sampah. Setiap pagi ada petugas pengangkut sampah yang berjalan keliling tempat-tempat pemukiman penduduk untuk mengangkut sampah-sampah rumah tangga dengan gerobak sampah bantuan dari Dinas Kebersihan. Sampah yang telah terkumpul tersebut dibawa ke daerah kebon Bayem atau Bungur Besar untuk dijadikan satu dengan sampah dari wilayah-wilayah lain, kemudian diangkut dengan truk sampah ke tempat pembuangan sampah di luar kota. Dengan demikian sampah tidak dibiarkan menumpuk di daerah-daerah pemukiman.

Tampaknya pengaturan sistem pembuangan sampah rumah tangga yang dijalankan sudah cukup baik, dalam arti petugas-petugas kebersihan sudah berdisiplin menjalankan pekerjaan mereka untuk dapat mengurangi kekotoran atau kekumuhan suatu wilayah pemukiman. Apalagi jika keadaan ini ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga target yang akan dicapai dalam rangka membersihkan daerah pemukiman dari sampah dapat tercapai. Akan tetapi kenyataan yang ada sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Sebagai contoh, gerobak-gerobak pengangkut sampah yang ada jumlahnya kurang memadai, karena sebuah gerobak dimanfaatkan untuk mengangkut sampah pada tiga lingkungan RT. Sudah barang tentu gerobak sampah tidak dapat mengangkut sampah pada ketiga lingkungan pemukiman tersebut sekaligus setiap harinya, karena kapasitas gerobak itu sendiri sangat terbatas. Belum lagi jumlah petugas pengangkut sampah yang bertugas di sana tidak terlalu banyak dengan upah yang diterima relatif rendah. Oleh sebab itu seringkali ada beberapa sampah yang tidak terangkut atau jatuh tercecer dari atas gerobak yang sarat dengan muatan sampah, dan sampah-sampah itulah yang mengotori jalan di sepanjang daerah pemukiman yang dilalui.

Di samping sampah tercecer yang menyebabkan kotornya lingkungan, sampah-sampah yang terkumpul di depan rumah pendudukpun juga dapat menambah kotornya lingkungan. Tidak jarang binatang-binatang piaraan, seperti ayam, anjing atau kucing mengais tempat-tempat sampah yang ada sehingga sampah yang sudah terkumpul menjadi berserakan. Demikian pula tikus-tikus yang mencari makan pada malam hari merobek-robek tas plastik, keranjang atau karung tempat mengumpulkan sampah, sehingga pada pagi harinya sampah diketemukan sudah berserakan. Sampah rumah tangga itu mengotori jalan-jalan atau menyumbat saluran air (got) di depan rumah penduduk, yang mengakibatkan lingkungan pemukiman tersebut tampak kotor dan mengeluarkan bau yang tidak enak.

Pada dasarnya penduduk setempat menginginkan rumah-rumah mereka selalu dalam keadaan bersih. Hal ini dapat diketahui dengan terlihatnya para ibu rumah tangga atau anak-anak mereka menyapu rumah dan sekitarnya setiap hari. Kemudian mereka mengumpulkan kotoran ke dalam tas plastik atau karung dan diletakkan di depan rumah untuk diangkut oleh petugas kebersihan. Dalam hal ini dapat dikatakan mereka memiliki tanggung jawab dan disiplin dalam menjaga kebersihan rumah tempat tinggal mereka.

Meskipun demikian para ibu rumah tangga tersebut belum dapat sepenuhnya berdisiplin menjaga kebersihan rumah mereka. Hal ini dapat dilihat pada saat mereka sedang mencuci pakaian atau peralatan rumah tangga di sumur. Sisa-sisa makanan tidak dikumpulkan dalam suatu tempat, sehingga tercecer bahkan mengikuti aliran air dan masuk ke got dan menyumbatnya. Pada umumnya rumah-rumah di lokasi penelitian tidak memiliki kamar mandi dan kakus, sehingga untuk keperluan mencuci dan mandi warga setempat memanfaatkan pompa atau sumur yang dibuat secara bergotong-royong. Banyaknya sumur dan pompa yang tersedia pun kurang memadai untuk dimanfaatkan seluruh keluarga yang ada. di samping itu saluran air yang dibuat juga tidak dapat menampung limbah rumah tangga, sehingga air acapkali meluap dan membuat tanah di sekitar rumah penduduk menjadi becek. Apalagi jika turun hujan lebat, air akan meluap dan menggenangi rumah-rumah penduduk. Kondisi geografis lingkungan setempat yang cekung dan lebih rendah dari daerah-daerah sekitarnya mengakibatkan air hujan tidak dapat mengalir, tetapi menggenangi pada beberapa tempat. Akibat yang ditimbulkan tanah di sekitar tempat pemukiman menjadi lembab. Kelembaban ini sulit diatasi karena letak rumah yang satu dengan yang lain nyaris tidak ada jarak sama sekali, sehingga panas matahari tidak dapat mengeringkan tanah. Demikian pula keadaan di dalam rumah juga terasa lembab, karena pada sebagian besar rumah penduduk tidak dibuat jendela atau genteng kaca agar sinar matahari dapat menembus masuk dan ada sirkulasi udara di dalam rumah.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tampaknya para warga setempat memiliki cukup kedisiplinan dalam menjaga kebersihan rumah tinggal mereka sendiri. Hal ini dapat disebabkan adanya sistem pengawasan yang cukup ketat di antara sesama anggota keluarga. Sebagai contoh, jika seorang anak mengotori rumahnya dia akan mendapat teguran dari orangtua atau saudara-saudaranya agar tidak mengotori rumah. Dan sebagai konsekuensi atau sanksinya, dia diharuskan menyapu rumah sampai bersih dan mengumpulkan sampahnya walaupun di dalam rumah itu sendiri tidak tersedia tempat sampah. Dengan demikian anak dilatih untuk bertanggung jawab dan memiliki disiplin menjaga kebersihan tempat tinggalnya.

Disiplin dalam rumah tampaknya sudah dijalankan oleh para warga, walaupun belum sepenuhnya dan menyeluruh. Akan tetapi apabila mereka berada di luar lingkungan rumah sendiri, tampaknya kesadaran akan disiplin

yang dimiliki cenderung memudar, bahkan dapat hilang sama sekali. Dalam hal membuang sampah, ada kecenderungan banyak di antara warga di daerah penelitian yang tidak mengindahkan tempat-tempat sampah yang tersedia, baik di lingkungan pemukiman maupun di tempat-tempat umum (terminal, pasar, gedung bioskop, dan lain-lain). Mereka cenderung meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin mereka lakukan di dalam rumah sendiri. Sering terlihat anak-anak yang membuang bekas bungkus permen dan makanan lain, atau orang-orang dewasa membuang bungkus dan puntung rokok atau kertas pembungkus secara sembarangan di jalan-jalan, got, atau tempat-tempat lain. Mereka tidak mau harus bersusah-payah mengumpulkan sampah-sampah itu, terlebih dahulu, kemudian harus berjalan ke tempat sampah yang bisa saja jaraknya cukup jauh dari tempat mereka berada.

Pada umumnya manusia cenderung memilih segala sesuatu yang mudah dilakukan dalam setiap tindakannya, dalam arti tidak mau bertindak yang menyulitkan selama hal-hal yang mudah masih bisa dilakukan. Demikian pula halnya dengan membuang sampah, mereka cenderung membuang sampah di tempat mereka berada atau tempat-tempat yang dekat dengan tempat mereka berada saat itu. Mereka tidak mau berjalan beberapa langkah saja menuju ke tempat sampah yang terdekat, karena mereka merasa malas harus melangkah kesana, merasa tidak enak harus menyimpan sampah itu sebelum dibuang ke tempat sampah, mereka sedang dalam keadaan tergesa-gesa sehingga akan memakan waktu jika harus berjalan ke tempat sampah, atau alasan-alasan lainnya lagi. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila di sepanjang jalan banyak bertebaran sampah dari berbagai jenis, seperti kertas pembungkus, puntung rokok, botol plastik bekas tempat minuman, kulit buah-buahan, makanan yang terjatuh, dan lain-lain.

Ada di antara warga pendatang yang memiliki kebiasaan membuang sampah bukan pada tempatnya. Dari wawancara mendalam kebiasaan ini mereka lakukan di daerah asal mereka. Kemungkinan di daerah asal mereka tidak mengenal disiplin dalam membuang sampah, karena fasilitas tempat sampah tidak tersedia. Selain itu ada suatu kebiasaan di desa, yaitu penduduk sengaja membuang sampah di pekarangan atau kebun dengan membuat lobang lebih kurang sedalam 1m2. Dalam waktu tertentu sampah itu akan membusuk dan menjadi humus yang dapat menyuburkan tanah. Dengan adanya kebiasaan-kebiasaan ini menjadikan mereka kurang mengindahkan arti kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kebiasaan itu pula yang mereka bawa ke dalam

lingkungan pemukiman mereka yang baru, dan mereka sendiri merasa sulit untuk menghilangkan kebiasaan tersebut dengan menyesuaikan diri terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan mereka yang baru. Tindakan mereka menambah semakin kotornya lingkungan yang bersangkutan.

Keadaan seperti itu yang terlihat di lokasi penelitian setiap harinya. Kebersihan jalan dan lingkungan di daerah tersebut dirasa kurang mendapat perhatian dari para warganya, terbukti dengan banyaknya sampah yang berserakan. Menurut keterangan Ketua Rukun Warga (RW) setempat, para warga dalam wilayahnya sulit sekali diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Bila diberi penyuluhan atau nasehat agar dapat menjaga kebersihan lingkungan pemukiman, mereka cenderung kurang menjalannya dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai alasan. Kecuali jika mendapat teguran yang cukup keras atau akan dikenakan suatu sanksi administratif, seperti pengurusan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dipersulit, harus membayar denda berupa uang atau bahan bangunan, dan sebagainya, baru mereka mau menjalankan anjuran Ketua RT setempat.

Mengenai tempat pembuangan limbah, baik yang berasal dari rumah tangga maupun tempat-tempat usaha, di lokasi penelitian terdapat hanya sedikit saluran air tempat membuang limbah yang tersedia. Saluran-saluran air (got) yang dibuat kurang memadai untuk menampung limbah dari semua rumah yang ada di lokasi tersebut, sehingga tidak jarang air akan melimpah pada musim hujan atau mengeluarkan bau busuk pada musim kemarau. Kurangnya saluran air yang dibuat menyebabkan seringkali warga setempat membuang limbah tidak pada tempatnya, tetapi bekas air cucian dibuang di sekitar sumur atau di belakang rumah. Bahkan ada warga yang mencuci pakaian atau peralatan rumah tangga di depan rumah, dan membuang bekas air cucian di tempat itu juga. Perlakuan mereka itu mengakibatkan tanah di sekitar tempat tinggal mereka menjadi lembab dan becek.

Hal lain yang menambah kotornya lingkungan setempat adalah berdirinya lima (5) perusahaan pemotongan ayam di lokasi penelitian. Perusahaan tersebut berbentuk industri rumah tangga (home industry), yang berfungsi sekaligus sebagai rumah tinggal pemiliknya. Di depan perusahaan itu khususnya wilayah Rukun Tetangga (RT) 015, dibuat saluran air untuk menampung seluruh limbah dari tempat usaha itu dan rumah-rumah di sekitarnya. Setiap harinya tempat usaha itu membuang limbah yang berupa

lemak, tulang dan bulu-bulu ayam ke dalam saluran air yang ada di dekat tempat itu. Walaupun tempat usaha tersebut menyediakan tempat sampah, akan tetapi para pekerjanya tetap membuang sisa-sisa potongan ayam ke saluran air. Hal ini menyebabkan saluran air menjadi tersumbat oleh sisa-sisa pemotongan ayam. Dengan sendirinya air bekas cucian yang dibuang ke dalam saluran air itu tidak dapat mengalir, bahkan tidak jarang meluap dan menggenangi daerah sekitarnya.

Tempat pemotongan ayam tersebut juga mengeluarkan bau yang tidak sedap, yang mencemari udara wilayah pemukiman di sekitarnya. Bau busuk juga keluar dari saluran air yang tersumbat, sehingga orang selalu menutup hidung setiap kali melewati tempat usaha itu. Kondisi seperti ini seringkali menimbulkan protes warga setempat, yang menyebabkan pihak yang berwenang menutup tempat usaha itu sebanyak dua kali. Akan tetapi, menurut keterangan salah seorang warga, karena pemilik tempat pemotongan ayam itu dapat memberi sejumlah uang dan membayar uang restribusi yang tinggi kepada pihak yang berwenang, maka tempat usaha tersebut mendapat ijin membuka kembali usahanya. Dampak yang dirasakan penduduk setempat dengan dibukanya kembali usaha itu adalah mereka kembali harus menghirup bau yang tidak enak serta genangan air yang meluap dari saluran air di tempat itu.

Kotornya wilayah pemukiman secara tidak langsung ternyata membawa dampak psikologis bagi para warganya. Warga setempat menjadi bersikap apatis atau tidak memperhatikan kebersihan lingkungan pemukiman mereka. Mereka merasa percuma saja membersihkan lingkungan setiap hari, karena pada akhirnya akan kotor lagi. Sampah yang mencemari lingkungan pemukiman yang bersangkutan berasal dari warga setempat atau yang bukan penduduk setempat. Demikian pula timbul kecenderungan warga setempat menggantungkan diri pada petugas-petugas pembersih sampah, yang menganggap sudah menjadi tugas mereka untuk membersihkan sampah setiap hari. Hal ini menyebabkan warga setempat kurang memiliki rasa tanggungjawab dan kesadaran untuk membersihkan lingkungan dari sampah atau limbah, dan dengan sendirinya disiplin yang dimiliki menjadi semakin menipis.

3.2 Disiplin Dalam Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Sosial

Dalam setiap lingkungan pemukiman, selalu berlangsung kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan seluruh warga di lingkungan pemukiman tersebut sebagai wujud dari interaksi atau kontak-kontak sosial di antara sesama warga. Kegiatan sosial yang dijalankan biasanya dimanifestasikan dalam bentuk kerjasama atau gotong-royong untuk kepentingan bersama. Di samping itu ada pula bentuk kebersamaan masyarakat yang berupa perkumpulan warga berdasarkan usia, perkumpulan olahraga, kegiatan ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam program PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga), atau kegiatan-kegiatan lain yang mencerminkan kebersamaan para warga dari suatu lingkungan pemukiman.

Setiap bentuk kegiatan sosial membutuhkan keikutsertaan semua warga agar dapat berlangsung sesuai dengan tujuannya. Demikian pula sebaliknya setiap warga masyarakat diwajibkan berperan serta secara aktif dalam setiap kegiatan sosial yang diadakan di lingkungan pemukimannya, walaupun tidak diberlakukan peraturan tertulis yang mengikat seluruh warga. Meskipun demikian seolah-olah ada suatu keterikatan sosial yang menyebabkan para warga harus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan. Di samping itu seolah-olah berlaku sanksi-sanksi sosial yang akan dikenakan terhadap warga yang tidak disiplin mengikuti kegiatan-kegiatan sosial tersebut, misalnya saja orang yang bersangkutan akan dicemooh/diejek, menjadi bahan pembicaraan orang lain, dikucilkan dari lingkungannya, dan sebagainya.

Ada banyak motivasi yang turut serta dalam berbagai kegiatan sosial yang diadakan, seperti ingin menjalin hubungan yang lebih akrab antara sesama warga, menghindarkan diri dari bahan omongan atau cemoohan orang lain jika tidak aktif mengikuti, dapat mengeluarkan bahan omongan atau gosip atas diri orang lain, dan sebagainya. Demikian pula ada beberapa warga yang secara sukarela mengikuti kegiatan-kegiatan sosial tersebut, sebaliknya ada sementara warga yang dengan sangat terpaksa berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial yang diadakan karena mereka merasa takut atau tidak mau terkena sanksi sosial dari masyarakat sekitarnya.

Beberapa bentuk kegiatan sosial yang secara rutin diselenggarakan di lokasi penelitian tergabung dalam perkumpulan-perkumpulan, seperti PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga), LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), serta perkumpulan pemuda (Karang taruna). Perkumpulan-

perkumpulan tersebut melibatkan seluruh warga yang bermukim dalam satu lingkungan RW, dan dikoordinasi oleh Ketua RW setempat. Untuk kegiatan PKK yang melibatkan kaum wanita, terdiri dari para ibu rumah tangga dan pemudi, dipimpin langsung oleh istri ketua RW. Di samping itu juga ada suatu perkumpulan yang bergerak di bidang keagamaan, seperti kelompok pengajian.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan sosial yang diselenggarakan dalam rangka program PKK terdiri dari kursus-kursus ketrampilan (menjahit, menggunting rambut, memasak, dan pertukangan bagi pemuda-pemuda putus sekolah), BKB (Bina Keluarga Balita), mendirikan Posyandu, serta menangani bantuan-bantuan dari Kanwil Departemen Sosial bagi pedagang-pedagang kecil yang banyak bermukim di lingkungan RT 015. Sedangkan LKMD mengadakan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan semua warga untuk kepentingan bersama, seperti mengadakan Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan), kerja bakti yang membutuhkan gotong royong, dan lain-lain. Perkumpulan kaum muda yang tergabung dalam karang taruna mengajak peran serta secara aktif para pemuda-pemudi dalam melakukan berbagai kegiatan yang sesuai dengan taraf usia mereka. Karang taruna setempat umumnya mengadakan kegiatan dalam bidang olahraga, kesenian serta sosial seperti mengadakan bakti sosial.

Semua bentuk perkumpulan yang ada membutuhkan peran serta seluruh warga dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial. Pada dasarnya segala aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan komunikasi dan hubungan sosial dengan sesamanya. Dengan demikian sebetulnya kegiatan-kegiatan sosial tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, karena di samping dapat memberi kesibukan atau pekerjaan bagi mereka yang tidak bekerja, juga dapat menambah ketrampilan, pengetahuan dan penghasilan kepada masyarakat, serta merupakan wahana pergaulan mudamudi yang positif.

Hampir seluruh warga di lingkungan RT 015 berpendidikan rendah atau putus sekolah. Hal ini disebabkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang diharuskan membantu orangtua mereka dalam mencari nafkah. Di samping itu ketiadaan biaya menyebabkan banyak anak yang putus sekolah. Dengan berbekal pendidikan yang relatif rendah, sangat sulit bagi mereka untuk mencari pekerjaan yang memadai. Oleh sebab itu mereka hanya dapat membantu pekerjaan orangtua yang bergerak di sektor informal, seperti penjual

bakso, pedagang sayur di pasar, buruh, dan lain-lain. Dengan adanya berbagai kegiatan sosial yang diadakan, sedikit banyak dapat menambah ketrampilan dan pengetahuan mereka sehingga nantinya mereka dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai. Demikian pula apa yang telah mereka hasilkan dari kursus-kursus ketrampilan dapat dijual, yang berarti mereka memperoleh tambahan penghasilan. Pendapatan yang mereka peroleh ini dapat digunakan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Oleh sebab itu segala kegiatan sosial yang diadakan sangatlah bermanfaat bagi kehidupan warga setempat, terutama apabila mereka sendiri dapat merasakan manfaatnya.

Menjadi anggota dalam suatu perkumpulan menuntut kedisiplinan dari setiap individu yang tergabung di dalamnya. Hal ini berarti setiap anggota harus disiplin dalam mengikuti setiap kegiatan yang secara rutin diadakan, baik diminta maupun tidak diminta oleh aparat pemerintah setempat. Pada dasarnya tidak ada keharusan yang mengikat para warga untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut, hanya kesadaran dan tanggung jawab merekalah yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tersebut. Para warga jugalah yang nantinya akan merasakan manfaat dan keuntungan dari keikutsertaan mereka dalam aktivitas-aktivitas itu.

Mengenai masalah kedisiplinan masyarakat setempat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial, dapat dikatakan mereka memiliki disiplin yang cukup tinggi dengan keikutsertaan mereka. Merupakan suatu kesenangan tersendiri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah, terutama bagi para ibu rumah tangga, karena mereka dapat lepas sejenak dari rutinitas pekerjaan di dalam rumah yang kadang-kadang membosankan. Hal ini terbukti dengan banyaknya warga setempat kecuali warga Rukun Tetangga (RT) 015, yang mendatangi kursus-kursus ketrampilan, pengajian, atau kegiatan olahraga dan kesenian. Demikian pula hampir setiap hari terlihat di Posyandu ramai oleh para ibu rumah tangga yang datang ke sana untuk berobat, menimbangkan bayi, atau mereka yang ingin mengikuti program KB (Keluarga Berencana). Pada tempat-tempat kegiatan tersebut terjadi interaksi yang intensif di antara mereka.

Kenyataan lain menyatakan, bahwa belum semua warga yang menyadari arti penting dan manfaat dari kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan. Walaupun telah berkali-kali diadakan penyuluhan yang persuasif akan manfaat keberadaan perkumpulan-perkumpulan yang dibentuk, mereka tidak merasa tertarik untuk

menjadi anggota atau paling tidak sekedar mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Ada banyak alasan yang dikemukakan mengapa mereka tidak turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan, terutama alasan ketiadaan waktu untuk mengikuti kegiatan rutin tersebut. Hampir sebagian besar waktu mereka tersita untuk mencari nafkah, baik yang dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga, istri, maupun anak-anak. Mereka akan merasa rugi jika sehari saja tidak bekerja, karena berarti mereka tidak memperoleh pemasukan pada hari itu.

Terdesak oleh pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, terutama kebutuhan akan makan, aktivitas sehari-hari sementara warga setempat lebih terfokus pada usaha mencari nafkah. Dengan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya, mereka terpacu untuk lebih giat menjalankan pekerjaan sehari-hari. Dengan sendirinya praktis mereka tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan secara rutin, terutama kegiatan yang diselenggarakan pada pagi atau siang hari. Mereka cenderung bersikap tidak peduli terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, karena mereka lebih mementingkan mencari nafkah daripada mengikuti kegiatan-kegiatan itu yang belum tentu dapat menghasilkan uang pada hari itu.

Bagi warga yang kurang aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial, tampaknya hanya Posyandu dan kegiatan pengajian yang masih mereka kunjungi. Apabila mereka membutuhkan untuk berobat, memeriksakan kehamilan, atau menimbang bayi, para ibu rumah tangga yang bekerja menyempatkan diri mendatangi Posyandu. Sedangkan bila kegiatan pengajian diadakan pada malam hari, mereka pun dapat mengikutinya setelah pulang bekerja.

3.3 Disiplin Terhadap Administrasi Pemerintahan

Setiap warga masyarakat wajib mematuhi ketentuan-ketentuan administrasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, seperti memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), kartu keluarga, membayar pajak dan retribusi/iuran lainnya, dan sebagainya. Mau tidak mau mereka harus disiplin menjalankan semua itu, agar tidak terkena sanksi administratif dari kepala lingkungan tempat mereka bermukim. Akan tetapi masih terdapat kendala untuk memenuhi apa yang telah menjadi peraturan, terutama masalah keterbatasan kondisi ekonomi warga setempat.

Tidak semua warga setempat memiliki KTP sebagai syarat utama memperoleh surat-surat keterangan lainnya. Dalam hal ini terutama warga baru. Yang menjadi sebab adalah karena mereka harus mengeluarkan biaya administrasi untuk memperoleh KTP. Biaya yang dikenakan itu bagi mereka cukup mahal dengan penghasilan mereka yang tidak menentu. Padahal penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya hanya cukup untuk makan sekeluarga. Karena itu mereka merasa enggan membuat KTP, sebab hal ini berarti mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk ukuran mereka. Dan ini berarti pula mereka tidak dapat memiliki surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan untuk melengkapi status kependudukan mereka.

Banyaknya warga yang tidak memiliki surat keterangan menyulitkan pihak yang berwenang mengadakan pendataan, sebab di antara mereka mungkin ada yang belum mendaftarkan diri sebagai warga setempat karena tidak memiliki surat keterangan. Mereka merasa takut untuk mendaftarkan diri karena takut dikenakan saksi atau hukuman, disamping itu mereka tidak bermaksud menetap selamanya di sana. Meskipun demikian tampaknya mereka bersikap tidak peduli terhadap akibat yang akan mereka alami sebagai penduduk Jakarta tanpa memiliki surat-surat keterangan. Ketidakpedulian mereka disebabkan oleh karena mereka merasa enggan menghadapi birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan surat-surat keterangan tersebut, yang bagi mereka hal itu hanya membuang waktu. Belum lagi biaya administrasi yang harus dikeluarkan dirasa cukup mahal bagi mereka.

Bagi warga yang tidak memiliki surat-surat keterangan akan menemui kesulitan dalam segala urusan administrasi, misalnya untuk memperoleh akte lahir dan surat-surat ijin, mengurus perkawinan, atau menjadi anggota suatu perkumpulan yang disahkan pemerintah. Bahkan mereka tidak boleh mengikuti suatu peristiwa nasional yang mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu Pemilihan Umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Walaupun mereka dapat dikenakan hukuman atau sanksi jika tidak memiliki surat keterangan sesuai dengan peraturan pemerintah, mereka tidak terlalu memperdulikan masalah itu. Ada saja tindakan mereka untuk dapat luput dari kejaran aparat pemerintah, misalnya mereka tidak keluar rumah jika mengetahui sedang diadakan pemeriksaan KTP di jalan-jalan raya, atau mereka berbondong-bondong pulang ke daerah asal saat akan menghadapi Pemilu, dan sebagainya.

Keengganan warga menyelesaikan masalah-masalah administrasi yang sangat bermanfaat bagi status kependudukan mereka membuktikan bahwa mereka kurang berdisiplin terhadap administrasi pemerintah yang terselenggara di wilayah pemukiman mereka. Apabila mereka secara sadar dan disiplin mau mematuhi peraturan-peraturan berkaitan dengan sistem administrasi pemerintahan, mereka dapat merasakan ketenangan menjadi warga penduduk suatu daerah beserta kemudahan-kemudahan yang akan diperolehnya.

Administrasi pemerintahan tidak hanya menyangkut masalah kepemilikan surat-surat keterangan bagi penduduk, tetapi juga menyangkut peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang diinstruksikan kepada penduduk untuk dipatuhi. Pemerintah mencanangkan banyak program yang bertujuan untuk memajukan peri-kehidupan seluruh warga masyarakat. Melalui aparat-aparatnya yang diberi kewenangan di setiap wilayah pemukiman, pemerintah mengadakan penyuluhan atau penerangan kepada penduduk sebagai salah satu cara pencapaian tujuan program-program yang dicanangkan. Diharapkan melalui aparat-aparat pemerintah daerah yang lebih dekat dengan warga masyarakat dalam suatu wilayah pemukiman, mereka dapat menyalurkan apa yang dikehendaki pemerintah terhadap semua warga masyarakat. Dan sebaliknya aparat-aparat pemerintah yang berada dalam wilayah pemukiman tersebut dapat menyampaikan aspirasi seluruh warganya, sehingga terwujud keselarasan dalam segala hal antara pemerintah dengan rakyat. Wilayah pemukiman yang “bebas sampah” misalnya, merupakan salah satu sasaran program pemerintah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk menunjang program “Jakarta yang BMW (Bersih, Manusiawi dan Berwibawa)”.

Telah berulang kali Pemerintah Daerah melalui Ketua-ketua lingkungan pemukiman mengadakan penyuluhan dan pembinaan terhadap warga penduduk yang bermukim pada masing-masing wilayah agar mentaati semua peraturan pemerintah, baik yang tersurat (tertulis) maupun tersirat. Demikian pula diberlakukan sanksi atas pelanggaran peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam bentuk hukuman kurungan maupun yang bersifat sanksi administratif. Meskipun telah diberlakukan sanksi bagi pelanggar peraturan, namun seolah-olah masyarakat kurang mempedulikan apa yang telah ditetapkan pemerintah. Masih saja terjadi pelanggaran di sana-sini. Sebagai contoh bagi para tamu jarang sekali yang melapor diri. Dan sudah seringkali pula para pelanggar dikenakan hukuman, berupa teguran lisan maupun tertulis namun setelah itu mereka mengulang kembali kesalahan yang pernah diperbuat.

Seringnya terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, menunjukkan bahwa masyarakat kurang disiplin menjalankan peraturan-peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya masih terdapat sistem pengawasan dan pengendalian sosial yang dirasa kurang ketat dan mengikat, sehingga menimbulkan ketidakteraturan serta masalah-masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula sanksi yang dikenakan atas pelanggaran dirasa tidak cukup berat yang dapat membuat jera mereka mengulangi kesalahan. Sebagai contoh yang dapat diambil, di tempat-tempat umum biasanya terpampang tulisan mengenai peraturan daerah yang melarang membuang sampah di sembarang tempat, berikut sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar. Pada kenyataannya peraturan tersebut hanya “menghiasi” tempat-tempat umum tanpa disertai konsekuensi dan tindakan yang nyata dari masyarakat. Kesadaran akan disiplin masyarakat tidak tergugah dengan adanya peraturan tersebut, dan kita masih dapat menjumpai orang yang membuang sampah bukan pada tempat yang telah disediakan.

3.4 Disiplin Dalam Hubungan Ketetanggaan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat mengingkari akan kebutuhan untuk mengembangkan hubungan-hubungan sosial dengan sesamanya. Demikian pula manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berbudaya, di manapun, bilamanapun, dan dalam keadaan apapun mereka akan hidup bersama mengembangkan persekutuan yang beraneka ragam sesuai dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup yang menghadang. Untuk menghadapi tantangan itu tidak dapat ditanggapi secara perorangan, akan tetapi harus membina kerjasama dengan sesamanya dalam proses penyesuaian dirinya terhadap lingkungan. Dalam mempertahankan kekompakan kerjasama persekutuan tersebut diperlukan ketentuan mengenai keanggotaannya sebagai cara untuk membedakan antara anggota dan bukan anggota, sehingga dapat terwujud persatuan dan solidaritas di antara sesama anggota.

Persekutuan-persekutuan sosial tersebut tidak hanya terwujud atas dasar hubungan kekerabatan saja, melainkan dapat pula terwujud karena berbagai alasan, seperti kesatuan lingkungan tempat tinggal serta kesamaan akan kepentingan dan kebutuhan. Di antara persekutuan yang terwujud karena kesamaan lingkungan tempat tinggal ialah apa yang dikenal sebagai Rukun

Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), komunitas desa, banjar, dan sebagainya. Sedangkan persekutuan sosial yang terwujud karena kesamaan minat, kebutuhan atau kepentingan ialah antara lain berupa teman sepermainan atau kelompok sebaya.

Suatu persekutuan apapun bentuknya, memiliki sistem yang hanya dapat bertahan kalau unsur-unsur atau komponen-komponennya selalu berada dalam masing-masing kedudukannya, sehingga dapat memainkan peranan-peranan secara efektif dan efisien. Setiap kedudukan dan peranan masing-masing anggota persekutuan tersebut mencakup hak dan kewajiban dari pelakunya, yang corak serta macamnya ditentukan oleh corak dan macam struktur sosial yang berlaku.

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga suatu masyarakat, orang sering lupa atau tidak sadar bahwa dia menjadi warga dari suatu ketetanggaaan di mana dia bermukim. Kesadaran itu baru muncul kalau dia memerlukan bantuan dari tetangganya, terutama pada saat-saat penting seperti kematian, perkawinan, panen, dan lain-lain. Demikian pula sebaliknya, pada suatu saat nanti tetangganya akan membutuhkan bantuan yang dalam bentuk yang sama. Dapat dikatakan bantuan para tetangga akan lebih dulu datang sebelum ada bantuan dari kaum kerabat, karena tetangga bertempat tinggal lebih dekat dengan orang yang membutuhkan bantuan, sedangkan kaum kerabatnya kemungkinan ada yang bertempat tinggal jauh dari kediamannya. Melihat pola hubungan yang seperti itu, dapat dikatakan bahwa dalam hubungan ketetanggaaan berlaku apa yang disebut *reciprocity* (prinsip timbal balik).

Prinsip timbal balik dalam hubungan ketetanggaaan menuntut adanya suatu disiplin diri dari masing-masing pihak yang terlibat, karena mereka dituntut pada suatu saat nanti harus dapat membalas kebaikan yang telah diberikan orang lain. Tampaknya hal itu sudah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat di tempat penelitian. Masing-masing pihak yang terlibat dapat saling bekerjasama dengan penuh tanggung rasa dan toleransi. Hubungan ketetanggaaan menunjukkan keharmonisan di antara individu-individu yang terlibat, dan mereka dapat mewujudkan keselarasan dalam kehidupan bertetangga.

Dalam lingkungan warga terdapat berbagai kegiatan dengan melibatkan individu-individu yang hidup bertetangga. Kegiatan tersebut bukan hanya dalam peringatan peristiwa-peristiwa penting sepanjang lingkaran (daur) hidup

manusia, seperti kelahiran, inisiasi (pendewasaan), perkawinan, dan kematian, akan tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan banyak tenaga kerja. Pengerahan banyak tenaga kerja dapat melibatkan anggota-anggota kerabat atau para tetangga, misalnya dalam pekerjaan mendirikan rumah, selamatan, upacara perkawinan, dan lain-lain. Dalam aktivitas-aktivitas ini berlaku sistem kerja yang bersifat gotong royong.

Di samping berbagai bentuk pekerjaan yang melibatkan individu-individu yang hidup bertetangga, ada jenis kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk mengintensifkan dan mempererat hubungan ketetanggaan. Dalam hal ini terlihat jelas adanya arisan, pengajian, atau bentuk-bentuk perkumpulan lain yang merupakan sarana efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kegiatan-kegiatan sosial tersebut mereka dapat saling berinteraksi dan mengembangkan pola-pola hubungan sosial.

Kesadaran dan disiplin diri juga sangat dibutuhkan dalam aktivitas gotong royong mereka, karena gotong royong disadari merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk mewujudkan keharmonisan dalam hubungan ketetanggaan. Keikutsertaan seluruh warga akan mempercepat selesainya pekerjaan tersebut, sebaliknya pekerjaan akan tersendat-sendat atau lama selesainya jika ada beberapa orang warga yang tidak turut berpartisipasi.

Dalam kehidupan sehari-hari terlihat pula keakraban hubungan antar tetangga, yang memiliki pola khas hubungan sosial di wilayah pemukiman dengan kondisi rumah saling berhimpitan. Kerap terlihat beberapa ibu rumah tangga yang sedang santai sambil bercakap-cakap di depan rumah, walaupun yang mereka bicarakan adalah orang lain. Begitu pula jika seseorang membutuhkan sesuatu, dia dapat meminta atau meminjam dari tetangganya. Keakraban hubungan dengan tetangga juga melibatkan kaum pria dan anak-anak.

Hubungan antara sesama kaum pria lebih terfokus pada kerja sama dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Apabila terlihat seseorang sedang melakukan suatu pekerjaan, maka tetangganya dengan spontan akan membantu walaupun tanpa diminta. Di samping melakukan pekerjaan sehari-hari, mereka juga sering tampak duduk-duduk sambil mengobrol. Apa yang menjadi obyek obrolan mereka berkisar pada masalah sehari-hari atau mengenai masalah-masalah yang aktual dewasa ini. Aktivitas mengobrol ini juga dapat melibatkan para pemuda yang sedang tidak bekerja saat itu. Para pemuda ini juga

mempunyai persekutuan sosial sendiri yang membutuhkan peran serta mereka secara aktif, untuk keberlangsungan persekutuan tersebut serta membina keakraban di antara sesama kaum muda. Sedangkan keakraban hubungan antara anak-anak dapat terlihat dalam berbagai aktivitas mereka sesuai dengan tingkat usia mereka, seperti bermain, belajar bersama, dan lain-lain. Dari pola-pola hubungan sosial tersebut, disadari ataupun tidak disadari oleh individu-individu yang terlibat akan berkembang suatu solidaritas sosial di antara mereka, yang mana mereka akan saling membela kepentingan bersama dari segala ancaman yang berasal dari luar lingkungan mereka.

Pada suatu saat tertentu sebuah keluarga akan menghadapi peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan mereka, sehubungan dengan peristiwa sepanjang lingkaran hidup (*life cycle*) manusia. Dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penting tersebut (seperti kelahiran, inisiasi/pendewasaan, perkawinan, atau kematian), keluarga yang bersangkutan membutuhkan bantuan tenaga untuk meringankan beban mereka. Dalam penyelenggaraan suatu pesta (*hajatan*) misalnya, bantuan tenaga kerja yang dibutuhkan dapat berasal dari kerabat sendiri maupun dari para tetangga terdekat.

Dalam hal ini ada kecenderungan bantuan yang diberikan oleh para tetangga lebih banyak dibandingkan dari para kerabat, sebab tetangga bertempat tinggal lebih dekat dengan keluarga yang bersangkutan sehingga dapat setiap saat dimintai bantuan. Sedangkan kaum kerabat ada yang bertempat tinggal jauh, sehingga pada saat-saat dibutuhkan sulit dimintai bantuan. Kalaupun mereka harus menginap di rumah keluarga itu karena sangat dibutuhkan bantuannya, itupun tidak dapat menetap terlalu lama karena kapasitas rumah yang tidak memungkinkan untuk menampung banyak orang. Dengan demikian para tetanggalah yang dapat lebih banyak dimintai bantuan.

Bantuan yang diberikan oleh para tetangga dapat berupa bantuan moril maupun materiil, sesuai dengan kemampuan orang yang memberikan bantuan. Adapun wujud dari bantuan moril berupa bantuan tenaga mulai dari persiapan sampai selesainya penyelenggaraan pesta, misalnya kaum wanita membantu memasak, menyiapkan hidangan, dan pekerjaan-pekerjaan kewanitaan lainnya; sedangkan kaum pria mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat, seperti mengatur ruangan, mendirikan bangunan yang dibutuhkan, dan lain-lain. Tetangga yang tidak dapat turut berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut biasanya memberikan bantuan materiil dalam bentuk uang, beras, makanan, bahan-bahan bangunan dan sebagainya.

BAB IV

DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KELURAHAN SENEN

Kelurahan Senen termasuk dalam wilayah salah satu pusat kegiatan ekonomi di Jakarta, sehingga tidak mengherankan apabila di daerah ini terkonsentrasi berbagai tempat yang ramai dikunjungi masyarakat, seperti pasar/pertokoan, terminal, dan tempat-tempat hiburan. Kesemuanya ini sudah barang tentu ditunjang dengan pengadaan prasarana jalan yang memadai untuk memudahkan mencapai tempat tersebut.

Sebagai pusat kegiatan ekonomi yang dapat menentukan perputaran roda ekonomi negara, maka di wilayah ini banyak didirikan tempat-tempat umum yang dapat mendatangkan pemasukan bagi devisa negara. Tempat-tempat umum yang dimaksud antara lain pasar atau pusat perbelanjaan, gedung bioskop, terminal bis, dan lain-lain. Tempat-tempat semacam itulah dianggap dapat *menyedot* banyak pengunjung yang memerlukan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, dan sebaliknya tempat-tempat tersebut sangat membutuhkan pengelola yang diharapkan dapat mewujudkan keteraturan dan ketertiban tempat-tempat umum tersebut.

Berbagai tempat umum yang disediakan pemerintah untuk memberi kemudahan-kemudahan dan menyediakan fasilitas bagi kebutuhan masyarakat luas bukannya tidak membutuhkan perawatan. Kebersihan dan keamanan tempat-tempat umum tersebut dapat menarik para pengunjung untuk terlibat dalam berbagai aktivitas di dalamnya, seperti berbelanja, menonton bioskop, menunggu kendaraan umum, dan sebagainya, karena dengan kehadiran mereka berarti pihak pengelola tempat-tempat umum tersebut akan memperoleh pemasukan. Akan tetapi seringkali terlihat tempat-tempat umum tersebut kurang terawat kebersihannya, yang memberikan rasa tidak nyaman kepada para pengunjung.

Hal tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh masyarakat sebagai pemakai jasa tempat-tempat umum di kelurahan ini berasal dari berbagai kalangan dengan latar belakang kebudayaan dan kehidupan sosial yang berbeda. Perbedaan ini diikuti dengan suatu konsekuensi, yaitu adanya perbedaan dalam penerapan disiplin, karakter dan sifat-sifat bawaan dari masing-masing individu yang berbeda. Dengan demikian penerapan disiplin di lingkungan tempat umum di daerah penelitian juga berbeda, dan hal ini juga tergantung pula pada karakter serta sifat bawaan individu tersebut. Demikian pula disiplin yang diterapkan oleh masing-masing individu dalam masyarakat memiliki tingkat kedisiplinan yang berbeda tergantung pada latar belakang sosialisasi atau pendidikan yang di terimanya, baik yang diperoleh secara formal dari bangku sekolah maupun informal dari dalam keluarga dan masyarakat.

Proses sosialisasi dalam keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan sikap mental seorang individu dalam menerapkan disiplin dalam lingkungan masyarakat. Seseorang yang dilatih bertanggungjawab di dalam keluarganya, dia cenderung terbiasa akan bertanggungjawab pula dalam segala tindakannya sehari-hari. Akan tetapi sebaliknya, mereka yang tidak diperkenalkan pada rasa tanggungjawab dalam keluarga akan mempunyai konsep yang jauh berlainan dalam memandang arti kata "peraturan". Mereka cenderung tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap segala peraturan dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dalam arti mereka sering melakukan kesalahan atau pelanggaran yang disengaja.

Perkembangan sikap mental individu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, terutama lingkungan tempat bermukim dan lingkungan pergaulan sosial atau pertemanan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa pengaruh lingkungan sosial lebih besar dibandingkan pengaruh keluarga, karena tidak setiap saat orangtua dapat mengawasi kegiatan anak-anaknya di luar lingkungan keluarga sehingga tidak dapat terus-menerus memberi pengawasan atas sikap dan tindakan anak-anak di luar rumah. Dan kebanyakan orangtua sering mengabaikan hal tersebut dengan alasan sibuk bekerja, sehingga kurang memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya yang dapat mengakibatkan mudahnya disiplin dan tanggung jawab yang telah ditanamkan di dalam diri anak selama ini. Sementara itu ada beberapa individu yang bersikap munafik, dalam arti mereka dapat menjalankan disiplin dalam lingkungan

keluarga tetapi tidak demikian halnya di dalam lingkungan sosial yang lebih luas, atau sebaliknya. Tindakan disiplin yang dijalankan hanya merupakan kompensasi ketidak disiplinannya untuk menghindari sanksi. Demikian pula tindakan disiplin itu bukan berasal dari kesadaran yang dimiliki, melainkan agar mereka dapat diterima dalam lingkungannya.

Tingkat kedisiplinan juga dibedakan oleh tingkat pendidikan formal yang dimiliki seseorang. Bagi mereka yang tingkat pendidikannya tinggi atau minimal tamat SMP akan mudah menerima dan menjalankan peraturan yang diberlakukan dengan penuh kedisiplinan. Sebaliknya mereka yang berpendidikan rendah atau tidak sekolah akan sangat sulit menanamkan disiplin dalam diri mereka. Hal tersebut selain disebabkan oleh kurang cerdasnya seorang individu untuk dapat menerima, menyerap dan memahami peraturan serta kaidah-kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat, juga oleh faktor kebutuhan. Dari wawancara mendalam terhadap mereka yang menyeberang jalan tanpa menggunakan jembatan penyeberangan atau tempat penyeberangan yang telah tersedia (Zebra) menunjukkan bahwa mereka yang tidak sekolah atau putus sekolah kurang berdisiplin atau sering melanggar peraturan. Dari segi lain mereka didorong oleh sesuatu kebutuhan pokok, makan misalnya, mereka menjadi bertindak kurang disiplin atau melanggar peraturan. Sebagai contoh, pemerintah telah melarang semua jenis pedagang asongan menjajakan dagangan mereka pada daerah-daerah dekat lampu lalu lintas (traffic light). Namun oleh karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka terpaksa melanggar peraturan pemerintah dengan menjadi pedagang asongan di jalan-jalan raya meskipun setiap saat dapat terjaring pihak yang berwajib.

Adanya peraturan atau kaidah-kaidah sosial yang mengikat disertai dengan sanksi/hukuman yang jelas dan dikenakan terhadap setiap bentuk pelanggaran dimungkinkan dapat menjamin ketertiban dan keteraturan di suatu tempat umum. Tidak dapat disangkal peraturan sangat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran disiplin masyarakat di tempat-tempat umum, di mana banyak masyarakat yang datang ke tempat ini dengan membawa serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerah masing-masing. Dengan adanya peraturan yang diberlakukan pada suatu lingkungan akan menciptakan keseragaman dalam hal bertindak.

Peraturan yang diberlakukan tampaknya kurang ditunjang oleh sistem pengawasan dan pengendalian sosial yang dijalankan oleh para petugas yang

berwenang untuk menjamin terciptanya lingkungan yang bersih, tertib dan teratur. Mereka diberi wewenang menjatuhkan hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan, dan tidak diperkenankan mengarah pada kepentingan pribadi. Akan tetapi tampaknya kondisi semacam itu tidak mudah terwujud. Antara pihak yang mengatur dan yang diatur memiliki kelemahan yang mendasar, hingga berakibat lingkaran setan. Bukan hanya masyarakat yang dituntut kedisiplinannya dalam bertindak sesuai dengan peraturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku, demikian pula halnya yang dituntut dari yang berwenang. Masyarakat tampaknya mengetahui gejala indisipliner yang dilakukan petugas lalu lintas, tetapi merasa kurang etis jika menegur tindakan menyalahi peraturan yang dilakukan oleh petugas, dengan alasan "tidak mau mencari perkara". bahkan masyarakat merasa tidak berhak untuk berperan sebagai pengawas atau pengendali sosial yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk teguran kepada pihak yang berwenang atas pelanggaran atau kesalahan yang mereka perbuat. Sebagai contoh adalah para pengemudi mobil maupun pengendara motor, entah karena apa mereka diberhentikan oleh petugas padahal mereka tidak melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu akan diakhiri setelah melunasi kewajiban rekayasa. Ketertiban serta keteraturan baru dapat diwujudkan apabila masyarakat dengan penuh kesadaran dan disiplin menjalankan semua peraturan dan kaidah sosial yang berlaku, didukung oleh peranan aparat petugas yang juga menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan penuh disiplin.

Di tempat-tempat umum lokasi penelitian kami seperti pasar, terminal, tempat hiburan (gedung bioskop) maupun jalan raya masyarakat belum terlihat mematuhi peraturan yang berlaku secara utuh. Adanya aneka jenis sampah bertebaran di tempat-tempat tsb, menandakan kurang disiplinnya mereka yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari di tempat-tempat itu, baik pemberi maupun pemakai jasa. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat masih sering terlihat, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, pedagang kaki lima menggelar barang dagangan di trotoar atau tempat menunggu bis (shelter), pedagang asongan masih banyak yang berkeliaran di jalan raya, gedung bioskop yang dipenuhi sampah dari penonton, serta kurangnya tenaga pengawas (petugas) yang berkewajiban menertibkan jalannya peraturan, dan sebagainya.

4.1 DISPLIN DI LINGKUNGAN PASAR/PERTOKOAN.

Pasar merupakan salah satu sarana umum yang memerlukan tingkat kedisiplinan yang tinggi, agar tercipta lingkungan yang sesuai dengan syarat

kesehatan dan kebersihan. Pihak pengelola pasar atas anjuran Pemerintah Daerah telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, aman dan tertib, seperti setiap kios harus menyediakan tempat sampah, tidak boleh menempatkan barang dagangan sampai ke luar kios, dan lain-lain. Di lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Senen, terdapat beberapa kawasan pasar yang berbeda tingkat kebersihannya. Perbedaan ini didasarkan pada kriteria kondisi lingkungan fisik bangunan pasar yang ada, yaitu pasar inpres yang semi permanen serta pasar swalayan (super market) yang berada dalam gedung yang megah dan bersih. Adanya perbedaan kondisi bangunan pasar secara tidak langsung menimbulkan perbedaan tingkat kedisiplinan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan di pasar tersebut. Selain itu kelengkapan fasilitas yang disediakan juga berbeda, seperti tempat sampah, tangga berjalan (eskalator), alat pengatur udara (AC), kelengkapan petugas, dan sebagainya yang ditunjang dengan tingkat pendidikan yang berbeda pula.

Perbedaan tingkat kedisiplinan tersebut juga disebabkan oleh latar belakang kebudayaan dan kehidupan sosial individu-individu yang terlibat dalam kegiatan pasar. Setiap individu yang berada di kawasan tersebut membawa serta kebiasaan-kebiasaan atau tradisi mereka berdasarkan asal daerahnya. Keadaan tersebut kemudian, menciptakan dinamika kehidupan dalam lingkungan pasar Senen, yang dipenuhi dengan berbagai masalah ketidaktertiban.

Pasar Senen merupakan satu sarana yang penting dalam menunjang aktivitas ekonomi di daerah perkotaan. Sebagai sarana umum yang melibatkan banyak pedagang dan pembeli yang berasal dari berbagai daerah, maka di pasar sering timbul berbagai masalah sosial. Masalah-masalah tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan latar belakang kebudayaan serta kehidupan sosial dari individu-individu yang terlibat dalam kegiatan pasar seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian tidak mengherankan apabila di suatu pasar terdapat masalah-masalah yang berhubungan dengan sarana dan prasarana, peraturan dan pelanggaran, serta masalah-masalah sosial lainnya. Hal tersebut dapat diterima apabila kadar masalahnya tidak merugikan kepentingan masyarakat banyak.

Sudah menjadi suatu tradisi dalam masyarakat, bahwa setiap individu dalam rangka usaha memenuhi kebutuhannya selalu menggunakan cara yang termudah pada setiap tindakannya. Akibatnya dari hal tersebut menyebabkan sarana maupun prasarana yang tersedia tidak berfungsi atau tidak difungsikan

sebagaimana mestinya. Tempat sampah misalnya, terlihat selalu terisi penuh di suatu kawasan pasar, sedangkan di kawasan pasar yang lainnya terlihat kosong yang menandakan orang kurang memanfaatkannya. Kurang berfungsinya sarana maupun prasarana tersebut menandakan bahwa disiplin masyarakat di tempat pasar sangat rendah. Ketidak disiplin masyarakat juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bentuk fisik bangunan pasar, sarana maupun prasarana yang disediakan, tingkat pendidikan masyarakat, serta latar belakang tradisi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan pasar.

Bentuk fisik bangunan pasar yang tua dan kotor, lantai berlobang-lobang dan becek, dinding tidak halus, lorong tempat berjalan yang sempit sehingga orang yang lewat harus berdesakan, serta tidak adanya sirkulasi udara dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk mematuhi setiap peraturan yang berlaku. Kondisi pasar yang seperti itu mengakibatkan setiap individu yang memasuki kawasan pasar tersebut merasa enggan mematuhi peraturan yang berlaku karena mereka beranggapan bahwa tanpa mematuhi peraturanpun keadaannya sudah kotor. Tanpa disadari hal itu menyebabkan rusaknya lingkungan di sana, yaitu lingkungan menjadi kotor karena orang-orang membuang sampah sembarangan, meludah sembarangan dan sebagainya.

Sarana dan prasarana yang disediakan dalam lingkungan pasar akan sangat membantu berjalannya peraturan. Tidak adanya sarana yang disediakan, seperti tempat sampah, air bersih, saluran pembuangan (got), jalan dan sebagainya akan menambah masalah lingkungan yang semakin parah lagi. Salah satu contohnya adalah bau busuk yang ditimbulkan oleh karena tergenangnya air buangan di lingkungan pasar.

Tingkat pendidikan yang diterima oleh setiap individu yang didapat secara formal maupun non formal juga berpengaruh dalam penanaman disiplin. Khususnya mereka yang berpendidikan rendah akan sulit menerima arti pentingnya kedisiplinan dalam memelihara kebersihan serta ketertiban tempat-tempat umum. Di samping itu latar belakang tradisi setiap individu juga mempunyai andil besar dalam terlaksananya disiplin. Karena setiap masyarakat mempunyai kebiasaan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya, sehingga muncullah dinamika kehidupan dalam satu lingkungan, yaitu pasar yang tak jarang disertai dengan konflik-konflik yang terjadi di antara mereka bahkan dengan petugas.

Secara umum pasar Senen dapat digolongkan menjadi tiga kawasan, yaitu kawasan pasar inpres, kawasan pasar proyek serta kawasan pasar

swalayan (super market). Ketiga kawasan tersebut menunjukkan tingkat kedisiplinan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan digambarkan keadaan dari masing-masing kawasan pasar.

Kawasan Pasar Inpres

Lokasi kawasan ini terletak di antara terminal dan pasar proyek yang diapit oleh jalan raya. Bentuk fisik bangunan di kawasan ini dibuat sedemikian rupa yang mengesankan kurang teratur dan terawat, seperti lantai yang terbuat dari semen telah kembali ke wujud semula (tanah), dinding kasar, langit-langit rendah, serta penempatan kios-kios yang berukuran masing-masing 3 M² (2 X 1.5 M). Pasar ini dibagi menjadi beberapa blok, yang mana masing-masing blok dikhususkan ditempati pedagang-pedagang dengan barang dagangan yang berbeda, seperti blok sayur mayur dan buah-buahan, daging dan ikan, barang pecah belah, warung makanan, dan lain-lain.

Sesuai dengan tujuan semula kios-kios tersebut disediakan untuk menampung pedagang kaki lima yang terpaksa dipindahkan, sehubungan dengan pindahnya terminal Lapangan Banteng ke terminal Pulo Gadung. Mereka umumnya merupakan golongan pedagang kecil yang berpendidikan rendah dalam arti tidak sekolah atau putus sekolah seperti penjaja es, koran pemilik warung nasi dan sebagainya. Oleh sebab itu bisa dipahami apabila mereka kurang menguasai cara berdagang yang permanen. Meskipun demikian mereka dapat melihat peluang pasar yang prospektif, misalnya dengan mengganti barang-barang dagangan. Sebagai contoh, yang semula sebagai pedagang barang-barang klontong di kaki lima beralih dengan menjual pakaian setelah menempati salah satu kios. Dengan demikian pasar ini dipenuhi oleh pedagang sayur mayur, buah-buahan, daging, ikan, atau berbagai jenis barang dagangan lainnya. Di samping itu pada bagian depan dari pasar ini bermunculan pedagang-pedagang yang hampir semuanya berasal dari etnis Batak menggelar dagangan berupa pakaian, sepatu tas, minyak wangi, barang-barang porselin buatan luar negeri, dan lain-lain yang kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan kualitas barang milik para bekas pedagang kaki lima tersebut.

Untuk menjaga keteraturan pada setiap pasar, Pemerintah Daerah mengeluarkan seperangkat peraturan yang harus dituruti terutama oleh para pedagang. Peraturan tersebut dapat ditetapkan sebagai Undang-undang seperti yang berlaku di pasar ini, yaitu UU Pemerintah Daerah No. 228 tahun 1976, yang antara lain berisi :

1. Ijin penggunaan kios sesuai dengan barang dagangan.
2. Memperpanjang Surat Ijin tersebut 2 (dua) tahun sekali.
3. Membayar iuran sewa tempat :
 - a. Bila dibayar harian, maka harus 30 hari
 - b. Bila dibayar sekaligus cukup 25 hari

Bedasarkan bunyi peraturan tersebut, banyak pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pedagang setempat. Sebagai contoh penggantian barang dagangan yang menyalahi Perda No. 228 ayat 1. Penggantian jenis barang dagangan yang diperkenankan adalah apabila mengganti barang dagangan dengan yang sejenis. Pada kenyataannya banyak pedagang yang mengganti barang dagangan yang tidak sejenis, yang menurut mereka lebih digemari konsumen dan lebih banyak menghasilkan keuntungan. Demikian pula para pedagang juga sering menunggak membayar uang iuran sewa tempat/kios melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yang mana seharusnya mereka sudah tidak berhak lagi menempati kios tersebut. Akan tetapi mereka masih diberi kelonggaran sampai sebanyak tiga kali melalaikan kewajiban baru ditindak, kelonggaran yang diberikan oleh pihak yang berwenang inilah yang mengakibatkan mereka sering lalai atau menunda memenuhi kewajiban. Padahal kalau dilihat dari Perda No. 228 ayat 3b, bagi mereka yang mau membayar uang iuran sewa secara tunai (sekaligus) sudah mendapatkan keringanan biaya yaitu potongan uang sewa selama lima hari dari 30 hari pemakaian kios.

Pelanggaran jenis lain yaitu adanya beberapa pedagang yang mengalihkan atau menyewakan kios kepada pedagang lain tanpa melapor kepada aparat petugas pasar, dan disertai dengan penggantian jenis barang dagangan yang tidak sesuai dengan surat ijin. Pengalihan sewa kios dapat disebabkan oleh karena mereka akan mendapatkan uang sewa yang lebih tinggi dari penyewa dibandingkan dengan uang sewa yang harus dikeluarkan sendiri. Dengan demikian mereka akan mendapat keuntungan dari menyewakan kios tersebut.

Dalam menanggapi masalah tersebut, aparat petugas akan melihat sejauh mana terjadinya pelanggaran. Tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi belum diberlakukan, sejauh belum ada pihak-pihak tertentu yang mengadu karena merasa dirugikan. Misalnya saja, seorang pedagang pakaian yang berjualan di blok pakaian mengganti jenis barang dagangan dengan membuka warung nasi di kios yang sama. Asap yang dikeluarkan waktu memasak

menyebabkan pakaian-pakaian yang dijual di kios-kios sekitarnya menjadi berbau. Belum lagi bahaya kebakaran yang selalu mengancam dari kompor yang meledak, demikian pula sisa-sisa makanan yang tercecer dapat mengotori kios-kios sekitarnya. Pedagang yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi jika diadakan oleh pedagang-pedagang lain karena telah merugikan sesama pedagang. Demikian pula sanksi dijatuhkan atas pelanggaran penggunaan kios yang tidak sesuai dengan pengelompokkan jenis barang dagangan. Sanksi yang dikenakan dapat berupa denda atau pindah ke kios lain, dan yang lebih berat lagi tidak diperkenankan berdagang di pasar tersebut.

Ketidaksiplinan para pedagang juga dilakukan dengan sering mereka menunda pembayaran listrik setiap bulannya. Alasan yang sering dikemukakan adalah bahwa arus listrik sering padam dalam waktu lama, yang menyebabkan mereka akan segera menutup kios masing-masing. Apabila listrik padam suasana pasar menjadi gelap gulita, sehingga mereka memutuskan untuk menutup kios. Dengan sendirinya penghasilan yang mereka peroleh menjadi berkurang dibandingkan saat listrik tidak padam. Alasan tersebut dijadikan "senjata" apabila mereka menunggak pembayaran rekening listrik. Namun sebenarnya ada alasan lain yang menyebabkan mereka bertindak seperti itu, mereka merasa sayang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk melunasi rekening listrik padahal keuntungan yang mereka peroleh sangat sedikit atau bahkan merugi.

Dalam hal yang berhubungan dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan, mengesankan banyak di antara pedagang yang belum memahami arti pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat luas. Sebagai contoh di blok pakaian sering terlihat penempatan barang dagangan yang melebihi kapasitas kios, sehingga mengakibatkan semakin sempitnya lorong untuk berjalan serta keadaan pasar menjadi semakin sesak. Begitu pula di bagian penjualan sayuran dan daging/ikan terlihat banyak timbunan sampah organik yang berasal dari sisa-sisa sayuran busuk serta air bekas untuk menyiram daging/ikan yang dapat menyebabkan jalan pada lorong-lorong menjadi licin serta menimbulkan bau yang tidak enak. Demikian pula halnya pedagang nasi yang membuang sisa-sisa makanan maupun minuman secara sembarangan atau mencuci peralatan makan di dekat kios semakin menambah kotor dan kumuhnya lingkungan pasar.

Melihat kenyataan tersebut dapat dikatakan, bahwa mereka yang terlibat

dalam kegiatan pasar belum bisa secara teratur menjalankan disiplin sebagai usaha menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Kebiasaan membuang sampah secara sembarangan atau membiarkan sampah teronggok di sudut-sudut pasar tanpa dimasukkan ke dalam tempat sampah menunjukkan kurangnya perhatian mereka pada peraturan yang dibuat. Keadaan ini semakin buruk dengan tidak tersedianya fasilitas yang dianggap vital, seperti air bersih, tempat sampah, dan lain-lain. Masalah tersebut akan terus berlangsung karena sistem pengawasan dan pengendalian sosial yang seharusnya dilakukan oleh aparat petugas tidak berjalan dengan semestinya, sehingga para pedagang cenderung bertindak sesuka mereka.

Kawasan Pasar Proyek.

Kawasan pasar proyek terletak di samping pasar Inpres dan pasar Swalayan yang juga diapit jalan raya. Pasar ini dibangun bertingkat tiga yang juga dibagi menjadi kios-kios, sebagian besar ditempati oleh pedagang kelas menengah yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari dari bahan pokok sampai perhiasan dan barang-barang elektronik. Oleh sebab itu harga sewa kios pun lebih mahal. Dalam kawasan pasar ini baik sarana maupun prasarana sudah setingkat lebih baik dibandingkan dengan kawasan pasar Inpres, seperti tersedianya bak-bak sampah, telepon umum, kamar mandi umum, dan lain-lain. Walaupun di sana-sini masih terlihat sampah berceceran, tetapi tidak sebanyak di pasar Inpres. di bagian depan yang berhadapan pusat perbelanjaan Atrium disediakan fasilitas tempat parkir untuk sepeda motor dan mobil, yang mana fasilitas tersebut merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh setiap pusat pertokoan.

Pengunjung yang datang ke kawasan pasar ini kebanyakan berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas yang ingin mencari barang-barang impor dengan harga murah yang dibawa oleh Kapal Tampomas dari Singapura ke pelabuhan Tanjung Priok. Konon kabarnya di lokasi inilah banyak ditemui barang selundupan yang dijual secara bebas dengan harga yang cukup murah, seperti jam tangan, ikat pinggang, pakaian jadi, dan sebagainya. Barang-barang tersebut merupakan incaran para pengusaha atau pemilik toko yang nantinya akan menjual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan mereka yang memiliki taraf ekonomi rendah juga datang ke kawasan pasar ini walaupun hanya sekedar melihat barang-barang yang dijual. Lazimnya sebuah pasar selalu dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai kalangan, bukan hanya khusus diperuntukan bagi satu

golongan saja yang sifatnya eksklusif.

Di samping itu di kawasan ini banyak berkeliaran penjual barang-barang yang tergolong mewah, seperti jam yang dijajakan dengan cara menawarkan kepada mereka yang sedang lewat atau makan di kawasan tersebut. Tak jarang mereka dalam menawarkan barang dagangannya sedikit memaksa dan hal tersebut membuat calon pembelinya merasa takut.

Sarana dan prasarana yang disediakan di kawasan ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, walaupun terkadang secara berlebihan atau sebaliknya ada yang belum dimanfaatkan semaksimal mungkin. Misalnya beberapa tempat sampah sudah banyak yang terisi bahkan melebihi kapasitas, sehingga banyak sampah yang tercecer. Sedangkan pada tempat sampah yang lain tidak dimanfaatkan atau tampak kosong sama sekali. Demikian pula sering terlihat orang menggunakan sarana telepon umum tidak dengan semestinya, misalnya memukul alat telepon agar uang logam yang sudah masuk dapat dikeluarkan lagi, yang menyebabkan telepon cepat rusak. Para pengunjung yang menggunakan tangga berjalan (eskalator) juga belum dapat secara teratur dan penuh disiplin menjaga fasilitas untuk kepentingan umum tersebut. Kerap terlihat orang yang naik tangga berjalan tanpa mengindahkan peraturan, bahkan anak-anak sambil bersenda gurau menaiki pegangan (ban) tangga berjalan itu yang di samping sangat membayakannya juga dapat merusak fasilitas tersebut. Semua tindakan yang dilakukan menunjukkan baik pedagang maupun masyarakat pemakai jasa belum dapat secara tertib dan disiplin menggunakan sarana serta prasarana yang disediakan. Demikian pula pengawasan dan peringatan tidak diberlakukan secara ketat oleh aparat petugas yang berwenang.

Kawasan pasar swalayan

Jenis pasar ini terdapat pada dua lokasi, yaitu di samping pasar proyek tepatnya dekat perempatan Senen yang terdiri dari Matahari Dept. Store dan Cahaya Dept. Store, serta yang berlokasi di Plaza Atrium yang berada di daerah Segitiga Senen. Bentuk fisik bangunan pasar swalayan ini jauh berbeda dengan kedua pasar yang disebutkan sebelumnya. Pasar swalayan dibangun dengan menempati gedung yang megah dan bersih, antara lain lantai dan dinding yang terbuat dari porselin yang mengkilat, dipasang beberapa buah kaca, serta peletakan barang-barang dagangan yang teratur dan rapi. Begitu pula untuk menciptakan kebersihan dan kenyamanan berbelanja disediakan

fasilitas yang memadai, seperti tempat sampah, alat pendingin ruangan (AC), telepon umum, kamar mandi umum (*toilet*), tangga berjalan (eskalator), dan lain-lain. Beberapa petugas pembersih ruangan (*cleaning service*) hampir setiap saat menjalankan pekerjaan mereka menyapu lantai dari sampah, mengelap kaca agar tetap mengkilat, membersihkan kamar mandi, dan sebagainya. Sedangkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban beberapa petugas keamanan terlihat berada di mana-mana, sehingga sulit bagi pemilik "tangan jahil" mengambil barang-barang milik pembeli atau barang-barang yang dijual.

Pasar jenis ini biasanya mempekerjakan pegawai-pegawai, terutama penjaga stand dan kasir, dengan syarat pendidikan yang dimiliki minimal tamat SLTA. Dengan demikian diharapkan mereka dapat melayani pembeli sebaik mungkin serta menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Begitu pula rata-rata mereka yang bekerja di pasar swalayan ini sebelumnya telah diwajibkan mengikuti suatu tes tertulis maupun lisan serta wajib mematuhi perjanjian (kontrak) kerja dengan perusahaan, sehingga harus mentaati segala peraturan yang diberlakukan. Bagi mereka yang melanggar peraturan biasanya dikenakan peringatan, bahkan dikuatkan oleh sanksi pemecatan atau PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Kepada mereka juga diberikan bekal dalam melayani pembeli semaksimal mungkin, sesuai dengan ungkapan bahwa "pembeli adalah raja". Mereka pun harus taat bertindak tegas apabila ada seorang pengunjung yang melanggar peraturan dalam bentuk memberi teguran dengan cara yang sopan, sehingga tidak jarang membuat pengunjung yang bersangkutan merasa segan dan malu, karena teguran yang bagaimana pun halusnyapun dapat menyinggung harga diri seseorang.

Penataan ruangan dan barang-barang yang dijual terlihat sangat artistik dengan menonjolkan unsur estetika, yang dapat menarik minat pengunjung untuk membeli barang-barang yang dijual atau hanya sekedar melihat-lihat. Dengan demikian setiap individu yang datang mengunjungi pasar ini akan merasa betah, dan tak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk membeli barang-barang apa saja yang dijual.

Seperti layaknya tempat jual beli meskipun berada di dalam gedung mewah dengan fasilitas lengkap, pasar ini dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai kalangan dengan tingkat disiplin yang berbeda. Dengan adanya fasilitas yang tersedia, petugas pengawas, maupun larangan-larangan yang tertulis mau tidak mau para pengunjung dituntut kedisiplinannya agar tidak mendapat teguran atau sanksi yang dapat membuat malu dimuka umum.

Mereka seolah-olah "dipaksa" harus mentaati segala peraturan yang diberlakukan. Hal inilah yang membuat kawasan pasar tersebut tampak selalu bersih dan teratur. Meskipun demikian disana sini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran kecil, seperti merokok di dalam lift, yang tampaknya lepas dari pengawasan petugas.

Berdasarkan uraian mengenai keadaan pasar-pasar dilokasi penelitian, terlihatlah bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat dilingkungan pasar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kelengkapan fasilitas yang tersedia, bentuk fisik bangunan pasar, tingkat pendidikan individu-individu yang terlibat dalam kegiatan pasar, adanya peraturan-peraturan yang diberlakukan secara ketat, serta peranan aparat petugas yang setiap saat dapat memberi teguran atau sanksi kepada pelanggar. Disamping itu secara psikologis juga menyangkut harga diri seseorang yang dapat menimbulkan rasa malu apabila kedapatan melakukan pelanggaran. Ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa disiplin dilingkungan pasar dapat berjalan baik apabila lokasi pasar berada dalam gedung yang megah dan bersih dengan ditunjang fasilitas lengkap, yang membuat pengunjung merasa segan dan tidak enak apabila sampai mengotori tempat-tempat itu atau merusak fasilitas yang tersedia.

Tingkat pendidikan individu-individu yang terlibat dalam kegiatan pasar juga mempengaruhi tingkat kedisiplinan mereka, walaupun hal tersebut bukan merupakan faktor yang mutlak. Akan tetapi setidaknya-tidaknya mereka yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi dapat mengerti dan memahami pentingnya suatu tindakan disiplin, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan demikian mereka dapat memberi contoh yang baik kepada mereka yang belum dapat berdisiplin dalam menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Berbeda dengan keadaan pasar yang tampak kotor dan kumuh, ada kecenderungan masyarakat yang terlibat di dalamnya terkondisi menambah kekotoran dan kekumuhan lingkungannya. Dalam setiap tindakan mereka mencari cara yang termudah, misalnya membuang atau menimbun sampah secara sembarangan yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan. Tidak ada teguran atau sanksi yang dikenakan oleh aparat petugas, karena petugas sendiri mengalami kesulitan untuk mengatasi masalah sampah di pasar ini. Pada akhirnya mereka membiarkan tindakan tersebut sejauh tidak menimbulkan keonaran. Tampaknya masyarakat memiliki suatu anggapan, bahwa "yang

namanya pasar, pasti kotor”.

Penanganan sampah yang dihasilkan oleh lingkungan pasar dikelola oleh PD Pasar Jaya Senen dengan melaksanakan pengangkutan sampah dari pasar Senen menuju ke transfer station atau LPA (Lokasi Pembuangan Akhir) yang telah ditentukan oleh dinas Kebersihan DKI Jakarta. Pengangkutan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengotori jalan-jalan yang dilalui. Jenis sampah yang dihasilkan ada dua jenis, yaitu sampah yang sifatnya organik yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan sebesar 75% dan sampah yang sifatnya anorganik yang meliputi plastik, plat, kertas berlapis (anti bocor) sebesar 25%. Untuk mengatasi sampah tersebut disediakan sarana-sarana seperti sapu, pengki, keranjang dan container yang berkapasitas 13 m³. Jumlah kontainer yang disediakan di lokasi ini sebanyak tiga buah, sehingga setiap hari sampah yang terkumpul 39m³.

Para pedagang sayuran mengumpulkan sampah pada tempat yang telah ditentukan, diletakkan dalam keranjang atau ditumpuk di sudut kios. Sebelum kios-kios dan toko-toko dibuka kira-kira jam 06.00 - 09.00, oleh petugas kebersihan yang berjumlah 26 orang sampah tersebut dibersihkan dengan menyapu areal yang luasnya 23.000 M². Selanjutnya sampah dikumpulkan dalam bak penampungan sampah (container) yang kemudian dilanjutkan pembuangannya ke tempat yang telah ditentukan. Untuk menghemat tenaga, maka petugas yang banyaknya 26 orang tadi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama bertugas dari jam 06.00-16.00, dan dilanjutkan oleh kelompok berikutnya dari jam 16.00-21.00. Sampah-sampah tersebut pada jam 07.00, 11.00 dan 16.00 dibawa oleh truk angkutan sampah menuju Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) di Bantar Gebang, Jakarta Timur.

4.2. DISIPLIN DI LINGKUNGAN TERMINAL

Terminal merupakan sarana umum yang sangat penting artinya dalam menunjang kelancaran arus lalu lintas dan kegiatan ekonomi dalam perkotaan. Tanpa adanya terminal yang dibangun pada tempat-tempat kegiatan ekonomi masyarakat akan membuat keadaan semakin tidak teratur, seperti kemacetan lalu lintas.

Di lokasi penelitian terdapat sebuah terminal yang dilengkapi dengan berbagai sarana, antara lain tempat pemberhentian (shelter) bis, sebuah WC umum, kantin, serta menara pengawas yang terletak berdekatan dengan pos

polisi. Terminal tersebut terletak antara daerah pemukiman penduduk dan pasar. Semula terminal ini dikhususkan hanya untuk kendaraan umum jenis oplet, akan tetapi sekarang berbagai macam kendaraan umum seperti bus, metromini, dan mikrolet juga masuk ke terminal. Oleh sebab itu kapasitas terminal sudah tidak cukup menampung banyaknya kendaraan umum yang masuk, padahal diberlakukan peraturan mengenai pembatasan jumlah kendaraan umum yang boleh memasuki terminal.

Pelanggaran terhadap salah satu peraturan yang diberlakukan menyebabkan pelanggaran pada peraturan-peraturan yang lain, terutama dalam hal pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Tempat pemberhentian (shelter) bis misalnya, tidak berfungsi lagi sebagai tempat para calon penumpang menunggu kendaraan umum, karena telah dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang kaki lima menggelar barang-barang dagangan mereka. Dengan sendirinya penumpang enggan menunggu kendaraan umum di sana, tetapi justru berdiri di sepanjang jalan, bahkan ada yang sampai ke tengah jalan agar mudah berebut tempat duduk dengan penumpang bis yang lain. Arus calon penumpang tersebut sangat mengganggu kelancaran lalu lintas, sebab para pengemudi kendaraan bermotor harus perlahan-lahan menjalankan kendaraan mereka kalau tidak ingin menabrak salah seorang calon penumpang kendaraan umum.

Begitu pula kendaraan-kendaraan umum menaikkan dan menurunkan penumpang bukan pada tempat pemberhentian, tetapi di sepanjang jalan di mana banyak penumpang menunggu kendaraan umum. Para pengemudi kendaraan umum pun dengan seenaknya memberhentikan kendaraan, misalnya yang tadinya berada di jalur tengah secara tiba-tiba pindah ke jalur kiri tanpa memberi tanda pindah jalur, karena pengemudi melihat seorang atau beberapa orang calon penumpang memberhentikan kendaraannya. Sudah barang tentu tindakannya itu membingungkan kendaraan-kendaraan lain yang berada di belakangnya, yang menyebabkan timbulnya kemacetan atau bahkan tabrakan. Apabila ada petugas yang berwajib melihat kejadian tersebut, dia akan segera menindak pengemudi kendaraan umum itu dengan memberi peringatan atau menahan SIM-nya, akan tetapi yang lebih sering terlihat tidak ada petugas yang berjaga di sana. Sekalipun ada seorang petugas atau lebih, mereka cenderung mendiamkan saja perbuatan para pengemudi kendaraan umum yang ugal-ugalan sejauh tidak mencelakakan orang lain, karena mereka merasa bosan memberi peringatan yang diterima sambil lalu saja. Para pengemudi pun sangat pandai melihat situasi, dalam arti jika tidak ada petugas mereka dengan

seenaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kurangnya pengawasan dan tindakan tegas yang dilakukan aparat petugas menyebabkan pengemudi-pengemudi kendaraan umum tidak jera melakukan pelanggaran yang sebenarnya sangat menguntungkan mereka, seperti menaikkan penumpang di tengah jalan atau mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan, sebab dengan semakin banyak penumpang yang diangkut mereka dapat memenuhi kewajiban membayar uang setoran kepada pemilik kendaraan.

Ketidakteraturan juga terlihat pada pintu masuk terminal, dimana banyak pedagang kaki lima dan gerobak dorong yang menggelar barang-barang dagangan di tempat pejalan kaki (trottoir) yang sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas kendaraan angkutan yang masuk dan keluar. Keberadaan dan kegiatan mereka semakin mempersempit areal terminal yang pada dasarnya memang sudah tidak memenuhi syarat itu, dan mereka itu pada umumnya sangat sulit dibina. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang petugas, bahwa pedagang kaki lima dan asongan (seperti penjual es, koran, rokok eceran, atau minuman) maupun yang memakai gerobak dorong sangat sulit ditertibkan. Apabila diadakan pembersihan di lingkungan terminal mereka lari ke pasar Inpres, dan akan kembali lagi setelah penertiban dihentikan. Hal ini berlangsung secara terus-menerus, sehingga membuat petugas Kamtib terkadang bosan untuk mengadakan penertiban.

Adanya kios-kios pedagang nasi di sisi kiri pintu masuk terminal yang merupakan kios resmi, apabila dilihat fungsinya memang sangat menguntungkan tidak saja bagi penjualnya tetapi juga para pemakai jasa terminal tersebut. Hal ini tidak akan menjadi perhatian apabila para pedagang nasi tersebut memperhatikan segi kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah dan sisa-sisa makanan serta mencuci peralatan makan secara sembarangan. Tetapi sebaliknya yang dilakukan mereka bahkan semakin menambah kotornya lingkungan yang disebabkan mereka tidak disiplin untuk membuang sampah hasil usaha yang mereka jalankan, misalnya membuang sisa nasi maupun air minum di depan atau di samping kios mereka. Hasil pembuangan atau limbah dari warung-warung mereka menimbulkan bau yang tidak enak serta jalan di sekitarnya menjadi becek. Apalagi kalau hujan turun menjadikan air tergenang yang disebabkan menumpuknya kotoran-kotoran pada beberapa tempat. memang kebanyakan para pedagang tidak menyediakan tempat sampah yang memadai, serta sudah menjadi kebiasaan mereka membuang sampah bekas makanan maupun air bekas cucian didepan ataupun

disamping kios masing-masing sebenarnya mereka menyadari bahwa perbuatan mereka itu dapat merusak dan mengotori lingkungan, namun mereka tidak dapat berbuat banyak karena lingkungan terminal sendiri sudah terkondisi selalu kotor sebagai akibat ulah orang-orang yang kurang disiplin dan bertanggung jawab. Dengan sendirinya mereka terbawa oleh kebiasaan orang-orang yang terlibat kegiatan di dalam terminal untuk bertindak yang menyalahi peraturan. Di samping itu para pedagang sendiri selalu bertindak yang serba praktis dan cepat, seperti membuang sampah di sekitar warung tanpa harus bersusah-susah berjalan ke tempat sampah yang jaraknya cukup jauh dari warung mereka.

Kebutuhan akan air bersih di lingkungan terminal tampaknya juga kurang mendapatkan perhatian dari pihak pengelola, terbukti dengan disediakan hanya sebuah WC umum untuk melayani beratus-ratus bahkan beribu-ribu orang yang silih berganti datang ke tempat tersebut. Kurangnya sarana air bersih ini sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat yang memanfaatkan terminal sebagai tempat berteduh, terutama para tunawisma, pedagang asongan, atau sopir-sopir kendaraan umum yang tidak sempat pulang ke rumah. Mereka menggunakan WC umum tersebut untuk mandi dan buang air setiap hari secara gratis walaupun harus mengantri. Oleh itu sebab tidak mengherankan apabila setiap pagi terlihat banyak orang yang berwajah kusam dan bau tubuh yang menyengat disebabkan karena mereka belum sempat mandi maupun karena baju mereka belum sempat dicuci.

Kehadiran petugas keamanan untuk mengatur situasi sehari-hari di kawasan terminal sangat diperlukan. Tetapi yang sering terlihat para petugas keamanan belum menjalankan tugas dan kewajiban mereka semaksimal mungkin, dan hanya petugas yang berada di menara pengawas yang secara aktif mengatur keluar masuknya kendaraan-kendaraan umum. Meskipun demikian masih ada saja pengemudi kendaraan umum yang tidak mengindahkan perintah para petugas, misalnya saja walaupun petugas sudah memerintahkan untuk segera berangkat, tetapi sopir enggan mematuhi perintah itu dengan alasan menunggu penumpang sampai penuh. Ketidak patuhan para pengemudi kendaraan umum ini tidak jarang menimbulkan kegusaran petugas yang pada akhirnya menindak dengan tegas pengemudi-pengemudi yang dianggap membandel. Namun sejauh ini tindakan yang diambil oleh petugas masih tahap yang wajar, dalam arti belum sampai menimbulkan kemarahan pengemudi-pengemudi yang berakhir dengan bentrokan fisik.

Kemacetan juga terjadi pada pintu masuk terminal yang disebabkan banyaknya pedagang maupun pemakai jasa angkutan hilir mudik atau berdiri secara bergerombol, sehingga memperlambat arus kendaraan angkutan yang akan masuk terminal. Penuh sesaknya orang yang bergerombol atau berlalu-lalang sangat menguntungkan pihak lain untuk melancarkan aksinya dengan mudah. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila ada orang yang kehilangan atau kecopetan. Namun peristiwa ini sudah jarang terjadi semenjak digalakkannya penertiban pada tempat-tempat yang dianggap rawan dengan menurunkan sejumlah petugas polisi yang bermarkas di wilayah tersebut untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Mereka yang tertangkap sedang melakukan tindakan kriminal akan dijatuhi hukuman penjara selama beberapa waktu.

Kendaraan-kendaraan bermotor yang keluar-masuk pusat perbelanjaan atau pasar juga dapat menimbulkan kemacetan. Pada jalan keluar dari pusat perbelanjaan banyak bis yang berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, sehingga kendaraan-kendaraan yang akan menuju jalan raya menjadi terhambat. Mobil-mobil yang akan keluar pusat perbelanjaan tidak diatur sedemikian rupa, tetapi secara beriringan keluar menuju jalan raya sehingga kendaraan-kendaraan lain yang sudah berada di jalan raya terpaksa berhenti menunggu iringan-iringan mobil yang keluar. Demikian pula kendaraan-kendaraan yang akan memasuki wilayah perparkiran pusat perbelanjaan tidak dapat lancar, karena jalan masuk menuju tempat itu terhambat oleh kendaraan umum yang berhenti atau calon penumpang yang menunggu kendaraan umum. Dengan sendirinya mereka yang akan menuju ke pusat perbelanjaan harus menunggu beberapa saat untuk dapat memasuki kawasan itu diikuti oleh kendaraan-kendaraan lain di belakangnya.

Adanya rel kereta api yang melintasi kawasan ini semakin menambah ketidak teraturan arus lalu lintas. Tidak jarang sebuah kereta api yang berhenti beberapa gerbongnya masih berada di tengah pintu lintasan, yang mengakibatkan kendaraan-kendaraan lain harus menunggu cukup lama sampai seluruh gerbongnya memasuki stasiun. Demikian pula lintasan kereta api berada dekat dengan lampu pengatur lalu lintas, sehingga kendaraan-kendaraan yang terhenti karena lampu merah harus berhenti lagi jika ada kereta api lewat. Sementara menunggu kereta yang lewat antrian kendaraan-kendaraan bermotor semakin panjang. Ketidakteraturan ini semakin parah dengan kelakuan pengemudi-pengemudi kendaraan umum atau pribadi yang saling mendahului karena ingin segera tiba di tujuan masing-masing.

Kebersihan lingkungan terminal juga sangat memperhatikan, yang ditandai dengan tidak berfungsinya tempat-tempat sampah yang telah disediakan. Mereka yang berada di dalam terminal belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas tersebut, bahkan sering terjadi bak sampah tetap kosong. Namun bak sampah yang berdekatan dengan pasar Inpres selalu penuh karena dimanfaatkan oleh para pedagang, yang justru mengotori lingkungan dengan adanya sampah yang tercecer. Selain itu penduduk yang bermukim di sekitar terminal menggunakan fasilitas yang berada di terminal, terutama tempat sampah untuk membuang limbah keluarga. Biasanya hal tersebut dilakukan pada malam hari secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari petugas, karena bagi mereka yang ketahuan akan dikenakan sanksi.

Sanksi juga diberlakukan terhadap pengemudi-pengemudi kendaraan umum yang melakukan pelanggaran. Seorang pengemudi yang kedapatan membuang sampah sembarangan diharuskan menyapu tempat di sekitar dia membuang sampahnya seluas 21 m², dan diminta SIMnya untuk satu jam tidak diperbolehkan mengemudikan kendaraannya. Sedangkan apabila mereka melanggar peraturan lalu lintas, petugas yang berwenang akan menahan SIM (ditilang) sampai mereka disidangkan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Akan tetapi sering terjadi pengemudi yang melanggar dapat dibebaskan dan dikembalikan SIM-nya setelah memberi sejumlah uang (istilahnya "uang damai") kepada petugas.

Suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas adalah setiap pagi semua kendaraan umum harus memasuki terminal untuk mengangkut penumpang, tetapi tidak dibolehkan berhenti (ngetem) terlalu lama. Di dalam terminal tidak diperkenankan ada dua kendaraan umum atau lebih yang rutanya sama. Apabila hal itu terjadi, maka kendaraan yang sudah lebih dulu masuk terminal harus segera diberangkatkan. Hal ini untuk menghindari terhambatnya arus lalu lintas karena banyak kendaraan umum yang akan masuk terminal harus menunggu beberapa saat sampai kendaraan yang berada di depan diberangkatkan. Para pengemudi kendaraan umum tidak boleh terlalu lama mencari penumpang di dalam terminal, mereka dapat menaikkan penumpang pada tempat-tempat pemberhentian di sepanjang rute yang mereka lalui.

4.3. DISIPLIN DI LINGKUNGAN TEMPAT HIBURAN.

Hiburan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kejenuhan dari segala rutinitas hidup. Berbagai bentuk hiburan disajikan kepada masyarakat luas, salah satu di antaranya adalah gedung bioskop. Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi sangat memungkinkan berkembangnya usaha gedung-gedung bioskop dalam segala tingkatan, mulai dari tingkat yang sederhana dan murah sampai yang mewah dengan harga tanda masuk mahal. Masyarakat luas tetap mendambakan kehadiran gedung-gedung bioskop, walaupun saat ini keberadaannya bersaing dengan kehadiran film-film yang ditayangkan di layar kaca (televisi) dengan beberapa saluran.

Pada umumnya gedung-gedung bioskop di Jakarta dapat digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu bioskop kelas bawah, menengah, dan atas. Penggolongan tersebut didasarkan pada penerapan peraturan yang diberlakukan pada masing-masing gedung bioskop serta tingkat kedisiplinan dalam menjalankan peraturan-peraturan tersebut yang dilakukan oleh pengusaha maupun pemakai jasa hiburan. Pada gedung bioskop yang kelihatan kotor dan kumuh masyarakat pemakai jasa cenderung enggan mematuhi peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sebaliknya pada gedung bioskop yang dibangun dengan mewah dan bersih, para penonton mau tidak mau dengan penuh disiplin menjalankan semua peraturan yang diberlakukan. Peraturan yang lazim diberlakukan pada gedung-gedung bioskop, antara lain dilarang merokok selama pemutaran film berlangsung, tidak boleh menaikkan kaki pada deretan kursi yang ada di depan, serta tidak diperkenankan berteriak atau membuat keonaran di dalam gedung. Biasanya peraturan-peraturan itu terbaca pada layar dalam bentuk slide yang diselingi dengan iklan.

Tidak semua gedung bioskop memberlakukan peraturan, karena hal itu dianggap merampas kebebasan penonton yang telah mengeluarkan biaya untuk memperoleh hiburan. Larangan merokok misalnya, dapat menyebabkan penonton yang biasa merokok menjadi tersiksa selama pemutaran film berlangsung. Padahal mereka dapat bebas merokok sambil menikmati film jika menonton pada gedung bioskop yang murah walaupun film-film yang diputar sudah lama beredar. Sebaliknya dengan adanya peraturan itu memberi suatu kenyamanan menonton kepada mereka yang tidak suka merokok. Oleh sebab itu mereka memilih gedung bioskop di mana peraturan tersebut harus

ditaati oleh penonton, walaupun harus membeli tanda masuk yang harganya lebih mahal.

Masyarakat memiliki kecenderungan menonton film tergantung pada selera masing-masing. Sementara orang memilih gedung bioskop yang mewah dan mahal untuk mendapatkan kenyamanan menonton yang bebas dari polusi asap rokok, udara sejuk yang dihasilkan dari alat pendingin ruangan, serta kebersihan yang selalu terjaga. Sebaliknya ada yang gemar menonton film di gedung bioskop yang murah asalkan mereka dapat bebas bertindak apa saja, seperti merokok, duduk sambil menaikkan kaki, berteriak jika film yang disaksikan menegangkan, dan sebagainya. Menonton dengan bebas dari segala peraturan itulah yang merupakan kenyamanan tersendiri bagi para penonton.

Pada lokasi penelitian terdapat tiga buah gedung bioskop yang dapat dikategorikan atas ketiga golongan kelas seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Penggolongan tersebut didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain bangunan fisik gedung, harga tanda masuk, kelengkapan fasilitas yang tersedia, kenyamanan yang dapat diberikan kepada penonton, serta besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemilik gedung bioskop. Semakin mewah keberadaan sebuah gedung bioskop akan semakin tinggi pajak yang dikenakan, dan dengan sendirinya harga tanda masuk juga menjadi mahal. Ketiga gedung bioskop yang ada di lokasi penelitian ditinjau dari tingkat kedisiplinan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

Bioskop kelas bawah

Lokasi gedung bioskop ini terletak pada sudut perempatan jalan. Keadaan fisik bangunannya tampak kotor dan tidak terawat, terlihat dari warna cat temboknya yang sudah suram, lingkungan yang tidak pernah bersih dari sampah, serta banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak berdagang di depannya. Kondisi di dalam gedung pun mengesankan kurang terawat meskipun selalu dibersihkan setiap hari. Kursi-kursi yang ada kebanyakan sudah robek atau hancur, demikian pula lantai dan dindingnya tampak kotor, serta tidak tersedia tempat sampah.

Berbicara mengenai peraturan, di gedung bioskop *Grand* tidak diberlakukan peraturan yang ketat selain penonton diharuskan membeli tanda masuk. Hal ini mungkin telah direncanakan oleh pemilik gedung untuk menarik penonton yang ingin menyaksikan pemutaran film tanpa harus terikat oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu selama pertunjukan film berlangsung penonton dapat bebas merokok karena tidak ada alat pendingin

ruangan, duduk sambil menaikkan kaki, atau berteriak sebagai tanda protes manakala film terlambat diputar atau terhenti pemutarannya disebabkan gangguan teknis.

Pada gedung bioskop ini berlaku waktu istirahat (**time out**) yang lamanya kira-kira 30 menit. Hal ini memberi kesempatan kepada pedagang-pedagang asongan memasuki gedung untuk menjajakan makanan, minuman atau rokok kepada penonton yang malas keluar. Dengan demikian penonton dapat bebas makan minum di dalam ruangan, yang mana bekas-bekas makanan dan minuman tersebut akan dibuang atau ditinggalkan begitu saja di lantai. Oleh sebab itu apabila kita menyaksikan film pada pemutaran berikutnya, sering terlihat tumpahan air minum, sisa-sisa makanan, serta puntung rokok di lantai atau pada kursi.

Bioskop Kelas Menengah.

Gedung bioskop ini berada tepat di belakang bioskop tersebut di atas. Kondisi gedung bioskop ini setingkat lebih baik dibandingkan dengan gedung bioskop "grand", dalam arti fasilitas yang disediakan lebih lengkap seperti tempat parkir yang cukup luas, tempat permaian "dingdong", kantin, serta kamar kecil yang cukup bersih. Secara keseluruhan gedung bioskop "Mulia Agung" ini terbagi atas tiga gedung dengan kapasitas penonton terbatas, yang disebut dengan Teater I, Teater II, dan Teater III.

Pada masing-masing teater dilengkapi dengan alat pendingin ruangan, kursi-kursi penonton yang tampak terawat walaupun ada beberapa yang sudah rusak, yang kesemuanya dapat memberi kenyamanan kepada penonton. Larangan merokok hanya diberlakukan saat memasuki gedung bioskop, akan tetapi beberapa orang tetap saja terlihat merokok saat pemutaran film berlangsung karena tidak ada peraturan mengenai hal itu yang terbaca pada layar. Di samping itu masih terlihat beberapa penonton duduk sambil menaikkan kaki pada deretan kursi di depannya atau makan dan minum di dalam ruangan yang lantainya tidak berkarpet. Meskipun tidak diberlakukan larangan secara ketat, menonton di gedung bioskop ini terasa cukup nyaman tanpa ada suara-suara gaduh penonton, udara di dalam ruangan yang terasa sejuk, kursi yang cukup empuk, serta kadar polusi dari asap rokok yang tidak terlalu berat.

Bioskop Kelas Atas

Dengan berlokasi di dalam pusat perbelanjaan Atrium Plaza, gedung bioskop ini tergolong mewah yang termasuk salah satu bagian dari kelompok gedung bioskop "twenty One" (21). Keberadaan jenis gedung bioskop ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan dan ketertiban menonton, seperti tempat sampah, alat pendingin ruangan, kursi penonton yang empuk dan nyaman, lantai yang diberi penutup (karpet), kamar kecil yang bersih, serta penataan ruangan yang tampak asri. Dengan demikian harga tanda masuk yang dijual pun relatif tinggi, yang mungkin hanya terjangkau oleh golongan ekonomi menengah ke atas.

Ketertiban dan kenyamanan menonton akan lebih terjamin dengan diberlakukannya seperangkat peraturan yang mengikat. Selama pertunjukan film berlangsung para penonton tidak diperkenankan merokok, duduk dengan menaikkan kaki, makan atau minum di dalam ruangan, serta menimbulkan suara gaduh. Semua peraturan tersebut dapat dibaca di dalam layar, dengan konsekuensi jika ada penonton yang melanggarnya maka pemutaran film akan dihentikan. Demikian pula para petugas tidak segan-segan memberi peringatan kepada penonton yang melanggar peraturan dengan cara mendatangi dan memberi teguran kepada orang yang bersangkutan.

4.4 DISIPLIN DI LINGKUNGAN JALAN RAYA

Jalan raya merupakan prasarana umum yang sangat vital untuk menunjang kelancaran sistem transportasi. Penggunaan prasarana ini sudah barang tentu membutuhkan disiplin yang sangat tinggi, baik dari pemakai jasa maupun para petugas yang berwenang, agar tidak merugikan banyak pihak. Adanya pelanggaran yang dilakukan seseorang, misalnya parkir di tepi jalan raya yang ramai, akan mengakibatkan kelancaran arus lalu lintas terhambat. Prasarana jalan raya merupakan salah satu bagian dari sistem perhubungan, sehingga tidak teraturnya suatu unsur dapat menyebabkan ketidak teraturan pada unsur-unsur sistem yang lain.

Dewasa ini, khususnya di kota besar seperti Jakarta, masalah kemacetan sudah merupakan masalah "klasik". Banyaknya jumlah kendaraan, baik yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas maupun kendaraan milik pribadi, semakin bertambah sehingga prasarana jalan raya yang ada tidak lagi menampung arus kendaraan-kendaraan yang lewat setiap harinya. Dengan lain perkataan, peningkatan kuantitas kendaraan tidak dimbangi dengan peningkatan kuantitas

prasarana jalan raya pula. Keadaan inilah yang menimbulkan berbagai masalah sosial dalam sektor perhubungan, yaitu kemacetan arus lalu lintas. Walaupun sudah diberlakukan berbagai peraturan lalu lintas, seperti penetapan sebuah mobil harus mengangkut minimal tiga orang penumpang (istilahnya three in one) pada jam-jam tertentu di sepanjang jalan utama (protokol), juga belum dapat sepenuhnya mengatasi masalah tersebut. Hal ini disebabkan banyak pengemudi yang mengalihkan kendaraan mereka ke jalan-jalan alternatif yang relatif lebih sempit, sehingga kemacetan akan beralih pada jalan-jalan alternatif tersebut.

Masalah sosial yang ditimbulkan semakin bertambah pelik tanpa ditunjang kedisiplinan para pemakai jalan raya, termasuk para petugas yang berwenang. Hampir setiap hari dapat dijumpai berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan atau pejalan kaki. Mereka yang melakukan pelanggaran biasanya akan mendapat peringatan atau sanksi oleh para petugas, akan tetapi sebaliknya petugas dapat saja membiarkan pelanggaran tersebut apalagi suasana saat itu sangat ramai oleh kendaraan-kendaraan yang tidak teratur. Memang cukup sulit bagi para petugas yang berwajib (Polisi Lalu Lintas atau DLLAJR) mengatasi masalah kemacetan lalu lintas, yang dapat disebabkan jumlah personil yang diturunkan di jalan-jalan raya kurang memadai.

Di lokasi penelitian terdapat prasarana jalan raya yang sangat vital yang menyatu pada perempatan Senen, yaitu jalan Kramat Bunder, Senen Raya, Kramat Raya, dan Kwitang/Prapatan. Jalan-jalan tersebut menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi serta pusat-pusat kegiatan lainnya, seperti Pasar Baru, Glodok, Blok M, dan sebagainya. Juga menghubungkan pusat-pusat industri yang ada di Jakarta, seperti Kawasan Industri Pulo Gadung, serta terminal-terminal berbagai jenis angkutan darat, laut, dan udara. Oleh sebab itu di daerah ini sering terjadi kemacetan arus lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya kendaraan dari berbagai kawasan yang melewati jalan utama tersebut.

Masalah kemacetan lalu lintas semakin bertambah dengan banyaknya pejalan kaki yang menyeberang tidak melalui jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan yang ada kurang dimanfaatkan oleh pejalan-pejalan kaki, sebab letaknya tidak persis di depan pusat-pusat perbelanjaan atau hiburan yang menjadi tujuan sebagian masyarakat yang pergi ke sana. Kalupun mereka

menyeberang jalan dengan melewati jembatan penyeberangan, mereka masih harus menyeberangi lagi jalan perempatan yang sangat ramai dilalui kendaraan. Dalam menyeberang mereka seringkali tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, misalnya saat lampu lalu lintas menunjukkan warna hijau mereka menyeberang secara bergerombol atau dengan memotong arus lalu lintas. Tindakan pejalan-pejalan kaki ini sudah barang tentu sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, karena pengemudi-pengemudi kendaraan bermotor harus memperlambat kecepatan atau berhenti dengan mendadak untuk memberi kesempatan bagi pejalan-pejalan kaki menyeberangi jalan. Bagi para pejalan kaki percuma saja menyeberang lewat jembatan penyeberangan yang letaknya tidak strategis, karena pada akhirnya mereka harus menyeberangi jalan yang ramai untuk menuju ke pusat perbelanjaan atau gedung bioskop.

Pelanggaran jenis lain terutama dilakukan oleh para pengemudi kendaraan bermotor, baik kendaraan umum maupun pribadi, yang kurang atau tidak berdisiplin menjalankan peraturan-peraturan lalu lintas. Banyak terlihat kendaraan umum menaikkan atau menurunkan penumpang bukan pada tempat pemberhentian (shelter) atau di dalam terminal, tetapi di sepanjang jalan raya walau sedang dalam keadaan ramai dan padat sekalipun. Demikian pula kendaraan-kendaraan pribadi yang berhenti di tempat yang ada tanda larangan berhenti untuk menurunkan salah seorang penumpangnya. Tindakan pengemudi-pengemudi tersebut menyebabkan kelancaran arus lalu lintas menjadi terhambat.

Adanya penyempitan jalur jalan dari empat jalur menjadi dua jalur juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Keadaan seperti ini dapat terlihat pada jalur jalan G. Sahari yang menuju ke jalan Selemba Raya. Selain itu kemacetan lalu lintas juga disebabkan adanya lintasan jalan kereta api, yang mana hampir setiap lima menit sekali ada kereta api ataupun hanya lokomotifnya yang lewat.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya akan terus berlangsung apabila dalam diri masyarakat pemakai jasa belum tertanam disiplin untuk mentaati segala peraturan yang diberlakukan. Demikian pula petugas yang berwenang mengatur arus lalu lintas belum semaksimal mungkin mengawasi situasi sehari-hari untuk dapat dicari cara mengatasi sosial yang satu ini. Ada di antara mereka yang cenderung mendiamkan saja apabila terjadi suatu pelanggaran, yang menyebabkan masalah-masalah sosial yang

timbul semakin bertambah pelik.

BAB V

UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT KOTA

5.1 Pembinaan Oleh Pemerintah

Dalam bab ini akan dibicarakan mengenai pembinaan disiplin yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat. Untuk jelasnya kami awali dengan asal kata dari pembinaan, kata pembinaan berasal dari kata bina yang berarti bangun atau bangunan. Dengan demikian pembinaan berarti pembangunan atau pembaharuan (kamus umum Poerwadarminta, 1976 141)

Pengertian tentang pembinaan yang demikian ini dapat pula kami lihat dari suatu tulisan yang mengemukakan sebagai berikut: Pembinaan adalah segala bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong sehingga suatu organisasi dapat tumbuh sehat dan mandiri maupun melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuannya (PP No. 18 tahun 1986).

Kegiatan bimbingan dilakukan dengan cara membirakan saran anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar masyarakat dapat tumbuh serta sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Sedangkan pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pemberian dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan masyarakat atau organisasi masyarakat.

Dari pencatatan dokumentasi data hasil pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, kami sajikan sebagai berikut :

1. Hasta Tertib

. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 tahun 1972 Jo. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 tahun 1977 tentang ketertiban umum dalam wilayah DKI Jakarta, sampai saat ini masih dianggap relevan dan efektif untuk dijadikan sebagai pedoman dasar dalam pembinaan dan ketertiban di wilayah khususnya di wilayah kecamatan Senen dimana tugas-tugas tersebut umumnya banyak berorientasi pada kepada tugas-tugas operasional.

Hasta tertib yang mencakup 8 (delapan) tertib hukum meliputi :

- Tertib Perlistrikan
- Tertib Lalu Lintas
- Tertib Tuna Karya /Wisma /Susila
- Tertib Bangunan
- Tertib Perkeretaapian
- Tertib Banjir
- Tertib Pedagang Kaki Lima
- Tertib Sosial Politik

Dalam perkembangan pelaksanaan tugas sehari-hari patut digarisbawahi bahwa heterogenitas dan kompleksnya masalah, banyak mewarnai pembinaan itu sendiri, terutama yang bersifat internal (seperti terbatasnya personil, kurangnya dukungan sarana dan prasarana) sehingga upaya untuk mengantisipasi dan mendeteksi setiap kejadian atau peristiwa yang timbul atau yang akan timbul sering mengalami hambatan, walaupun akhirnya hambatan demi hambatan dapat terselesaikan.

Hal semacam ini sangat riskan dan mengkhawatirkan bilamana pemenuhan sarana dan prasarana tersebut tidak/kurang mendapat respon positif dari pihak yang berkompeten, karena seluruh tugas pembinaan tersebut banyak mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebatas kemampuan yang ada dan berkat terciptanya koordinasi dinamis dengan Muspika Kecamatan (Polsek dan Koramil) serta instansi terkait, pembinaan ketentraman dan ketertiban berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya sesuai program/sasaran yang telah ditentukan, serta diupayakan secara maksimal tidak ada sasaran yang terlewatkan.

Kegiatan operasional HastaTertib lokasi pembinaan/Kelurahan Senen jumlah kegiatan lalu lintas 28 kali, menurut jenis tuna susila 35 kali, menurut jenis bangunan 34 kali, menurut jenis banjir 3 kali dan menurut jenis kaki lima 110 kali.

2. Ketertiban Masyarakat

Pada umumnya tugas-tugas dibidang ketertiban masyarakat (tibmas) dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, walaupun disadari masih ada hal yang belum terselesaikan. Hal ini dikarenakan belum berfungsinya seluruh aparat penertiban ditingkat kelurahan maupun ditingkat kecamatan.

Koordinasi dengan aparat terkait maupun dengan tingkat atas (instansi di Pemda DKI Jakarta cq Biro Ketertiban) berjalan dengan baik, sehingga setiap perintah baik yang rutin maupun mendadak sifatnya dapat diselesaikan tuntas.

Secara rutin penertiban yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat dan hal ini sudah terjadwalkan antara lain :

- Penertiban terhadap para pedagang kaki lima yang tidak tertib terutama pada jalan-jalan protokol dan lebih khusus lagi pada jalan-jalan yang dikategorikan jalur wisata, ini harus betul-betul bersih dan tertib tanpa kecuali.
- Penertiban terhadap Gelandangan Pengemis (Gepeng) yang menggunakan taman, emperan toko dan jembatan sebagai tempat tidur dan kegiatan lainnya yang dapat merusak dan mengganggu nilai serta estetika wilayah kecamatan Senen.
- Membantu tugas kepolisian dalam memperlancar lalu lintas, karena lalu lintas di wilayah kecamatan Senen intensitasnya cukup tinggi.

2a. Kamtibsihdu (keamanan, ketertiban dan kebersihan terpadu).

Dengan Keputusan Camat Nomor. 001/1989 2 Januari 1989 tugas di bidang keamanan, ketertiban dan kebersihan diintegrasikan operasionalnya dalam rangka menunjang kebersihan dan ketertiban secara menyeluruh. Keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan sebagai alat bantu preventif menanggulangi keamanan, ketertiban dan kebersihan. Komposisi personil Kamtibsihdu dan Koramil yang bertugas sesuai dengan program yang telah ditentukan dan untuk kelancaran tugas operasional. Kamtibsihdu dilengkapi 2 buah kendaraan pick up. Sasaran operasi dan posko Kamtibsihdu di kelurahan Senen dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 16.00. lokasi sarannya adalah pasar Inpres Senen posko III Blok Pasar Inpres.

2b. Penyuluhan Kamtibmas dan Kamtiblancar Lantas

Penegakan disiplin masyarakat khususnya dalam berlalu lintas memerlukan waktu yang lama, namun upaya maksimal telah dilakukan sebagai langkah dini meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, karenanya penyuluhan secara periodik diberikan kepada masyarakat, bis formal maupun informal dengan tenaga pengajar/nara sumber dari kepolisian Sektor Senen.

3. Kriminalitas

Selama tahun 1991/1992 gangguan ketenteraman dan ketertiban secara kuantitas dirasakan menurun, namun secara kualitas nilainya dirasakan meningkat, karena memakai peralatan yang cukup modern. Gangguan ketenteraman dan ketertiban yang terjadi selama tahun 1991/1992 di kelurahan Senen adalah sebagai berikut : Pencurian sebanyak 9 kasus, perampokan 3 kasus, perkelahian 13 kasus, perkosaan 2 kasus, pembunuhan 13 kasus, penggunaan obat terlarang 5 kasus, penganiayaan 12 kasus, jadi jumlah keseluruhan kasus yang terjadi adalah sebanyak 57 kasus.

4. Pertahanan Sipil (Hansip)

Dalam mengemban dan menjabarkan serta melaksanakan kebijaksanaan pemerintah Pusat dan Daerah. Mawil Hansip dalam melaksanakan tugas senantiasa bekerjasama dengan ketertiban kecamatan dan kelurahan Senen terutama dalam penanganan/penertiban pedagang K-5, WTS, Gepeng, Tuna Karya/wisma dan lain sabagainya.

Selain bekerja sama dengan ketertiban kecamatan dan kelurahan Senen koordinasi dinamis selalu dikembangkan ke berbagai instansi terkait, dalam rangka menciptakan mekanisme kerja timbal balik dan sasarannya adalah terciptanya suatu teritorial yang tertib dan aman dengan mengikutsertakan dan menumbuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun pada hakekatnya orientasi tugas bersumber pada kekuatan dan kemauan rakyat, sehingga untuk tumbuh dan berkembang hansip ini, betul-betul harus ditunjang swadaya masyarakat.

Untuk tahun 1991/1992, Mawil hansip kecamatan Senen dalam tugasnya, memprogramkan kepada 3 (tiga) aspek yaitu sebagai berikut :

1. Aspek peningkatan disiplin anggota hansip

Peningkatan disiplin ditempatkan pada skala prioritas pertama, oleh karena disiplin berdampak luas terhadap pembinaan secara menyeluruh, baik pembinaan fisik maupun mental. Dalam kaitan disiplin ini, Mawil Hansip kecamatan senen mengintruksikan agar setiap Satgas dan Satlak secara rutin dan periodik melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Latihan PBB maupun PPM
- b. Gerak Jalan
- c. Pembinaan fisik/olahraga
- d. Penyuluhan/pengarahan

Dalam hal ini sudah tentu anggota hansip dari kelurahan Senen ikut terlibat secara aktif.

2. Aspek peningkatan kemampuan Anggota Hansip.

Untuk meningkatkan kemampuan anggota hansip dalam segala hal Mawil Hansip kecamatan Senen telah mengirimkan anggota Hansip dari kelurahan Senen yang memenuhi persyaratan untuk diikutsertakan dalam pendidikan di RINIFDAM Jaya atau PUSLATRAN Kebakaran DKI Jakarta.

3. Aspek Pembinaan Administrasi

Disadari betapa pentingnya administrasi dalam perumusan suatu kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta memperlancar mekanisme kelancaran tugas. Mawil Hansip kelurahan Senen telah melaksanakan upaya

pembinaan sebagai berikut :

- a. Menghimpun biodata anggota hansip
- b. Menyelesaikan kartu anggota hansip
- c. Membuat daftar nominatif anggota hansip.

Hambatan-hambatan yang ditemui selama tahun 1991/1992, melalui evaluasi yang akurat, beberapa hambatan tersebut bertumpu di sektor Pembinaan Pendidikan dan Administrasi.

Ada beberapa sebab kedua hal tersebut mengalami hambatan antara lain:

a. Sektor Pendidikan

1. Banyak anggota hansip tidak memenuhi persyaratan karena umurnya telah lanjut.
2. Kurangnya minat pemuda/pemudi untuk menjadi hansip.
3. Dukungan kesejahteraan untuk keluarga yang tidak menunjang selama mengikuti pendidikan
4. Banyak anggota hansip yang terkait dengan pekerjaan tetapnya, sehingga sulit minta izin dari atasannya.

b. Sektor Administrasi

1. Kassatgas/Kasatlak banyak yang belum mengerti pentingnya data.
2. Ditemukan banyak anggota Hansip yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya, sehingga Kasatgas dan Kasatlak berkeberatan membuatkan kartu anggota Hansip.

Jumlah anggota hansip, Menwa, Kamra, Pos Kamling di Kelurahan Senen, kecamatan Senen Jakarta Pusat adalah : Hansip 48 orang, Menwa 7 orang, Kamra 61 orang dan Pos Kamling 5 buah.

B. Pembinaan Ideologi Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa

1. Pembinaan eks. Narapidana G 30 S/PKI dan sejenisnya.

Pembinaan kearah percepatan perubahan sikap mental bekas Narapidana

G 30 S/PKI dan terpidana yang semula berorientasi kepada ideologi komunis, untuk segera berubah dan mengakui Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, terus dilaksanakan agar sasaran sebagaimana dikehendaki GBHN dan aplikasinya ditetapkan dalam Inmendagri Nomor 32 tahun 1981 tanggal 22 Agustus 1981, tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Keadaan eks. Narapidana G. 30 S/PKI di kelurahan Senen adalah Golongan B3 orang, Golongan C11 orang, jumlah seluruhnya 14 orang.

2. Pembinaan Organisasi politik dan Orsosmarsinal

Sebagai Administrator Kemasyarakatan, salah satu tugas pokoknya adalah mengadakan pembinaan terhadap seluruh organisasi kemasyarakatan dan orsosmarsinal yang ada di wilayah, karena disadari bahwa disatu sisi organisasi masyarakat tersebut merupakan sarana penyaluran aspirasi rakyat sedangkan disisi lain keberadaan organisasi masyarakat dapat dijadikan dinamisator dan motifator pembangunan nasional

3. Pembinaan Kesatuan bangsa

Pembangunan nasional yang memiliki wawasan dan dimensi di segala bidang, terutama dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa senantiasa mendapat perhatian yang utama, karena erat kaitannya dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya dan hankamnas yang semuanya memiliki nilai strategis.

Di samping itu sebagai mana tersurat dalam keputusan Gubernur KDKI Jakarta nomor 1193 tahun 1982, dibentuk aparat yang membantu kelancaran pembinaan antara lain :

- Kelompok Penggerak Pembauran Lapangan (KPPL).
- Tenaga Pelaksana Pembauran Rt-Rw (TPP. RT-RW)

Kedua organisasi tersebut berada pada garis paling depan dalam mewujudkan pembauran dan terasa nampak hasilnya bilamana diwujudkan dalam beberapa kegiatan positif seperti kegiatan kerja bakti, sosial dan menyatu dalam seni budaya.

C. Penyelenggaraan Koordinasi

1. Koordinasi Muspika

Koordinasi yang selama ini dilakukan dengan Muspika kecamatan Senen (Polsek dan Koramil) berjalan dengan baik dan terpadu. Sekurang-kurangnya 2 bulan sekali rapat koordinasi Muspika yang dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kebersamaan persepsi dalam pembinaan wilayah, selain itu dalam rangka mengevaluasi tugas-tugas yang dapat diselesaikan dan yang belum dapat diselesaikan serta hambatan yang terjadi. Namun dalam hal yang bersifat insidental, rapat koordinasi tidak harus menunggu 2 bulan, tetapi bisa dilakukan setiap saat seperti halnya pembersihan gubug liar, penertiban becak, pedagang K-5 dan lain-lain.

Selama ini koordinasi Muspika dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi masing-masing. Juga dibantu Mawil Hansip Kecamatan Senen dan juga anggota Hansip dari kelurahan Senen sebagai pelaksana di lapangan.

D. Pembinaan Terhadap Perangkap Kecamatan dan Kelurahan

Sekurang-kurangnya 1 minggu sekali pembinaan tersebut dilaksanakan, baik pada apel bendera, apel tiap hari Senin pagi ataupun dalam rangka briefing camat, dalam rangka mengacu kepada satu tujuan agar pelaksanaan pengawasan melekat terhadap bawahan berjalan secara efektif. Dengan efektifnya pengawasan melekat diharapkan seluruh tugas dapat diselesaikan tuntas berkesinambungan serta mekanisme kerja yang teratur/tertib.

Pembinaan ketrampilan/keahlian/pengetahuan para karyawan kecamatan Senen dan kelurahannya, dilakukan melalui pendidikan dan latihan/penataran/kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Propinsi DKI Jakarta dan pendidikan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan disiplin dan pengetahuan serta kemampuan dalam melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing.

E. Pembinaan Lingkungan (Pembangunan Lingkungan)

Pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan Senen meliputi aspek kehidupan masyarakat (ipoleksosbud) oleh pemerintah beserta masyarakat secara terpadu, dititikberatkan pada pelaksanaan proyek rutin dan pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasana pembangunan yang ada.

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih, tertib dan indah, pemerintah dan masyarakat secara terus menerus mengadakan berbagai kegiatan : baik penyuluhan dan penerangan, kerja bakti massal, mengadakan sarana dan prasarana kebersihan serta lomba kebersihan, di samping kegiatan rutin petugas di wilayah.

Program kebersihan merupakan sumber primadona, oleh karena itu semua kegiatan dipacu dan terus diusahakan untuk menciptakan lingkungan bersih.. Untuk itu telah dilaksanakan penyapuan bersih oleh petugas, disediakan tong sampah, truk kebersihan untuk menanggulangi sampah perumahan, pasar, pertokoan, K-5 lima, lumpur dan lain-lain, bak penampungan sampah contener, gerobak sampah, selain itu dibangun MCK umum.

B. Pembinaan Oleh Tokoh Masyarakat

Telah kita ketahui bahwa struktur tingkat pemerintahan terbawah adalah kelurahan dengan penguasa wilayah seorang lurah. Struktur kelurahan mempunyai unsur pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan membentuk wakil lurah, seksi pembangunan, seksi kemasyarakatan dan lain-lain sistem pemerintahan yang telah baku berdasarkan struktur tingkat kelurahan. Kelurahan masih membawahi beberapa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Rukun Tetangga dan Warga ialah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan pelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan kemasyarakatan di desa/kelurahan.

Sebagai organisasi masyarakat pada dasarnya berfungsi menyelenggarakan kepentingan anggotanya, keluarga dan lingkungannya menjadi kesatuan lingkungan hidup yang tentram, tertib, dinamis penuh kreativitas yang produktif, yang penuh ketaqwaan pada Tuha Yang Maha Esa. Dengan demikian Rt/Rw adalah merupakan organisasi masyarakat yang menampung kegiatan-kegiatan secara menyeluruh dan terpadu, dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu untuk mencapai kesatuan bahasa dan tindakan

dalam kegiatannya sesuai dengan fungsi dan peran Rt/Rw juga sebagai pembantu pelaksana pelayanan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Rt/Rw saling menunjang meningkatkan kesejahteraan dalam kesatuan keluarga di lingkungan tertentu. Untuk itu di perlukan adanya kesatuan pengertian dan kebijaksanaan dalam pembinaannya.

Disisi lain, satu kesatuan lingkungan hidup Rt/Rw juga merupakan unit pembinaan dan pengembangan wilayah dalam arti terbatas dan bersifat makro.

Pembinaan yang mengarah terciptanya ke ajegan disiplin yang terlihat jelas pada masyarakat Rw 04 meliputi bidang : keagamaan, kesenian, kesehatan dan keluarga berencana, pembinaan kesejahteraan keluarga, kebersihan dan pendidikan. Untuk lebih jelasnya kita lihat uraian berikut :

Keagamaan. Wilayah Rw 04 yang meliputi 15 (lima belas) RT dengan segala aliran/paham dan agama, tidaklah merupakan kendala untuk mewujudkan kerukunan bermasyarakat, mengingat bahwa mereka mempunyai sandaran hidup berTuhan dan UUD 45 serta Pancasila sebagai landasan hukum.

Pembinaan kehidupan umat beragama di wilayah ini diarahkan kepada kesatuan, kerukunan antar suku, agama, ras dan golongan semua warga tanpa kecuali berkewajiban membangun lingkungan keluarga dan masyarakat dengan satu cita-cita mewujudkan kesatuan bangsa oleh kerukunan beragama.

Berdasarkan pengamatan langsung, kegiatan keagamaan yang relatif mantap di wilayah ini adalah pengajian. Dengan Ustajah Muryani, pengajian berkembang dari tahun-ketahun yang semula di ikuti ibu-ibu di semua RT, kemudian berkembang diikuti anak-anak remaja dan kaum Bapak. Untuk para ibu, pengajian diadakan pada hari rabu dan jum'at pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB dengan menggunakan musala sebagai pusat kegiatan.

Pada hari-hari besar agama antara lain Maulid Nabi ibu Uztadjah aktif memimpin kegiatan, sebagai contoh ceramah, lomba menulis arab. Untuk penceramah didatangkan dari luar lingkungan dari kelurahan atau kecamatan. Pada saat ada Hajatan ibu Uztadjah dipanggil untuk memberikan do'a-do'a atau memimpin pengajian.

Hal yang menarik di wilayah ini adalah bahwa warga masyarakat Non Islam khususnya China memiliki partisipasi amat kuat dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W dan hari besar Islam lainnya. Pada hari besar Maulid Nabi dirumah-rumah warga keturunan China mengadakan selamatan Maulid dengan mengundang para tetangga yang menganut agama Islam maupun agama dan kepercayaan lain.

Kebudayaan dan Kesenian.

Dalam rangka peningkatan seni budaya dimasyarakat Rw 04 kelurahan Senen khususnya di kalangan remaja sangat potensial maka di pandang perlu pola pembinaan yang terpadu, terencana, terkoordinir dan berkesinambungan. Salah satu upaya pembinaan dikalangan remaja yaitu perlu adanya suatu kegiatan yang bersifat konventatif dan dapat memacu kreativitas dan pengembangan bakat seni yang menimbulkan nilai-nilai estetika masyarakat.

Kesenian yang menjadi kebanggaan Rw 04 adalah Reog, Tari-tarian dan vokal group. Reog berasal dari daerah Banten (Jawa Barat) yang berciri sama dengan Reog Sunda yaitu jenis lawakan yang di iringi dengan empat gendang. Adapun tari-tarian yang sering dipentaskan adalah tari Sunda, Bali, dan Jawa. Ruang lingkup pementasan tidak terbatas di wilayahnya sendiri, namun tampaknya telah menjangkau diluar kelurahan Senen, seperti pementasan di kecamatan Senen dalam rangka perayaan 17 Agustus. Selain itu juga menerima panggilan untuk pentas pada pesta-pesta perkawinan atau mereka yang melaksanakan kegiatan. Pementasan itu dipimpin langsung oleh pembinanya yaitu bapak Achmad Maulana.

Kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan yang secara rutin dilaksanakan setiap seminggu sekali di gedung gelanggang remaja Senen. Seusai latihan diadakan pengarahannya yang berlandaskan hasil latihan saat itu. Menurutnya apa yang dilakukan itu untuk menguatkan rasa tanggung jawab dan melaksanakan kebiasaan mematuhi aturan-aturan dan tata tertib yang berlaku.

Di samping itu dilakukan pendataan kepada masing-masing siswa atau mereka yang dianggap memerlukan bimbingan tersendiri. Dari segi administratif, bapak Achmad mengadakan pendataan dan pendaftaran ulang bagi siswa lama, dan untuk siswa baru tidak terbatas dilingkungan sendiri.

Kesehatan dan keluarga Berencana

Dewasa ini program gizi masyarakat telah tersebar luas di kelurahan Senen. Adapun bentuk pembinaan yang dilaksanakan berupa :

- a. bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mereka mampu/mengetahui berbagai prinsip persoalan yang berhubungan dengan makanan yang bergizi.
- b. bertujuan meningkatkan status gizi kepada keluarga dan masyarakat khususnya gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui dan anak sekolah serta tenaga kerja wanita.
- c. bertujuan memberikan penataran gizi bagi pengurus organisasi Pemuda Karang Taruna yang bekerja sama dengan tingkat kecamatan dan penyuluhan bagi remaja.
- d. bertujuan menekankan angka kematian bayi, balita dan ibu hamil serta menurunkan angka kesakitan masyarakat dengan melalui pengarah-pengarahan.

Kesejahteraan Keluarga

Dalam usaha menciptakan/meningkatkan kesejahteraan keluarga diperlukan wadah yang disebut Kesejahteraan Keluarga (PKK). Peranan wadah di sini adalah menampung serta melaksanakan aspirasi dan inisiatif masyarakat. Tenaga pembina didominasi oleh wanita-wanita trampil yang diketahui oleh tokoh wanita yang telah dikenal di lingkungan sendiri maupun kecamatan, yaitu ibu Sunarya yang didampingi oleh orang tuanya yaitu ibu Chatijah/ibu Hasan.

Ibu Chatijah adalah sesepuh RW 04, merupakan cikal bakal yang tinggal di lingkungan tersebut. Sedangkan ibu Hasan adalah tokoh andalan dibidang pijat salah urat. Keahlian ibu Hasan diperoleh dari neneknya yang hidup sekitar tahun 1800-an dan diturunkan. Pasien ibu Hasan adalah orang dari berbagai tingkatan usia, termasuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan, oleh karena itu dia dikenal sebagai dukun urat. Di samping itu, dia juga dikenal sebagai orang yang tahu akan religi/kepercayaan dan agama. Berkenaan dengan itu banyak warga yang sering minta tolong untuk dipanggil dan memesan bahan-bahan sesaji untuk upacara-upacara seperti sunatan, perkawinan dan lain-lain. Orang China sering memesan "ancak lengkap dengan sesaji" yang kemudian dibuang di tempat-tempat yang dianggap rawan seperti perempatan jalan atau kali. Ibu Hasan juga mantan pejuang dan kini tercatat sebagai anggota KOVAVERI (Korps Wanita Veteran Republik Indonesia).

Adapun pembinaan yang telah dilakukan oleh ibu Sunarya adalah :

1. Memberikan ceramah tentang "tata laksana rumah tangga". Dengan ceramah ini diharapkan setiap anggota keluarga mampu mengatur rumahnya sesuai dengan kondisi yang ada. Rumah yang rapi bukan berarti rumah yang berisi barang-barang mahal dan indah, menurutnya terwujudnya rumah nyaman dan sejuk sangat dibutuhkan ketataan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat yang berasal dari dalam dirinya. Sikap cepat tanggap terhadap keadaan lingkungan adalah sikap yang terpuji dan mulia.
2. Mengajarkan aneka cara pembuatan kue-kue. Dari kegiatan ini warga masyarakat memiliki tambahan ilmu pengetahuan yang sangat berarti dalam upaya peningkatan penghasilan. Produksi kue-kue diawali dari tingkat kecil-kecilan dan diujakan dilingkungan terbatas, dan saat ini beberapa ibu telah menunjukkan kemampuan melayani pesanan toko-toko, warung, arisan, pesta maupun untuk hajatan.
3. Koordinasi dengan karang taruna dalam kegiatan kerja bakti. Pada saat diadakan kerja bakti anggota PKK menyiapkan konsumsi sedangkan anggota karang taruna bergabung dengan bapak-bapak membersihkan selokan, lorong-lorong gang dan tempat-tempat lainnya.

Pendidikan

Lingkungan rumah atau keluarga khususnya orang tua sangat menentukan tingkah laku anak. Dalam hal ini orang tua berperan dalam penanaman disiplin dan membantu mengembangkan prestasi. Pada bagian ini akan diketengahkan beberapa segi dari sosial, ekonomi dan budaya orang tua yang diduga mempengaruhi atau mendorong terwujudnya disiplin dan prestasi anak. disamping itu akan dicoba mengutarakan variable lain yang secara tidak langsung ikut serta menentukan disiplin dan prestasi anak antara lain : Jumlah anak dan bagaimana lingkungan tempat tinggal.

Pada hakekatnya manusia adalah sama dan sederajat, tetapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari tidak demikian adanya. Keadaan ini dikarenakan terdapat nilai-nilai yang mengakibatkan penolakan-penolakan dan pengakuan-pengakuan terhadap sesama individu-individu, terhadap kelompok, bahkan, lapisan-lapisan sosial, seperti lapisan atas, menengah, dan bawah. Kenyataan menunjukkan bahwa status sosial seseorang dimasyarakat

itu erat kaitannya dengan usaha dan prestasi yang diperoleh. Atau dapat dikatakan bahwa indikator untuk menentukan kedudukan seseorang didalam suatu lapisan adalah ditentukan oleh kelebihan pemilikan atas sesuatu yang dihargai oleh masyarakat (Soerjono, 1982: 219). Contohnya adalah orang yang berpendidikan lanjutan menengah dianggap lebih tinggi dari pada orang yang hanya memiliki pendidikan tingkat dasar.

Pendidikan, khususnya pendidikan formal merupakan salah satu alat bagi seseorang untuk dapat bergerak dari tingkat rendah ke tingkat tinggi, yaitu berdasarkan pada jumlah ilmu yang dimilikinya. Akibatnya sekolah adalah juga tempat yang penting untuk memupuk semangat berprestasi. Demikian halnya mengenai kurangnya minat belajar dan daya serap yang dimiliki anak terhadap materi pelajaran yang diberikan, mengakibatkan guru yang sempat kami temui menilai bahwa orang tua anak pada umumnya kurang menyediakan fasilitas yang dibutuhkan anak. Selanjutnya timbul dugaan bahwa orang tua mereka tergolong lapisan bawah.

Dengan memperlihatkan data-data pada bab terdahulu tampak bahwa sebagian besar warga berpendidikan rendah, berarti pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki tidak banyak. Orang tua dengan keadaan demikian cenderung kurang mampu untuk memberikan norma-norma yang optimal kepada anak mereka, karena mereka sendiri kurang mengenalnya. Peraturan-peraturan yang terlalu ditanamkan kepada anak, baik dalam sikap maupun dalam tingkah laku serta tatacara kehidupan.

Berlandaskan kemampuan dan keberadaannya mereka lebih memantapkan sikap bahwa fungsi anak merupakan faktor penting yang memiliki nilai ekonomi. Keberhasilan sesuatu di ukur dari cepatnya mendapatkan/mendatangkan hasil untuk hidup sehari-hari. Pendidikan dinilai membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan nafkah, bahkan amat menghamburkan biaya dan tidak mungkin dijangkaunya dengan kondisi yang ada saat ini.

Menurut pandangan mereka, yang terpenting bagi anak memiliki keterampilan mencari uang yang halal, minimal mampu untuk kebutuhan, asal tidak lapar dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka yang berprinsip demikian ini adalah penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh bangunan dan pedagang kecil.

Sebagai pelayan masyarakat Nanik Mayasari (Warga asli RW 04) selalu memperhatikan warganya sesuai dengan kemampuannya khususnya dalam usaha mencerdaskan masyarakat atau bangsanya. Mayasari yang telah menyelesaikan sekolah pendidikan guru (SPG) merasa terpanggil untuk berkewajiban membuka sekaligus mengajar Taman Kanak-Kanak Bina Keluarga Balita (TK BKK).

Taman Kanak-kanak tersebut sangat mendambakan warga untuk meresapi kemudian mematuhi Undang-Undang Pendidikan No.2 tahun 1990 . Oleh sebab itu hanya anak yang dianggap mampu dikenakan biaya, dan sifatnya sukarela. Uang yang terkumpul itu dikembalikan lagi bagi kegiatan belajar mengajar.

Menurut sejarahnya TK ini pernah ada dan mengalami perkembangan, namun sejak terjadi perubahan pengurus RW kurang mendapat tanggapan lagi. Akibatnya mengalami kemandegan selama 2 tahun. Atas prakarsa Mayasari pada bulan Juli 1972 TK tersebut dirintis lagi dengan menampung anak-anak masa sekolah yang terlantar. Selain itu Mayasari juga pernah berhasil memperjuangkan anak TK sampai SD kelas III tidak dipungut biaya.

Dengan pembinaan tersebut diharapkan masyarakat setempat terdorong untuk menyekolahkan anaknya terutama anak-anak usia sekolah, agar mendapatkan ketrampilan dan kemampuan sesuai dengan bakat dan minat mereka.

Kebersihan

Sebagai anggota masyarakat yang dituakan Teguh (tokoh masyarakat) memahami betul kondisi setempat. Tanpa adanya pamrih dia berkewajiban membantu mengawasi dan memelihara fasilitas kelengkapan wilayahnya. Kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan adalah menanamkan kesadaran meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan bersih yang meliputi air got/saluran air, mandi cuci kakus (MCK) dan sampah.

Untuk saluran air dibersihkan dua kali dalam seminggu terutama sampah dari pemotongan ayam yang sering menghambat kelancaran saluran air. Bila terlihat awan mendung di langit, pak Teguh secepatnya melihat saluran air dan membersihkannya dari kotoran dibantu oleh para remaja. Tetapi di lingkungan RT 015 banjir tetap tidak bisa dihindari karena kondisi lingkungan

memang rendah dibandingkan dengan jalan yang mengapitnya yaitu Jl. Senen Raya dan Jl. Stasiun.

Sampah rumah tangga dan sampah bulu ayam setiap hari pukul 4.00 diangkut, sedangkan khusus sampah rumah tangga diangkut pukul 16.00 WIB. Sampah-sampah tersebut sudah harus disiapkan di tepi jalan kampung yang membanjir antara RT 015 dan RT 012. Yang perlu diingat adalah bahwa sampah-sampah tersebut harus dikemas dengan plastik atau karung untuk menjaga kerapian dan agar tidak beterbangan. Apabila ada warga yang tidak mematuhi aturan tersebut segera mendapat teguran pada saat itu juga. Dengan demikian truk-truk kebersihan milik tim kebersihan kelurahan/kecamatan segera dapat mengangkut sampah itu ke tempat pembuangannya.

Selain sampah, perhatian juga ditujukan pada pengumpulan daur ulang, seperti usus buntu ayam dan bulu ayam. Usus buntu ayam dikumpulkan dan dikemas dalam karung kemudian dikirimkan ke Jakarta Kota untuk dijadikan makanan babi. Sedang bulu ayam dikirim ke pabrik kemoceng. Hasil penjualan dimasukkan ke kas RW 04 dan disalurkan lagi untuk kegiatan yang tidak ditopang dana pembangunan baik kelurahan maupun kecamatan atau bantuan instansi lain. Bisa pula digunakan untuk membantu mereka yang terkena musibah.

BAB VI

ANALISA, KESIMPULAN DAN SARAN

Kelurahan Senen terletak di pusat kota metropolitan Jakarta Raya dengan segala macam persoalan dan kesibukan yang tiada henti sepanjang hari. Di kelurahan ini pula terletak pusat perbelanjaan, terminal, bioskop, pasar, stasiun serta lingkungan pemukiman.

Di setiap pusat kegiatan masyarakat di kelurahan Senen tersebut, tentu tidak lepas dari segala macam problema, salah satu yang hingga kini sulit dipecahkan adalah masalah disiplin. Disiplin warga kota dan para pengguna jasa di setiap pusat kegiatan masyarakat sangat diperlukan karena bertolak dari disiplin pribadi akan tercipta disiplin nasional. Disiplin nasional yang tinggi akan sangat membantu manifestasi bangsa.

Lingkungan pemukiman di kelurahan Senen, kurang mencerminkan suatu lingkungan pemukiman yang baik, jauh dari memenuhi standart rumah tinggal. Di daerah ini selain menjadi tempat pemukiman juga digunakan untuk warung. Warung-warung tersebut menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari di samping kebutuhan makan dan minum. Selain itu, banyak pula rumah-rumah yang beberapa kamarnya disewakan. Di dalam satu rumah yang sempit itu masih dibagi-bagi lagi menjadi beberapa kamar dan disewakan. Akibatnya bisa dibayangkan betapa sempit dan pengapnya tiap-tiap kamar di rumah sewa tersebut.

Dari pengamatan yang kami peroleh di lapangan menunjukkan bahwa di mana ada ruang di situ atap direntangkan, tiang ditegakkan dan akhirnya sepetak rumah didirikan. Itulah yang terjadi di RW 04 Kelurahan Senen.

Bahkan di sepanjang jalur pengaman (sekitar rel Kereta Api dan kabel tegangan tinggi), di atas tanah milik ataupun di atas tanah yang bukan milik. Pembangunan rumah, terutama rumah-rumah sementara yang tidak memenuhi syarat sudah tidak dapat dikontrol lagi. Puluhan rumah seperti itu berdesakan di atas petak-petak tanah dan bukan hal yang terlalu aneh kalau kebetulan pintu keluar berhadapan dengan kakus tetangga. Di sini lorong tak ubahnya bagaikan lobang jarum, pas-pasan untuk meloloskan satu orang saja. Di lorong itu orang-orang lewat, jemur kain, bercengkerama atau mencari kutu. Bahkan kereta api juga diperlakukan sama, oleh desakan rumah, kereta api hanya diberikan ruang yang pas-pasan untuk numpang jalan. Jalur hijau untuk pengaman khusus untuk kereta api yang konon harus 6 dan 11 meter ke kiri dan kanannya hanya mungkin direbut kembali oleh Perumka dengan meminjam tangan DKI yang kadang-kadang menampar rumah kardus dengan keras sekali.

Di bagian atas telah dikatakan bahwa banyak rumah-rumah di lingkungan penelitian ini juga disewakan. Pada umumnya, para penyewa kamar tersebut adalah kondektur atau kernet terminal Senen. Mereka sama sekali tidak memikirkan masalah kesehatan lingkungan. Hal itu disebabkan oleh kepenatan seharian bekerja, dan yang ada dalam benaknya adalah istirahat pada malam hari untuk memulihkan tenaga agar esok hari bisa bekerja lagi. Oleh karena itu masalah kedisiplinan dalam menangani masalah sampah dan limbah tidak begitu dipedulikan.

Berdasarkan keterangan yang kami peroleh, warga di wilayah pemukiman setempat cukup memiliki kesadaran dan disiplin dalam mengembangkan hubungan sosial dengan tetangga. Mereka memahami pentingnya hidup bertetangga, bahkan di antara mereka menunjukkan hubungan ketergantungan. Pola hubungan semacam itu terwujud karena mereka saling membutuhkan dalam suka maupun duka. Dalam penyelenggaraan pesta-pesta misalnya, seperti perkawinan, khitanan dan lain-lain, keluarga yang mengadakan pesta sangat membutuhkan bantuan tetangganya. Para tetangga pun dengan spontan mengulurkan tangan dalam berbagai bentuk sebatas kemampuan yang dimilikinya dengan tanpa imbalan. Namun dengan suatu pengharapan akan mendapatkan bantuan pula di saat memerlukannya.

Untuk keluarga yang ditimpa kemalangan, seperti jika ada yang sakit atau meninggal masyarakat di tempat penelitian juga menunjukkan kepedulian yang mantap. Terdapat suatu kebiasaan setempat pada peristiwa kematian.

yaitu para tetangga segera mengunjungi keluarga yang sedang ditimpa kemalangan tanpa menunggu pemberitahuan atau perintah ketua lingkungan setempat. Mereka dapat mengetahui musibah itu dari seorang warga yang kebetulan secara kebetulan menunggui orang sakit atau saat ajalnya tiba. Dari dialah berita kematian menyebar ke seluruh wilayah pemukiman, dan secara berbondong-bondong para tetangga datang melayat. Di antara mereka terlihat ada yang membawa bahan makanan, seperti beras, sayuran. Selain itu juga ada warga yang mengirimkan kue-kue buatan sendiri. Kemudian ada pula yang terlibat dalam memandikan jenazah, menyiapkan liang lahat, membantu saat penguburan jenazah, bahkan sampai pada upacara kematian dan peringatannya. Kondisi seperti itu jelaslah cukup meringankan beban keluarga yang sedang ditimpa kemalangan tersebut.

Hubungan ketetanggaaan yang intensif juga dapat terlihat pada pola kerja gotong royong, baik untuk kepentingan seorang warga maupun untuk kepentingan bersama. Apabila seorang warga sedang disibukkan dengan suatu pekerjaan, sebagai contoh mendirikan rumah atau memperbaiki rumah, dia dapat meminta bantuan tetangganya. Dan para tetangga akan dengan senang hati membantu orang yang bersangkutan, walaupun dengan sedikit imbalan atau bahkan tanpa imbalan apapun. Khususnya RT 015 hubungan timbal balik seperti ini tampak kurang jelas. Dimungkinkan mereka berpegang teguh pada pendirian bahwa di Jakarta hanya untuk kepentingan duniawi.

Bergotong royong juga dilakukan dalam mengerjakan sesuatu untuk kepentingan umum, seperti membuat jalan, mendirikan mesjid, dan jenis pekerjaan lain. Mereka menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan sukarela dan rasa solidaritas yang tinggi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kehidupan bertetangga di wilayah pemukiman setempat berlangsung dengan baik. Mereka dapat mengembangkan rasa sosial yang selama ini telah terbina dengan baik. Walaupun demikian dapatlah dikatakan bahwa tidak semua warga masyarakat di lingkungan pemukiman setempat telah terlibat secara menyeluruh dalam setiap kegiatan sosial. Ada di antara mereka yang belum terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan, dengan alasan misalnya tidak ada waktu luang. Sebenarnya alasan tersebut hanya dibuat-buat saja karena pada dasarnya mereka memang malas untuk mengulurkan tangan membantu tetangga atau berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti gotong royong.

Akibat dari tindakan sebagian kecil warga yang tidak mau bergotong royong atau melakukan kegiatan sosial dalam hubungan ketetanggaan tersebut adalah terjadinya rasa enggan untuk bertemu atau berkumpul dengan orang lain dalam segala kegiatan. Oleh karena itu orang yang bersangkutan tadi merasa terisolir dalam lingkungannya sendiri, bahkan tak jarang mereka memang dikucilkan sehingga tidak mempunyai teman. Dengan demikian mereka lalu malas bergaul dengan tetangga. Keadaan ini yang menjadi masalah sosial dalam hubungan ketetanggaan.

Selanjutnya mari kita lihat tingkat kedisiplinan masyarakat di tempat-tempat umum. Pertama adalah disiplin di pasar atau di pusat pertokoan. Dominasi pedagang di pasar Senen tampak menonjol, misalnya pasar inpres didominasi oleh pedagang Batak. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika di pasar ini setiap hari bergema lagu-lagu Batak. Pedagang yang lain berasal dari suku bangsa Minangkabau, Ambon dan Jawa. Namun prosentase mereka amat kecil jika dibandingkan dengan pedagang sukubangsa Batak.

Masalah sampah di pasar maupun di pertokoan masih terasa belum terkoordinir dengan baik. Masyarakat belum mengenal betul arti kebersihan lingkungan. Oleh karena itu setiap ada kesempatan penekanan masalah kebersihan dan disiplin membuang sampah pada tempatnya masih perlu diteruskan.

Seperti halnya dengan daerah pasar, area terminal pun tidak jauh berbeda suasana. Kesemrawutan aneka kendaraan umum terpusat di sini, banyak di antara para pengemudi yang tampak kurang tertib dan tidak disiplin mematuhi aturan yang telah dicanangkan. Mereka menaikkan dan menurunkan penumpang di mulut terminal sehingga membuat antrean panjang yang berbuntut pada kemacetan. Keadaan semacam ini masih ditambah lagi dengan adanya satu pintu terminal yang digunakan untuk dua arah, yaitu untuk keluar dan masuk mobil.

Di lain pihak, para aparat pengelola terminal Senen seolah tidak peduli dengan situasi dan kondisi semacam itu. Hal itu dimungkinkan karena mereka pun tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi keadaan seperti itu, karena memang areal terminal yang sempit. Jadi sarana dan prasarana terminal sendiri memang tidak mendukung terciptanya disiplin, baik bagi penumpang kendaraan umum atau pun para sopir dan aparat yang berwenang.

Di daerah penelitian ini, kesemrawutan lalu lintas juga terjadi terutama di sekitar pasar, terminal dan pusat pertokoan Senen. Di samping frekuensi kendaraan umum yang padat, kendaraan pribadi pun tidak bisa melaju. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya lalu lalang manusia yang sedang menunggu bus sepulang dari berbelanja atau mereka yang transit di terminal Senen untuk berganti kendaraan bus/mikrolet/metromini. Kesemrawutan ini masih ditambah lagi dengan adanya gedung atrium plaza di segitiga Senen, yang di samping terdapat toko-toko atau departement store, rumah makan juga terdapat gedung bioskop.

Dari pengamatan yang kami peroleh di gedung bioskop, baik di bioskop kelas tinggi di atrium plaza maupun bioskop kelas dua dan kelas tiga ternyata disiplin penonton pun masih rendah. Yang paling menunjukkan tingkat kedisiplinan yang tinggi adalah di bioskop kelas utama yaitu yang berada di atrium plaza tadi. Sebaliknya di bioskop lainnya di kompleks perdagangan Senen disiplin para penonton masih sangat rendah. Hal itu terlihat dengan banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana, sikap duduk penonton yang kurang baik, misalnya dengan mengangkat kaki dan meletakkannya di atas tempat duduk penonton di depannya.

Dari hasil pengamatan tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya disiplin sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita berada. Disiplin harus dimulai dari kita sendiri. Jika kita masing-masing mempunyai rasa disiplin, lambat laun setiap orang pun akan mempunyai disiplin pula. Dengan demikian masyarakat pada umumnya akan menjunjung tinggi disiplin tersebut, sehingga disiplin menjadi sesuatu yang tidak luar biasa. Dengan demikian disiplin diri akan menjadi disiplin nasional yang bisa dibanggakan.

Dari penemuan yang kami peroleh di daerah penelitian, kami akan memberikan sedikit saran yang kiranya dapat bermanfaat. Kata disiplin mudah diucapkan, tetapi bagaimana melakukan disiplin jarang sekali terdengar. Bila kita merenung sebentar dan sekilas mendalami "disiplin" maka betapa banyak masalah yang timbulnya disebabkan kurangnya bahkan tidak adanya disiplin diri. Disiplin paksaan yang ditanamkan Belanda pada masa penjajahannya, sedikit demi sedikit terkikis habis bersama hilangnya paksaan itu sendiri.

Ada suatu usul "sederhana" dan baik untuk pengetrapan disiplin supaya disiplin berjalan baik, haruslah dimulai dari dua arah yang kemudian ditemukan dalam satu titik, di mana saat itulah disiplin dapat berjalan dan berkembang. Disiplin haruslah mulai diajarkan sejak masih anak-anak, secara telaten, sabar

dan teratur mulai digariskan. Tentunya disiplin yang sederhana dan memang berguna bagi anak-anak itu di masa mendatang dan terus dikembangkan tahap demi tahap. Disiplin ini haruslah tanpa suatu “paksaan” dan “sanksi” yang menyakitkan, karena kedua hal tadi bisa menggagalkan semuanya. Sementara itu bapak-bapak yang di atas harus pula berdisiplin, disiplin yang baik yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat banyak, dan jalannya disiplin di atas perlu disertai sanksi-sanksi tertentu supaya keteraturan-keteraturan akan timbul dan terus terbina. Dengan demikian bukannya disiplin yang dipaksakan apalagi hanya dimulai dari bawah saja, atau mencoba meningkatkan disiplin “atasan”, tapi memang harus dua arah.

Dengan dua arah disiplin ini, memungkinkan secara bertahap akan terwujud suatu disiplin sesuai dengan alam wilayah kelurahan Senen khususnya dan Indonesia pada umumnya. dan yang tidak kalah penting adalah menerapkan disiplin pada usia-usia tumbuh tidaklah dengan cara yang keras, apalagi dicoba menerapkan disiplin yang “rigid” pada usia-usia ini, tidak lain kerugian total akan dijumpai.

Memang pada awalnya, dengan disiplin banyak prakarsa dan kemauan individu terbandung dan kadang-kadang menjengkelkan. Tetapi jangan lupa disiplin adalah jalan yang terefektif untuk mengejar ketinggalan yang selama ini cukup “menyiksa “ itu.

Dan bila pola dua arah tadi mulai dijalankan maka yang terpenting adalah tekad yaitu tekad kita bersama untuk mewujudkannya. Insya Allah akan terasa gunanya disiplin-disiplin yang pada mulanya memang terasa dongkol, dan bukanlah segala sesuatu yang baik untuk memerlukan pengorbanan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Alisjahbana, Anna; dkk.

1982 *Menuju Kesejahteraan Jiwa*. Jakarta, Gramedia.

Ametembun.

1981 "Kriteria-kriteria Evaluasi Mengajar", *Evaluasi Mengajar*. Bandung, Suri, hal : 5 - 35.

Bachtiar, H.W.

1979 "Struktur Masyarakat Indonesia", *Ilmu dan Budaya II*, 0126 - 02602 : Hal : 87 - 105 .

Blake, Florence, G.

1954 *The Child, His Parents and the Nurse*. Philadelphian, J.B. Lippincott company.

Crow & Crow.

1958 "Mental Growth and Development", *Educational Psychologi*. New York, American Book Company, hal : 63 - 78.

Danandjaja, James.

1963 *Murid-murid SMA (JPP di Djakarta Kota)*. Jakarta FSUI.
(Skripsi yang tidak diterbitkan).

1980 "Menyusun Sejarah Desa Trunyan", *Seri Penerbitan Ilmiah, FSUI*.

Daradjat, Zakiah.

1984 *Kepribadian Guru*. Jakarta, Bulan Bintang.

Djumhur : Surya, Moh.

1975 *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*. Bandung, Ilmu.

English, H.B.

1961 *The Dyanamics of Child Development*. New York, Hol Rinehart and Winston Inc, copyright 1961.

Eson, Morris, E.

- 1966 *Psychological Foundations of Educations*. New York, Holt Rinehart and Windston, Inc.

Geertz, H.

- 1983 *Keluarga Jawa*. Jakarta, Grafiti Pers.

Gerungan, W.A.

- 1967 *Psychology Sosial*. Bandung, PT. Eresco, Tjitakan kedua

Hall, C.S.

- 1957 *A Premier of Freudion Psychology*. New Amerikan Library, A Men tor Book.

Harry, V.D.

- 1972 *Hubungan Orang Tua Sebagai Faktor Penyebab Kegagalan Prestasi Anak Di Sekolah*. Jakarta, F I (Skripsi yang tidak diterbitkan).

Homans, George, C.

- 1976 "What Do We Mean by Social "Structure"?", *Approaches to the Study of Social Structure* (ed : Peter M. Blau). London, Open books, hal : 53 - 66.

Hurlock, Elizabeth, B.

- 1960 *Child Psychology*. New Jersey, Prentice Hall Inc., hal : 115
1962 *Psychologi Anak*, diterjemahkan oleh Mochtar Buchori dan Conny Semiawan. Bandung. Tarate.

Jersild, A.T.

- 1961 *Child Psychologi*. Tokyo, Prentice hall Inc. : Maruzen Co. Ltd.

John Vasey.

- 1974 *Pendidikan Dunia Modern*, terjemahan L.P. Murtini.



Gambar 1

Jalan Menuju Lokasi Kelurahan Senen Dengan Latar Belakang
Kantor Kecamatan Senen



Gambar 2.

Kantor Kelurahan Senen



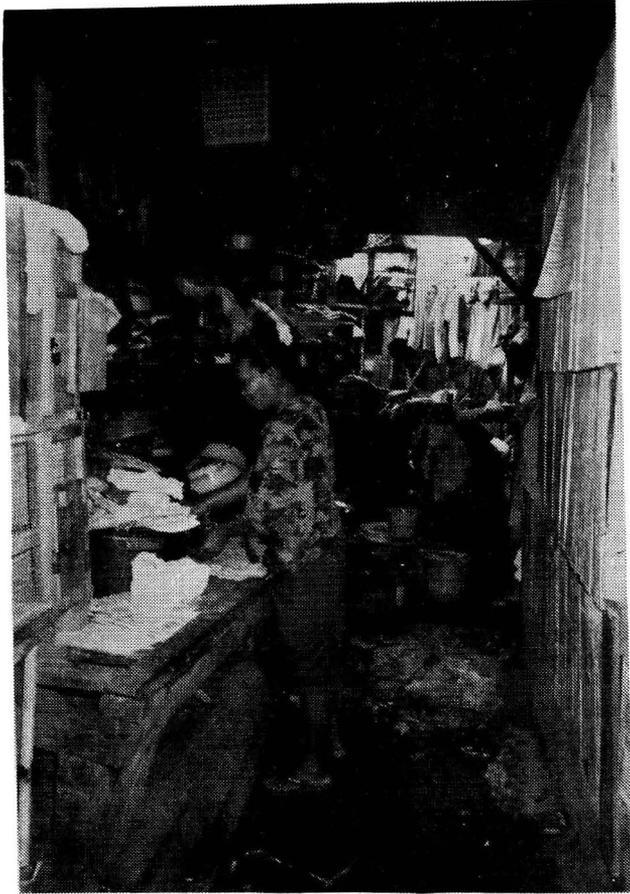
Gambar 3
Jalan menuju RT. 015



Gambar 4
Sekretariat RW. 04



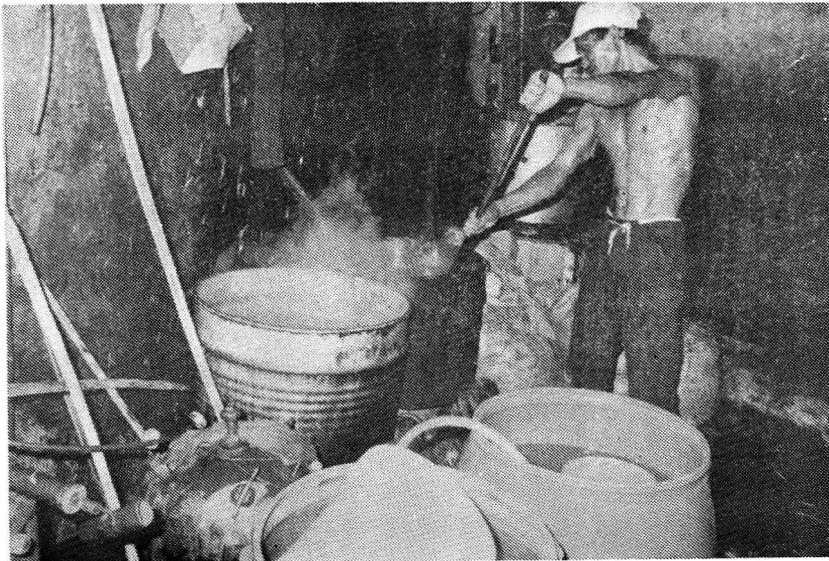
Gambar 5
Keadaan Jalan di RT. 015



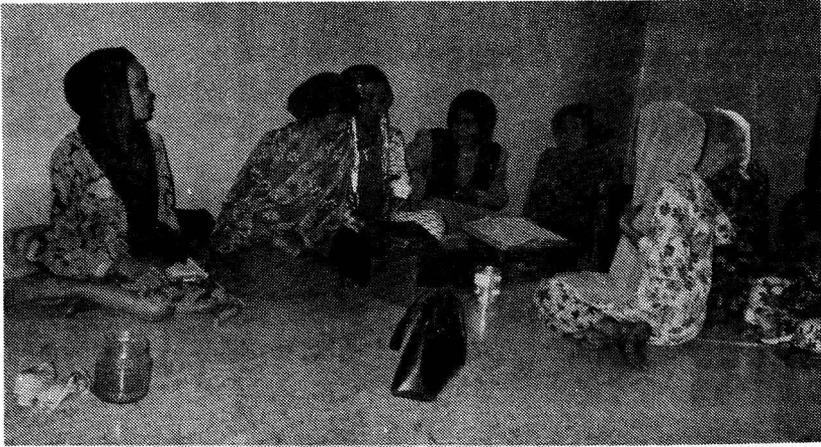
Gambar 6
Situasi Rumah Warga di RT. 015



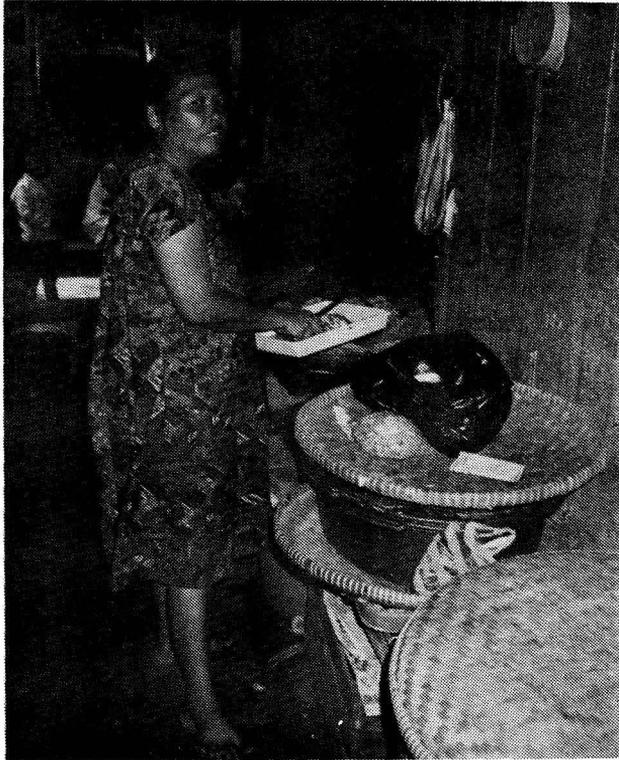
Gambar 7
Suasana di Pemotongan Ayam RT. 015



Gambar 8
Air Panas Yang dipersiapkan
Untuk Pembersih Bulu Ayam



Gambar 9
Pengajian Ibu-ibu di RT. 015



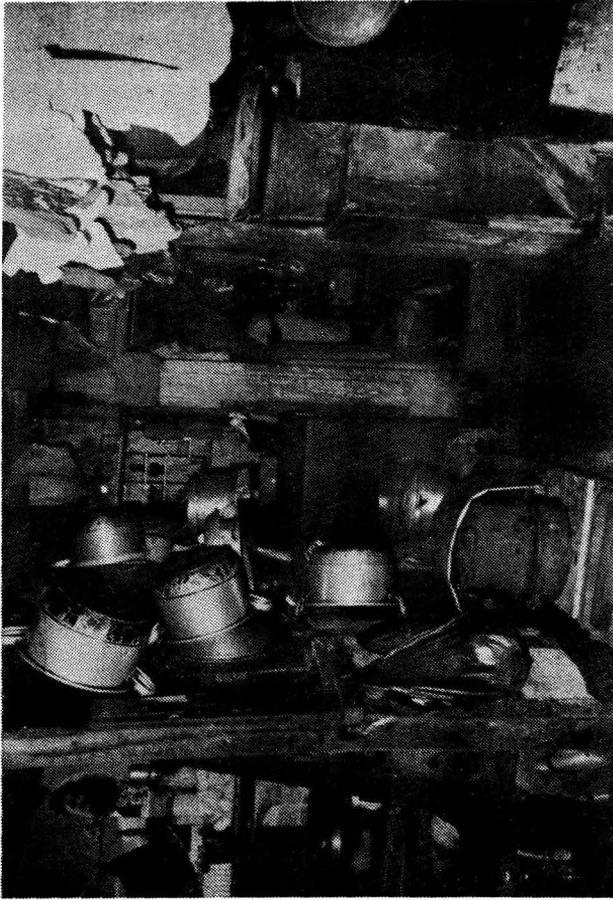
Gambar 10
Pedagang Rempeyek di RT. 015



Gambar 11
Rumah Tinggal Ketua RW. 04



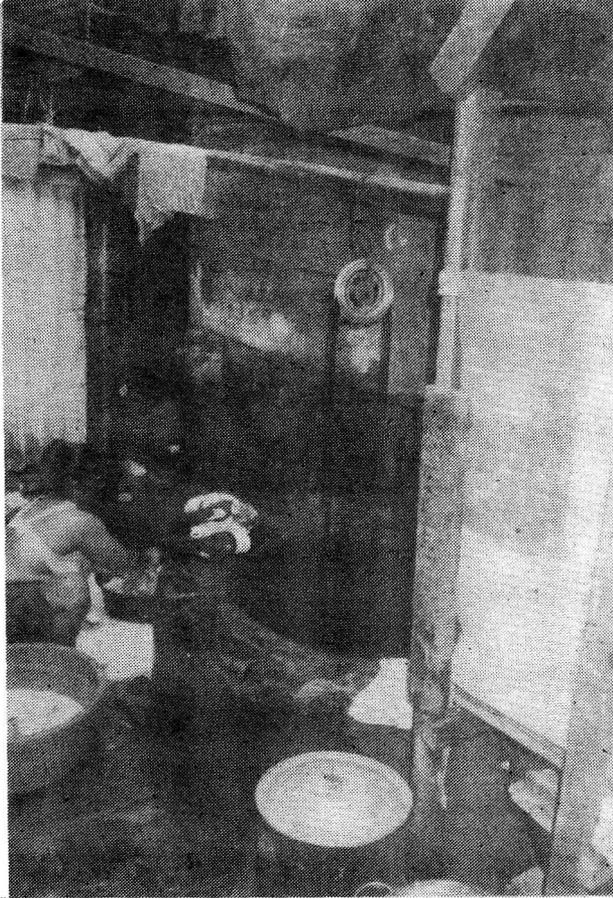
Gambar 12
Warga RT. 015 Tang Sedang Santai



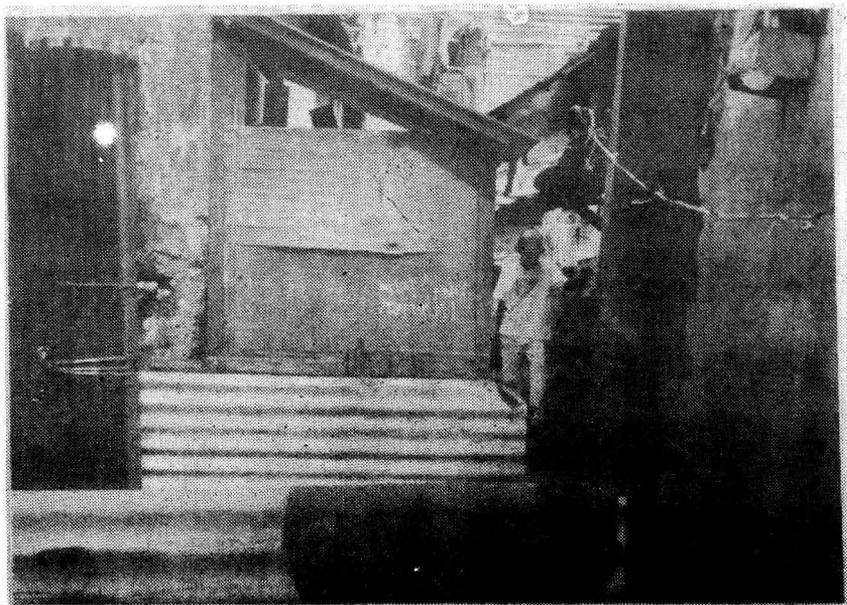
Gambar .13
Rumah Tinggal Pedagang Nasi Di RT 015



Gambar 14
WC Umum di Rt. 015



Gambar 15
Satu-satunya Sumur di RT 015



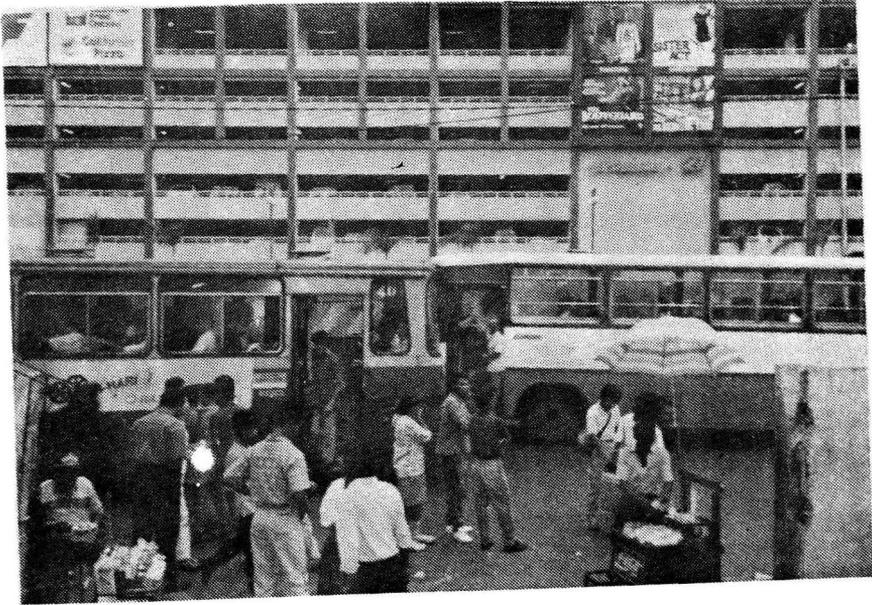
Gambar 16
Kamar Mandi dan WC Warga RT. 015



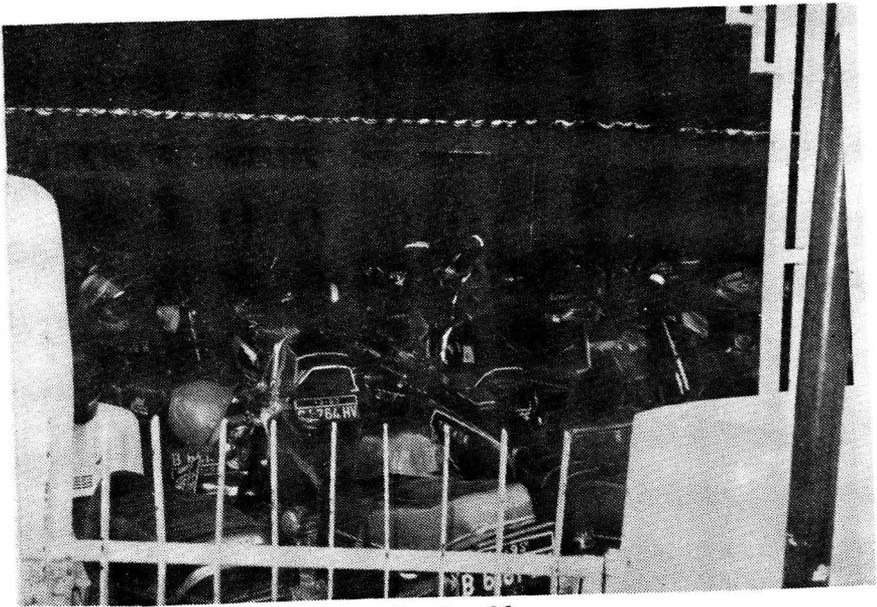
Gambar 17
Kantor Suku Dinas LLAJR



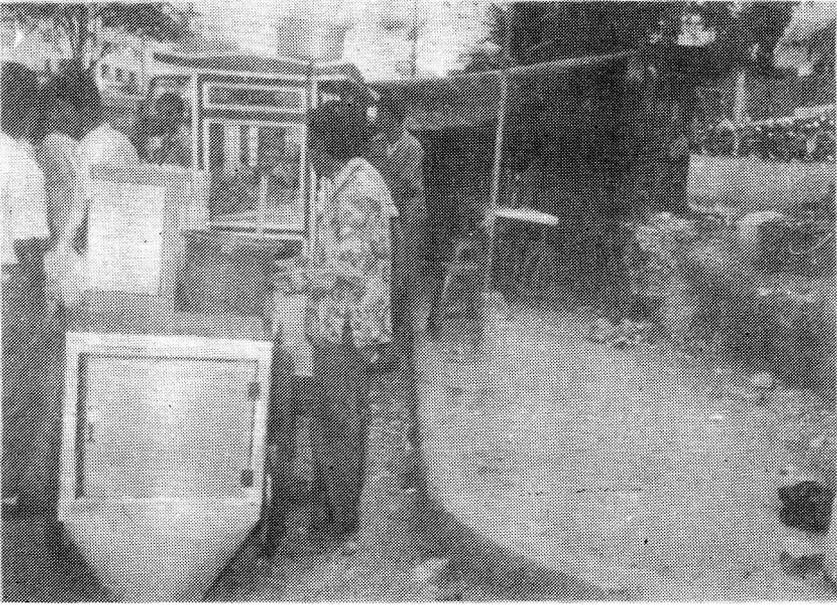
Gambar 18
Terminal Senen Yang Sudah Sarat



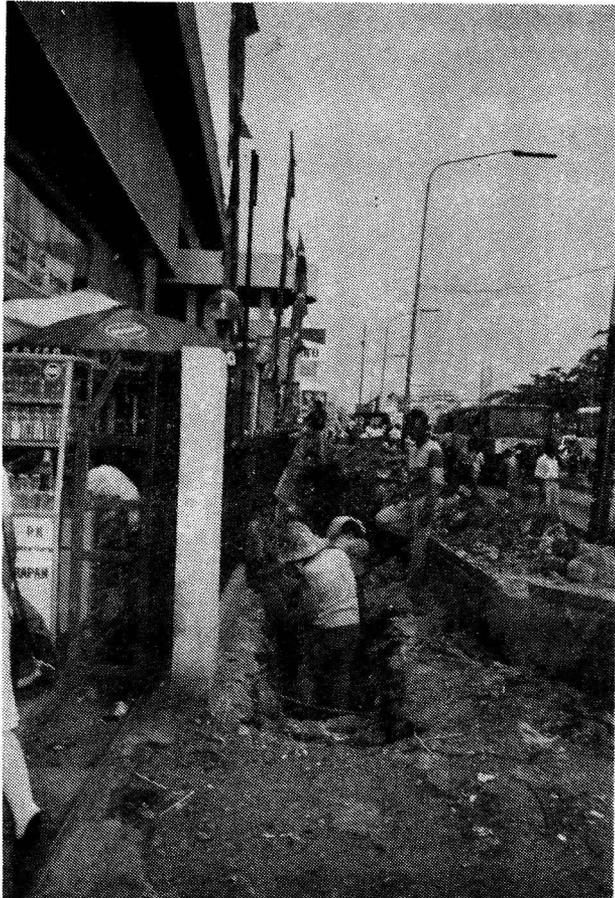
Gambar 19
Jalan Senen, Raya Yang selalu Macet



Gambar 20
Halaman Pasar Senen Yang Digunakan Untuk Parkir



Gambar 21
Pedagang Kaki Lima Salah Satu Penyebab Kemacetan



Gambar 22
Galian Jalan Salah Satu Penyebab Kemacetan



Gambar 23
Situasi Pasar Inpres



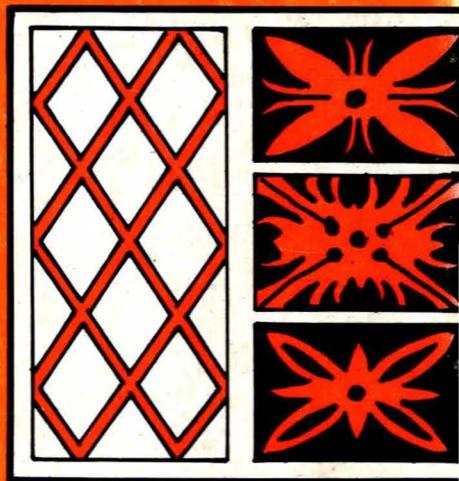
Gambar 24
Pedagang Sayur Dengan Sampahnya



Gambar 25
Tumpukan Sampah di Pasar Senen



Gambar 26
Mobil Pengangkut Sampah



Perpustakaan
Jendera